

1

KAJIAN PERKEMBANGAN LUAS LAHAN PERTANIAN DAN JUMLAH PENDUDUK DI PROVINSI JAMBI

Peneliti :

Weni Lestari, SP

A. LATAR BELAKANG

Dampak lain akibat pertambahan penduduk di Provinsi Jambi adalah semakin berkurangnya luas lahan pertanian yang berubah menjadi lahan pemukiman, sementara alih fungsi lahan pertanian di Provinsi Jambi masih berlangsung sampai saat ini. Pertambahan jumlah penduduk yang cenderung terus meningkat di Provinsi Jambi mengakibatkan proses pembangunan juga semakin cepat, sehingga menyebabkan perubahan pola penggunaan lahan, dimana ruang terbangun semakin mendominasi dan mendesak ruang-ruang alami untuk berubah fungsi.

Perkembangan lahan pertanian di Provinsi Jambi pada tahun 2007 sebesar 3.312.806 Ha yang mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 4.011.805 Ha atau meningkat sebesar 17,42%. Sementara untuk lahan sawah dalam kurun waktu 25 tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 1999 luas lahan sawah 275.246 Ha turun pesat menjadi 133.863 Ha pada tahun 2016, turun sebesar 141.378 atau 105% dengan rata-rata penurunan sebesar 4,2 % pertahun.

Perkembangan jumlah penduduk di Provinsi Jambi selama kurun waktu 25 tahun terakhir meningkat dari tahun 1991 hingga tahun 2016. Dimana pada tahun 1991 berkisar 2 juta jiwa yang meningkat menjadi 3 jutaan jiwa pada tahun 2016. Pertambahan jumlah penduduk di Provinsi Jambi ini selama kurun waktu

tersebut adalah sebesar 20,56 % dengan pertumbuhan rata-rata 2,05 persen pertahun. Di sisi lain peningkatan jumlah penduduk yang tinggi akan membuat meningkatnya konsumsi pangan, sementara lahan yang semula menjadi lahan pertanian atau lahan sawah dialihfungsikan menjadi lahan pemukiman atau lahan untuk penggunaan lainnya.

Setiap tahun kebutuhan akan lahan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk secara otomatis akan bertambah pula kebutuhan untuk pembangunan pemukiman, pembangunan sarana-sarana lainnya untuk kepentingan penduduk dan untuk penggunaan lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk. Ketersediaan lahan yang relatif tetap sementara kebutuhan lahan yang terus bertambah membuat peralihan lahan dari fungsi sebelumnya pun tidak bisa dihindari seperti adanya perubahan jumlah lahan pertanian dan lahan sawah. Hal ini jika dibiarkan terus menerus maka Provinsi Jambi akan terancam kehilangan lahan pertanian ataupun lahan sawah.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Proyeksi jumlah penduduk Provinsi Jambi di Tahun 2017-2027.
2. Untuk mengetahui Proyeksi luas lahan pertanian di Provinsi Jambi di Tahun 2017-2027.
3. Untuk mengetahui proyeksi luas sawah di Provinsi Jambi di tahun 2017-2027.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *mixed methode* atau campuran kuantitatif dan kualitatif, karena data yang diperoleh nantinya berupa angka. Dari angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data dan diinterpretasikan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Jambi dan dilaksanakan bulan Agustus-Desember 2017.

Dalam penelitian ini sumber data berasal dari data sekunder yaitu dari literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jambi. dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi.

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dengan melihat kerangka pemikiran teoritis, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif.

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk mengetahui proyeksi jumlah penduduk, luas lahan pertanian dan luas sawah di Provinsi Jambi tahun 2017-2027 menggunakan analisis trend agar dapat melihat kondisi sepuluh tahun kedepan. Sedangkan untuk melihat hubungan antara jumlah penduduk dengan luas lahan pertanian dan hubungan antara jumlah penduduk dengan luas sawah di Provinsi Jambi menggunakan analisis korelasi dengan alat bantu yang digunakan adalah program SPSS 16.

D. HASIL PENELITIAN

Analisis tren merupakan suatu metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Adapun hasil analisis tren dengan menggunakan alat bantu sederhana yaitu dengan Microsoft Excel. Dalam penelitian ini akan melihat peramalan (proyeksi) jumlah penduduk, luas lahan pertanian dan luas sawah sampai dengan tahun 2027.

Data proyeksi jumlah penduduk, luas lahan pertanian dan luas sawah di Provinsi Jambi tahun 2007-2027 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Proyeksi Jumlah Penduduk, Luas Lahan Pertanian dan Luas Sawah Provinsi Jambi Tahun 2007-2027

Tahun	Jumlah Penduduk	i (%)	Lahan Pertanian	i (%)	Lahan sawah (Ha)	i (%)
2007	2742196	—	3312806	—	193748	—
2008	2788269	2	3361899	1,46	181843	-6,55
2009	2834164	2	3395488	0,99	178203	-2,04
2010	3092265	8	3166866	-7,22	166645	-6,94
2011	3169814	2	3202711	1,12	169599	1,74
2012	3242814	2	3726252	14,05	166766	-1,70
2013	3317034	2	4043701	7,85	167623	0,51
2014	3344421	1	4065644	0,54	151544	-10,61
2015	3402052	2	4008965	-1,41	137132	-10,51
2016	3458926	2	4011805	0,07	133868	-2,44
2017	3607384	4	4207123	4,64	131861	-1,52
2018	3692509	2	4312125	2,44	125890	-4,74
2019	3777634	2	4417126	2,38	119649	-5,22
2020	3862759	2	4522128	2,32	113866	-5,08
2021	3947884	2	4627130	2,27	105033	-8,41
2022	4033009	2	4732131	2,22	98352	-6,79
2023	4118134	2	4837133	2,17	91350	-7,67
2024	4203259	2	4942135	2,12	84598	-7,98
2025	4288384	2	5047137	2,08	80616	-4,94
2026	4373510	2	5152138	2,04	74517	-8,18
2027	4458635	2	5257140	2,00	66490	-12,07
rata- rata	3607384	2	4207123	2,21	130438	-5,56

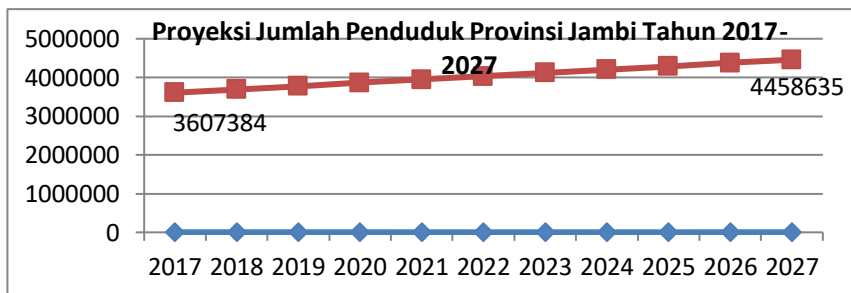
Sumber : BPS Provinsi Jambi, Dinas TPHP, data diolah

Dari Tabel 1 di atas, dapat dilihat rata-rata peningkatan jumlah penduduk Provinsi Jambi dari Tahun 2007-2027 adalah sebesar 2% pertahun. Begitu pula dengan Luas Lahan Pertanian juga mengalami peningkatan rata-rata 2,21% per tahun. Meningkatnya luas lahan pertanian diduga masih berasal dari subsektor perkebunan. Terutama perkebunan komoditi unggulan Provinsi Jambi, seperti perkebunan kelapa sawit dan karet.

Sementara itu, jika dilihat luas lahan sawah yang merupakan bagian dari Luas Lahan Pertanian cenderung mengalami penyusutan luasnya. Rata-rata penyusutan luas sawah dari tahun 2007-2027 adalah sebesar 5,56% per tahun. Artinya begitu besar luasan lahan sawah yang berkurang setiap tahunnya. Di sisi lain, peningkatan jumlah penduduk yang tinggi akan membuat meningkatnya konsumsi pangan, sementara lahan yang semula menjadi lahan sawah dialihfungsikan menjadi penggunaan lainnya.

Proyeksi jumlah penduduk Provinsi Jambi di Tahun 2017-2027

Berdasarkan analisis tren dapat diproyeksi jumlah penduduk provinsi jambi tahun 2017-2027. Pertambahan penduduk meningkat sebesar 38,5% atau rata-rata sebesar 2% pertahun. Berdasarkan analisis tren diperkirakan jumlah penduduk Provinsi Jambi dari tahun 2017 akan terus meningkat hingga tahun 2027. Hasil analisis dapat dilihat pada Gambar 1.



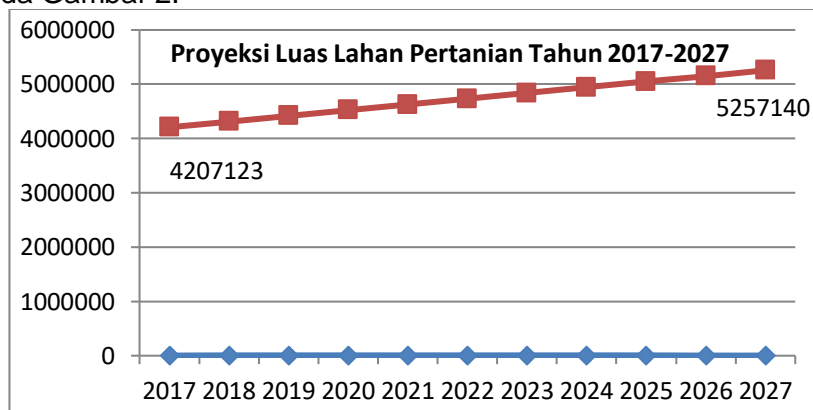
Gambar 1. Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2017-2027

Untuk proyeksi jumlah penduduk Provinsi Jambi mulai dari Tahun 2017 hingga 2027 juga terlihat perkembangannya, tahun 2017 diprediksi jumlah penduduk sebesar 3.607.384 jiwa meningkat menjadi 4.458.635 jiwa pada tahun 2027. Pada periode tersebut diprediksi terjadi peningkatan sebesar 19,1%.

Proyeksi Luas Lahan Pertanian Provinsi Jambi Tahun 2017-2027

Luas lahan pertanian di Provinsi Jambi mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun 2007 hingga 2027 atau meningkat sebesar 36,89% atau rata-rata 2,21%/tahun. Peningkatan luas lahan pertanian ini diduga masih berasal dari subsektor perkebunan. Terutama perkebunan komoditi unggulan Provinsi Jambi, seperti perkebunan kepala sawit dan karet.

Untuk proyeksi luas lahan pertanian di Provinsi Jambi mulai dari Tahun 2017 hingga 2027 juga terlihat perkembangannya, tahun 2017 diprediksi luas lahan pertanian sebesar 4.207.123 Ha yang meningkat menjadi 5.257.140 Ha pada tahun 2027. Pada periode tersebut diprediksi terjadi peningkatan sebesar 19,97%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.

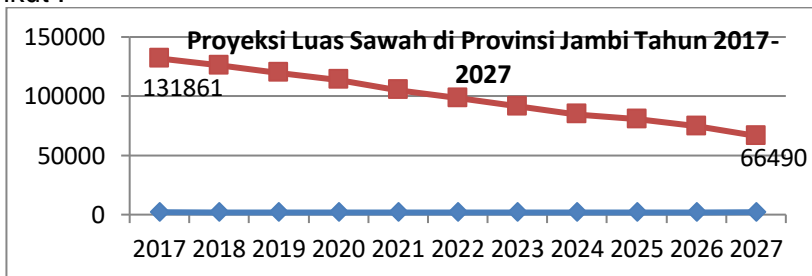


Gambar 2. Proyeksi Luas Lahan Pertanian Provinsi Jambi Tahun 2017-2027

Proyeksi Luas Sawah Provinsi Jambi Tahun 2017-2027

Hasil yang berbeda terlihat pada analisis tren luas lahan pertanian sawah (luas sawah). Luas sawah di Provinsi Jambi terus mengalami penyusutan. Antara rentang waktu penelitian (2007-2016) telah terjadi penurunan luas lahan pertanian sawah sebesar 59.880 hektar atau menurun sebesar 44,7 persen. Untuk periode 2007-2027 jika dirata-ratakan, terjadi penurunan luas sawah sebesar 5,56 % pertahun.

Untuk proyeksi luas sawah di Provinsi Jambi tahun 2017-2027 juga mengalami penyusutan sebesar 98,31% atau menurun 8,93% pertahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut :



Gambar 3. Proyeksi Luas Lahan Sawah Provinsi Jambi Tahun 2017-2027

Walaupun luas lahan pertanian sawah mengalami penyusutan, dilihat dari total produksi justru mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan produktivitas yang cukup tinggi, yaitu 0,93 ton/ha atau 27,51% untuk padi sawah dan 0,63 ton/ha atau 28,51% untuk padi ladang. Peningkatan produktivitas padi, tidak hanya mampu mengkompensasi penurunan luas panen, melainkan juga dapat mempertahankan posisi Provinsi Jambi “tetap pada posisi” surplus beras, sekalipun tingkat surplus tersebut semakin rendah.

Walaupun demikian, bila penurunan luas areal pertanaman dan panen padi tersebut terus berlangsung bahkan tidak terkendali, pada saatnya nanti posisi Provinsi Jambi

sebagai provinsi yang surplus beras akan berganti menjadi daerah yang “minus beras” (Minsyah dkk, 2010). Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Mayasari (2016) yang menyatakan bahwa ekspansi lahan perkebunan sawit dan karet yang terjadi di Provinsi Jambi menyebabkan semakin menipisnya ketersediaan lahan untuk tanaman pangan terutama padi (padi sawah dan padi ladang) sehingga mengganggu ketahanan pangan.

Korelasi Simultan Jumlah Penduduk, Luas Lahan Pertanian dan Luas Sawah

Hubungan korelasi antara Jumlah Penduduk, luas lahan pertanian dengan luas sawah di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Korelasi Simultan Jumlah Penduduk, Luas Lahan Pertanian dan Luas Sawah di Provinsi Jambi

Correlations

		Jumlah Penduduk	Luas Lahan Pertanian	Luas sawah
Jumlah Penduduk	Pearson Correlation	1	.771**	-.898**
	Sig. (2-tailed)		.009	.000
	N	10	10	10
Luas Lahan Pertanian	Pearson Correlation	.771**	1	-.721*
	Sig. (2-tailed)	.009		.019
	N	10	10	10
Luas sawah	Pearson Correlation	-.898**	-.721*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.019	
	N	10	10	10

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Jumlah Penduduk	Luas Lahan Pertanian	Luas sawah
Jumlah Penduduk	Pearson Correlation	1	.771**	-.898**
	Sig. (2-tailed)		.009	.000
	N	10	10	10
Luas Lahan Pertanian	Pearson Correlation	.771**	1	-.721*
	Sig. (2-tailed)	.009		.019
	N	10	10	10
Luas sawah	Pearson Correlation	-.898**	-.721*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.019	
	N	10	10	10

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Dari Tabel 2 menunjukkan korelasi antara jumlah penduduk dengan luas lahan pertanian dengan r sebesar 0.771. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara jumlah penduduk dengan luas lahan pertanian. Arah hubungan adalah positif yang diduga semakin besar jumlah penduduk maka luas lahan pertanian yang dibutuhkan juga semakin besar. Sementara hubungan antara jumlah penduduk dengan luas sawah ditunjukkan dengan r sebesar 0,898 yang menunjukkan ada hubungan yang kuat antara jumlah penduduk dengan luas sawah dengan arah yang negatif yang berarti semakin besar jumlah penduduk maka luas sawah akan berkurang.

Dari Tabel 2 juga menunjukkan korelasi antara luas lahan pertanian dengan luas sawah dengan r sebesar -0,721. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara luas lahan pertanian dengan luas sawah sedangkan arah hubungan adalah negatif karena nilai r negatif, berarti semakin tinggi luas

lahan pertanian tetapi luas sawah semakin rendah. Hal ini diduga semakin rendahnya luas sawah karena luas lahan bukan sawah seperti perkebunan, hutan rakyat dan sebagainya terus mengalami peningkatan.

Untuk membuktikannya dapat dilakukan pengujian dengan langkah-langkah pengujian sebagai berikut:

1. Menentukan Hipotesis

Ho : Tidak ada hubungan secara signifikan antara luas lahan pertanian dengan luas sawah

Ha : Ada hubungan secara signifikan antara luas lahan pertanian dengan luas sawah

2. Menentukan tingkat signifikansi

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. (uji dilakukan 2 sisi karena untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang signifikan, jika 1 sisi digunakan untuk mengetahui hubungan lebih kecil atau lebih besar).

3. Kriteria Pengujian

Ho diterima jika Signifikansi $> 0,05$

Ho ditolak jika Signifikansi $< 0,05$

4. Membandingkan signifikansi

Nilai signifikansi $0,019 < 0,05$, maka Ho ditolak.

5. Kesimpulan

Oleh karena nilai Signifikansi ($0,019 < 0,05$) maka Ho ditolak, artinya bahwa ada hubungan secara signifikan antara luas lahan pertanian dengan luas sawah di Provinsi Jambi. Karena koefisien korelasi nilainya negatif, berarti luas lahan pertanian berhubungan negatif dan signifikan terhadap luas sawah. Jadi dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa luas lahan pertanian berhubungan negatif terhadap luas sawah yang ada di Provinsi Jambi.

E. REKOMENDASI

1. Pemerintah harus segera mengambil kebijakan yang tepat, baik melalui penerapan peraturan daerah guna untuk mengurangi terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Karena Ketersediaan pangan adalah salah satu penentu kehidupan. Jika lahan pertanian semakin habis, ancaman ancaman krisis pangan akan terjadi, karena krisis pangan akan membuat kesengsaraan bagi penduduk itu sendiri
2. Pertumbuhan ekonomi yang diiringi oleh ekspansi lahan perkebunan (kelapa sawit dan karet) dan tanaman hortikultura perlu dikendalikan agar tidak mengganggu penggunaan lahan sawah.
3. Perlu digalakkan kembali pengendalian jumlah penduduk dengan program Keluarga Berencana karena tingginya laju pertumbuhan akan mengurangi luas lahan pertanian sawah.
4. Perlu adanya upaya dan kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga beras dan struktur perekonomian agar lahan pertanian sawah tidak semakin berkurang (habis).
5. Perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait dengan konversi lahan sawah ke penggunaan lainnya.

2

STRATEGI PENGEMBANGAN PERTANIAN KOTA BERKELANJUTAN DI PROVINSI JAMBI

Peneliti :

Ir. Mukhlis, M.Si.

A. LATAR BELAKANG

Provinsi Jambi memiliki 9 wilayah kabupaten dan 2 wilayah kota yaitu Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Dalam pembangunan perkotaan tersebut dihadapkan dengan berbagai permasalahan pembangunan diantaranya ledakan jumlah penduduk, konversi lahan pertanian yang semakin meningkat, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang semakin terabaikan dan lainnya. Meningkatnya jumlah lahan yang dikonversi ke sektor non pertanian akan mempengaruhi ketersediaan pangan di Kota Jambi. Berdasarkan data statistik perkembangan pertanian tahun 2014 s/d 2015 untuk komoditas padi belum terlihat pengaruhnya malah sebaliknya terjadi peningkatan luas areal tanam padi dari 1.381 ha menjadi 1.490 ha (7,85%) dan produksi dari 7.186,3 ton menjadi 2012 ton. Untuk Palawija tahun 2015, produksi palawija seperti jagung sebesar 158,40 ton, ubi kayu sebesar 1.064,96 ton, ubi jalar 63,76 ton, dan kacang tanah sebesar 5,8 ton. Produksi tanaman buah-buahan di Kota Jambi seperti jeruk siam 27,46 ton, alpukat 185,6 ton, pepaya 805,9 ton dan pisang 979,7 ton, mangga dan rambutan masing-masing sebesar 211,1 ton dan 506,25 ton (BPS Kota Jambi, 2016).

Fenomena pertanian yang uraian di atas, dan sebagaimana ungkapan Smith dan Mc Donald (1998), bahwa untuk menentukan definisi filosofis keberlanjutan pertanian suatu negara

merupakan hal yang relatif mudah, namun sulitnya pada penentuan definisi operasional dan metodologi untuk memungkinkan dalam pembuatan kebijakan pertanian dan perencanaan. Penelitian ini berusaha membangun definisi operasional kebijakan pertanian berkelanjutan di Kota Jambi, dengan terlebih dahulu menggunakan pendekatan metodologi yang mengukur keberlanjutan pertanian dengan indikator pembangunan berkelanjutan yakni dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sehingga akan menghasilkan strategi pertanian berkelanjutan di Kota Jambi.

Pertanian konvensional yang mengakibatkan berbagai permasalahan untuk keberlanjutan sektor pertanian menjadi alasan untuk menemukan strategi pertanian yang berpihak kepada alam dan aman bagi makhluk hidup. Kota Jambi sebagai pusat pertumbuhan (*growth pole*), mengakibatkan semakin tergusurnya lahan pertanian. Beberapa solusi telah ditawarkan untuk mengelola pertanian kota sesuai dengan fungsinya sebagai pasokan sistem pangan dan opsi ketahanan pangan rumah tangga perkotaan, salah satu kegiatan produktif untuk memanfaatkan ruang terbuka dan limbah perkotaan, salah satu sumber pendapatan dan kesempatan kerja penduduk perkotaan (FAO 2003).

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengidentifikasi kondisi pertanian kota di Provinsi Jambi.
2. Mengukur tingkat keberlanjutan pertanian kota di Provinsi Jambi.
3. Merancang skenario kebijakan pengembangan pertanian kota berkelanjutan di Provinsi Jambi.

C. METODE PENELITIAN

Data primer bersumber dari berbagai referensi antara lain Dinas Pertanian dan Ketahanan Kota Jambi, Bappeda, Data Statistik dan sumber lainnya yang dianggap relevan dengan kegiatan ini, kemudian data primer berasal dari berbagai

informan seperti pakar, praktisi dan instansi teknis melalui wawancara, untuk mengidentifikasi kondisi pertanian di Kota Jambi dengan pendekatan deskriptif.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan. Pertama, dengan pendekatan deskriptif untuk mengidentifikasi eksisting pertanian Kota Jambi. Kedua, pendekatan *FLAG* (Vreker *et al.* 20010) membangun persepsi *stakeholder* melalui wawancara pakar pertanian. Ketiga, dengan menggunakan Model *FLAG*(Nijkamp dan Vreeker 2000, Erlinda 2016), untuk mengukur keberlanjutan strategi kebijakan pertanian Kota Jambi. Opsi kebijakan baik kebijakan eksisting maupun skenario kebijakan yang diusulkan merupakan konvergensi dari data sekunder berupa laporan tahunan Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kota serta wawancara pakar dibidang pertanian. Hasil tahap ini akan menghasilkan *diagnostic* tingkat keberlanjutan pertanian kota yang diuraikan dalam bentuk *FLAG* atau bendera yang mengindikasikan tingkat keberlanjutan skenario kebijakan pertanian Kota Jambi dan pilihan kebijakan pertanian Kota Jambi yang *feasible* untuk diimplementasikan.

D. HASIL PENELITIAN

1. Kondisi Faktor Pendukung Pertanian Kota Jambi
 - a. Laju pertumbuhan penduduk selama tahun 2012 s/d 2016 sebesar 2,87%
 - b. Kelembagaan pertanian cukup mendukung (Kelompok Tani 150 buah, Pokdakan, 95 buah, dan 27 Gapoktan) dengan jumlah penyuluh pertanian/perikanan sebanyak 39 orang.
 - c. Semua Gapoktan Memiliki Modal Kelompok (Minimal Rp 100 juta/gapoktan)
 - d. Penduduk miskin selama tahun 2012 s/d 2016 turun 54.300 KK menjadi 51.610 KK atau 4,95%
 - e. RTH terealisasi sampai kondisi 2016 6,97%

- f. Tersedianya untuk berbagai macam usahatani (padi sawah, palawija, hortikultura, peternakan dan perikanan darat/sungai)
2. Pertanian Kota Jambi saat ini termasuk kategori tidak berkelanjutan berdasarkan hasil analisis fleg terhadap 17 (tujuh belas) Indikator yang mempengaruhi keberlanjutan pertanian kota karena tidak satupun green fleg yang muncul (green fleg = 0, yellow fleg = 1, red fleg = 7 dan black fleg 9).
3. Skenario kebijakan berbasis sistem pertanian alami (NFS) dan campuran pertanian secara umum dengan pertanian alami (Mix CFS & NFS) di Kota Jambi cenderung lebih berkelanjutan walaupun masih memiliki bendera merah dan hitam, jika dibandingkan kebijakan sistem pertanian secara umum (CFS), jika tetap dipertahankan akan mengakibatkan tingkat keberlanjutan semakin menurun.

E. REKOMENDASI

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi kedepan mengarahkan kegiatan pembangunan pertanian kota berkelanjutan yang ramah lingkungan, dalam pembangunan pertanian kota berkelanjutan tidak hanya dipacu peningkatan produksi akan tetapi juga dari aspek sosial dan lingkungan, implemementasi dari pertanian ramah lingkungan tersebut dilakukan dengan penerapan berbagai sistem pertanian ramah lingkungan diantaranya sistem pertanian organik, sytem pertanian terpadu sytem pertanian rendah input.
2. Skenario kebijakan pengembangan pertanian ramah lingkungan Kota Jambi kedepan lebih diarahkan kepada penggabungan sistem pertanian secara umum dengan sistem pertanian alami (Mix CFS & NFS), beberapa faktor pembatas sulitnya diterapkan opsi kebijakan Natural Farming System antara lain karena terbatas irigasi dan perluasan areal secara horizontal. Beberapa system pertanian kota yang ramah lingkungan dimplementasikan dalam bentuk sistem pertanian

organik, pertanian terpadu pertanian masukan luar rendah (LEISA).

3. Melaksanakan kegiatan yang mendukung opsi kebijakan di atas melalui DEMPLOT dan bantuan langsung dan mendampingi petani yang sudah melaksanakan kegiatan pertanian ramah lingkungan.

3

PERSEPSI APARATUR SIPIL NEGARA MENGENAI ZAKAT DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DI PROVINSI JAMBI

Peneliti :

Adi Rahman, SE., ME.

A. LATAR BELAKANG

Persoalan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Provinsi Jambi hingga saat ini belum tertuntaskan. Menurut data pada Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi pada kurun waktu lima tahun sejak 2011 hingga 2015 mengalami kecenderungan peningkatan yaitu berada pada angka 7.90%, 8.28%, 8.41%, 8.39% dan 8.86% Sementara itugini rasio untuk mengukur kesenjangan pendapatan sejak tahun 2011 hingga 2015 juga menunjukkan kecenderungan peningkatan yaitu berturut-turut berada pada angka 0.34, 0.34, 0.35, 0.33 dan 0.36 yang artinya kesenjangan ekonomi antara orang miskin dan orang kaya semakin lebar. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah baik melalui kebijakan sektoral, moneter, fiskal maupun kebijakan lainnya untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan dapat dikatakan belum berhasil.

Menurut ajaran Islam, Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam menuntaskan kemiskinan. Selain sebagai rukun Islam yang ketiga dan bagian dari ibadah mahdah kepada Allah SWT, zakat juga merupakan ibadah *maliyah iztimaiyah* yang memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan ummat. Secara empirik hal ini pernah dibuktikan dalam sejarah pada masa khalifah Umar bin Abdul Azis. Pada waktu itu zakat dikelola oleh para petugas (amil zakat) yang amanah dan

profesional, dibawah kendali pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab, ternyata mampu meningkatkan kesejahteraan umat dan meminimalisir hal-hal yang berkaitan dengan kemiskinan dalam waktu yang relatif tidak lama.

Jambi sebagai provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seharusnya dapat memanfaatkan potensi dana zakat untuk pengentasan kemiskinan. Namun masalahnya ialah masih rendahnya pemahaman sebagian besar umat Islam tentang zakat dan masih kurangnya kesadaran para profesional, pengusaha dan kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat harta (*maal*), zakat profesi, dan zakat penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan agama Islam. Jika ditunaikan dengan benar maka zakat merupakan potensi sumber dana yang cukup besar bagi umat Islam.

Menurut Pengurus Baznas ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi H. Aminullah Amit seperti yang dikutip dari metrojambi.com, besarnya potensi zakat yang bersumber dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditaksir sebanyak 4 (empat) miliar rupiah pertahun. Sementara yang terkumpul oleh BAZNAS Provinsi Jambi pada tahun 2016 yang lalu sebesar 2.5 miliar rupiah atau sekitar 55 persen. Artinya masih sebanyak 45% potensi zakat dari PNS yang belum terserap. Potensi tersebut belum lagi dari masyarakat umum dan pengusaha muslim baik yang ada di Kota maupun Kabupaten dalam Provinsi Jambi. Potensi dana tersebut jika terkumpul akan sangat bermanfaat bagi program penuntasan kemiskinan di Provinsi Jambi.

Dana yang terkumpul oleh Baznas menurut ketua BAZNAS Provinsi Jambi selanjutnya disalurkan kepada mustahik yang masuk dalam kategori delapan asnaf atau kategori yang berhak menerima zakat yaitu: fakir, miskin, amil, yatim piatu, fisabilillah, mualaf, guru ngaji antara magrib dan Isya, penjaga masjid dan penyelenggara jenazah. Selain menyalurkan dana zakat kepada mustahik, Baznas juga mempunyai program penuntasan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai kepada pelaku

usaha kecil yang masuk kategori delapan asnaf dan program pembinaan dan pemberian beasiswa bagi Suku Anak Dalam (SAD). Para SAD tersebut disekolahkan ke Madrasah atau pesantren sehingga diharapkan setelah mereka tamat dapat membina keluarga atau suku mereka kembali.

Sayangnya peran strategis zakat, infak, sodakoh belum sepenuhnya disadari oleh Pemerintah dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat melalui fakta di lapangan bahwa Provinsi Jambi yang mayoritas penduduknya beragama Islam, belum mampu mengelola zakat sebagai instrumen penuntasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Kesadaran masyarakat termasuk PNS untuk membayar zakat, infak dan sodakoh masih rendah meskipun sudah ada Instruksi, himbauan dan surat edaran dari Gubernur Jambi kepada PNS untuk membayar zakat dan sedekah.

Gambaran mengenai penerimaan dana Zakat pada BAZNAS Provinsi Jambi dari para PNS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Rekap Penerimaan BAZNAS Provinsi Jambi
Bulan Januari-Maret 2017
dari Dinas/Instansi/OPD

NO	DINAS/INSTANSI	JUMLAH		TOTAL
		ZAKAT	INFAQ	
1	2	3	4	5
	SETDA TK I			
1	GUBERNUR JAMBI	0.00	0.00	0.00
2	WAKIL GUBERNUR JAMBI	0.00	0.00	0.00
3	SEKRETARIS DAERAH	0.00	0.00	0.00
4	ASISTEN I	0.00	0.00	0.00
5	ASISTEN II	0.00	0.00	0.00
6	ASISTEN III	0.00	0.00	0.00
7	BIRO PEMERINTAHAN	0.00	0.00	0.00
8	BIRO ADM.PEMB. & KERJASAMA	0.00	0.00	0.00

9	BIRO PEREKONOMIAN & SDA	135,000.00	420,000.00	555,000.00
10	BIRO HUKUM	670,000.00	500,000.00	1,170,000.00
11	BIRO PENGELOLAAN ASET & KEKAYAAN DAERAH	0.00	0.00	0.00
12	BIRO KESRA & KEMASYARAKATAN	13,351,000.00	0.00	13,351,000.00
13	BIRO UMUM	0.00	1,420,000.00	1,420,000.00
14	BIRO HUMAS & PROTOKOL	0.00	725,000.00	725,000.00
15	BIRO ORGANISASI	150,000.00	1,150,000.00	1,300,000.00
	BADAN-BADAN			
16	INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI	6,763,230.00	45,000.00	6,808,230.00
17	BAPPEDA PROVINSI JAMBI	0.00	0.00	0.00
18	BALITBANGDA	1,764,000.00	486,000.00	2,250,000.00
19	BADAN KESBANG POL. PROV. JAMBI	0.00	0.00	0.00
20	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	5,238,000.00	462,000.00	5,700,000.00
22	BPMPP / DINAS P3AP2	15,128,500.00	100,000.00	15,228,500.00
23	BADAN DIKLAT / BPSDM	12,898,296.00	839,268.00	13,737,564.00
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0.00	0.00	0.00
25	BKPM DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	0.00	0.00	0.00
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1,624,316.00	180,000.00	1,804,316.00
28	BADAN KOORDINASI DAN PENYULUHAN	0.00	0.00	0.00

29	BADAN PUSAT STATISTIK	0.00	0.00	0.00
30	BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN & PEMB.	0.00	0.00	0.00
31	BADAN PERTANAHAN NEGARA	0.00	0.00	0.00
32	BKKBN	0.00	0.00	
33	BPKAD	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00

	DINAS-DINAS			
34	DINAS PENDAPATAN DAERAH	0.00	0.00	0.00
35	DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN	1,561,800.00	130,000.00	1,691,800.00
36	DINAS KELAUTAN & PERIKANAN	35,637,420.00	0.00	35,637,420.00
37	DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN	16,790,200.00	165,000.00	16,955,200.00
38	DINAS PERKEBUNAN	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
39	DINAS PENDIDIKAN	91,921,658.00	0.00	91,921,658.00
40	DINAS KESEHATAN	18,529,739.00	1,230,500.00	19,760,239.00
41	DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL	4,805,700.00	1,488,300.00	6,294,000.00
42	DINAS PERHUBUNGAN	41,477,600.00	0.00	41,477,600.00
43	DINAS KOPERASI & UMKM	8,602,285.00	0.00	8,602,285.00
44	DINAS SOSNAKERTRANS	0.00	0.00	0.00
45	DINAS KEHUTANAN	19,847,000.00	0.00	19,847,000.00
46	DINAS PEMUDA & OLAH RAGA	0.00	0.00	0.00
47	DINAS PEKERJAAN UMUM	0.00	5,300,000.00	5,300,000.00

48	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN	26,567,743.00	345,000.00	26,912,743.00
49	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	11,738,000.00	1,705,200.00	13,443,200.00
50	DINAS KETAHANAN PANGAN			
51	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP DAERAH			
52	SEKRETARIAT DPRD	0.00	0.00	0.00
53	KANTOR SATPOL PP	0.00	0.00	0.00
54	KANTOR PDE / DISKOMINFO/KPID	10,108,698.00	190,000.00	10,298,698.00
55	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA	38,904,918.00	0.00	38,904,918.00
TOTAL		395,215,103.00	19,981,268.00	415,196,371.00

Dari data di atas diketahui bahwa masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum optimal dalam mengumpulkan dana zakat, ini artinya masih banyak PNS yang belum membayar zakat melalui BAZNAS.

Kepemilikan harta benda oleh orang kaya atau orang yang mampu (*aghniya*) pada hakikatnya merupakan titipan (*amanah*) dari Allah SWT, sedangkan kepemilikan mutlak hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu Islam memandang bahwa harta kekayaan memiliki fungsi sosial, yaitu tidak saja untuk kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan masyarakat dan agama.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103, yang artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa, sangat diperlukan peran Pemerintah melalui Baznas dan masyarakat melalui Lembaga Amil Zakat untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya untuk kemudian dikelola dan didistribusikan kepada yang berhak terutama untuk orang miskin. Pada kenyataan di lapangan tugas BAZNAS dalam mengambil zakat dari orang yang mampu kurang berjalan mulus karena ada sebagian masyarakat yang belum memahami kewajiban tentang zakat dan adapula yang sudah memahami namun enggan untuk melaksanakan kewajiban berzakat.

Pada sisi lain, ada sebagian PNS yang tidak mau membayar zakat melalui Baznas. Adapun beberapa alasan mereka enggan menyalurkan zakat antara lain: Mereka tidak tahu kewajiban membayar zakat bagi yang mampu, ada juga yang beralasan lebih senang untuk menyerahkan langsung kepada orang miskin atau melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh ormas Islam seperti Lembaga amil zakat infak dan shadaqoh Nahdatul Ulama (Lazis NU), Laz Muhammadiyah, Optimalisasi Zakat Infak Sadaqoh (OPSEZI), LAZ Insan Madani, Dompot Dhuafa dan sebagainya. Ada juga yang beralasan karena Pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS kurang profesional dan transparan. Tetapi ada pula yang beralasan tidak mau membayar zakat karena merasa belum mampu, hutang masih banyak dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas maka, peneliti memandang perlu untuk mengetahui permasalahan tentang zakat khususnya persepsi PNS terhadap Zakat dan Baznas.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui dan Menganalisis persepsi Pegawai Negeri Sipil tentang Zakat
2. Mengetahui dan Menganalisis persepsi Pegawai Negeri Sipil tentang BAZNAS
3. Mengetahui Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Provinsi Jambi

4. Mengetahui dan Menganalisis kendala yang dihadapi BAZNAS Provinsi Jambi dalam pengelolaan zakat

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan responden dan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan BAZNAS, BPS dan BKD. Penelitian menggunakan *Grounded Research*, yaitu peneletian yang menitiberatkan pada pendekatan kualitatif atas dasar data yang didapatkan dari survey dengan pendekatan kuantitatif.

D. HASIL PENELITIAN

1. Secara umum persepsi PNS mengenai zakat dan BAZNAS Provinsi Jambi belum menunjukan hasil yang baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya (lebih dari 50%) PNS yang belum mengetahui beberapa jenis zakat terutama zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perniagaan, zakat investasi, zakat harta galian jumlah responden yang tidak mengetahui jenis zakat tersebut jumlahnya lebih dari 50%, sementara untuk zakat penghasilan ada sebanyak 14.29% responden yang tidak mengetahuinya. Mengenai pengetahuan tentang Kewajiban Zakat Profesi bagi PNS yang penghasilannya setahun setara dengan 83 gram emas atau Rp. 3,7 juta, sebanyak 34.92% tidak mengetahui, sementara mengenai pengetahuan PNS tentang kewajiban membayar zakat melalui BAZNAS sebanyak 52.38% tidak mengetahui.
2. Persepsi PNS mengenai BAZNAS secara umum juga kurang menggembirakan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya (lebih dari 50%) responden PNS yang tidak mengetahui hal berikut yaitu: Lokasi Kantor BAZNAS, Program-program BAZNAS, pengurus BAZNAS, tidak tahu ketepatan sasaran penyaluran zakat. Sementara itu untuk akses informasi laporan

pengumpulan dan penyaluran dana zakat sebanyak 55.56% responden menyatakan kurang dan 44.44% menyatakan sangat kurang. Dan mengenai profesionalitas BAZNAS sebanyak 63.49% responden menyatakan tidak tahu, 28.57% menyatakan belum profesional dan 7.94% menyatakan sudah profesional.

3. Pengelolaan Dana BAZNAS secara umum sudah baik yaitu terkumpul sebesar Rp.2.633.212.250,00 atau meningkat sebesar 5.35%, dari tahun 2015, namun untuk potensi secara keseluruhan masih belum optimal dikarenakan potensi dana khusus dari OPD saja diperkirakan potensinya mencapai 4 Miliar, belum lagi dari lembaga atau instansi lain serta masyarakat umum.
4. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BAZNAS dalam pengelolaan zakat antara lain; 1. Belum memiliki Perda tentang pengelolaan zakat, 2. Belum semua OPD menyalurkan dana zakat melalui BAZNAS. Bantuan dana operasional dari Pemerintah Daerah masih kurang, keterbatasan SDM, dan belum adanya sinergi pendistribusian dana zakat dari BAZNAS Provinsi dengan BAZNAS Kota/Kabupaten..

E. REKOMENDASI

1. BAZNAS perlu meningkatkan Sosialisasi tentang zakat, pengelolaan dana zakat, transparansi dana dan program-program zakat kepada PNS sehingga persepsi PNS tentang zakat dan BAZNAS akan menjadi lebih baik.
2. Sebagai bentuk kompensasi dari perlunya peningkatan sosialisasi oleh BAZNAS kepada PNS, maka Pemerintah Provinsi Jambi perlu lebih memperhatikan dan meningkatkan peran BAZNAS melalui peningkatan anggaran sosialisasi dan operasional BAZNAS.

3. Pemerintah Provinsi Jambi bersama DPRD Provinsi Jambi perlu menyusun Peraturan Daerah mengenai pengelolaan zakat.
4. Pemerintah Provinsi Jambi melalui setiap kepala OPD perlu sering menghimbau dan mengajak PNS untuk menunaikan kewajiban zakat penghasilan kepada PNS.
5. Perlunya peningkatan Kuantitas dan kualitas pengurus BAZNAS Provinsi Jambi
6. Perlunya Peningkatan Fasilitas Kerja di Kantor BAZNAS serta peningkatan website guna memperluas jangkauan akses informasi pengelolaan BAZNAS.
7. BAZNAS perlu mensosialisasikan program-program dan pengelolaan BAZNAS ke media cetak dan Televisi lokal. BAZNAS perlu mengirimkan laporan bulanan atau tahunan kepada OPD sebagai salah satu sarana sosialisasi dan transparansi pengelolaan zakat, sehingga dapat meningkatkan persepsi baik dalam pengelolaan zakat dan untuk meningkatkan kesadaran PNS untuk menunaikan zakat.

4

BUDAYA KERJA DAN KINERJA PNS PROVINSI JAMBI DITINJAU DARI BIG FIVE PERSONALITY DAN BUDAYA ORGANISASI

Peneliti :

Dr. Susi Desmaryani, SE., MM.

A. LATAR BELAKANG

Dinamika tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik, menuntut sebuah perubahan paradigma tentang pelayanan publik yang diberikan oleh pegawai negeri sipil (PNS) sebagai aparatur negara yang mana tugasnya harus kepada *service oriented*. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, tepat dan akurat. Untuk itu pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana terkait dengan tuntutan masyarakat tentang sebuah pelayanan yang sesuai dengan harapan.

Saat ini kinerja aparatur negara dalam hal ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih tengah menjadi perbincangan. Pelayanan yang diberikan PNS masih sering di komplain oleh masyarakat, diperkuat oleh hasil penelitian Suryadi (2010) yang menjelaskan keluhan masyarakat tentang pelayanan publik terkait dengan prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan, kurang informative, kurang akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu, dan biaya) serta masih banyak dijumpai praktek pungutan liar serta tindakan-tindakan yang berindikasi penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Penelitian Dahmiri (2014) juga mendukung dan menjelaskan bahwa pelayanan publik di Kabupaten Sarolangun masih dalam

kategori kurang baik terkait disiplin, tanggung jawab, kecepatan pelayanan, kesopanan, keramahan petugas dan kepastian jadwal pelayanan.

Terkait dengan temuan-temuan dari hasil penelitian tentang kinerja PNS dalam menjalankan tugas sebagai abdi masyarakat memberikan pelayanan prima harus menjadi perhatian pemerintah terutama meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai aktor penyelenggara yang mewujudkan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu Sumber Daya Manusia pada organisasi harus dibekali dengan kemampuan dan ketrampilan yang dapat mendukung tercipta pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui gambaran budaya organisasi, *Big Five Personality*, budaya kerja dan Kinerja PNS di Provinsi Jambi
2. Mengetahui efek moderasi budaya organisasi pada interaksi budaya kerja dan kinerja PNS di Pemprov Jambi
3. Mengetahui efek moderasi *Big Five Personality* pada interaksi antara budaya kerja dan kinerja PNS di Pemprov Jambi
4. Mengetahui Model budaya kerja PNS berdasarkan *Big Five Personality* untuk meningkatkan kinerja PNS

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis Deskriptif dan metode analisis Perivikatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan sejauh mana kondisi budaya kerja, gambaran kepribadian pegawai dan kinerja pegawai. Analisis verifikatif mengungkapkan hubungan antara variable yang diteliti dengan menggunakan variable moderasi untuk memperkuat dan memperlemah hubungan yang terjadi antar variable yang diteliti. Analisis verifikatif ini menggunakan *Structural Aqutation Model* (SEM). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh PNS yang

ada di Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu 27 SKPD dan Biro. Penarikan sampel dilakukan secara bertahap atau *stratified sampling*.

D. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Budaya Organisasi, Budaya Kerja, *Big Five Personality* dan Kinerja, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. a. Pada Umumnya Budaya Organisasi di lingkungan Pemprov Jambi sudah kuat mencerminkan kebiasaan-kebiasaan yang baik PNS dalam bekerja, namun dalam budaya organisasi tersebut seperti sistem promosi masih ada yang belum berdasarkan prestasi kerja, PNS belum maksimal melaksanakan Pekerjaan yang sifatnya menantang dan mengandung risiko , masih memiliki sifat tidak berani menanggung risiko
- b. Pada Umumnya Budaya kerja di lingkungan Pemprov Jambi sudah baik mencerminkan proses kerja yang baik terhadap pekerjaan yang hendak dilakukan.
- c. Pada umumnya *Bif Five Personality* yang menggambarkan kepribadian PNS Pemprov berada dalam kategori baik, ada beberapa indikator kepribadian yang perlu diperhatikan diantaranya memiliki kepribadian dapat bekerja dengan baik dalam setiap kondisi (dimensi openness), Loyalitas terhadap pekerjaan (dimensi conscientiousness), pribadi yang tegas menentukan pilihan yang sifat mengandung risiko (dimensi extraversion), konsisten terhadap semua jenis pekerjaan (dimensi agreeableness), memiliki pribadi yang mampu bekerja dengan baik dibawah tekanan.

- d. Secara rata-rata pada umumnya capaian kinerja PNS Pemprov Jambi sudah berada dalam kategori baik yang diukur dari pengetahuan yang dimiliki dan hasil capaian yang diperoleh.
2. Budaya Organisasi sebagai Variabel moderasi tidak memberi efek pengaruh yang kuat dalam meningkatkan kinerja ketika budaya organisasi berinteraksi dengan budaya kerja
3. *Big Five Personality* memberi efek pengaruh yang kuat sebagai variabel moderasi dalam meningkatkan kinerja PNS Pemprov Jambi ketika *Big Five Personality* berinteraksi dengan budaya kerja.

E. REKOMENDASI

1. Memperkuat budaya organisasi PNS di lingkungan Pemprov Jambi terutama pada dimensi *Risk Toleransi* dan *Reward system* dengan cara :
 - a. Kepala SKPD/Biro/Badan memahami kondisi dilingkungan instansi masing-masing dan menanamkan kebiasaan kepada PNS untuk memiliki sifat berani mengambil risiko, misalnya memberi tugas-tugas yang sifatnya perlu pertimbangan yang tepat dalam mengambil keputusan.
 - b. Kepala SKPD/Biro/Badan membangun kebiasaan saling koordinasi antar bidang dalam menyelesaikan pekerjaan.
 - c. Kepala SKPD/Biro/Badan melakukan promosi PNS melalui sistem prestasi
 - d. Kepala SKPD/Biro/ Badan perlu merubah budaya organisasi jika dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan saat ini
2. Memperkuat budaya organisasi melalui penguatan kemampuan pemimpin untuk membangun kepribadian PNS, sehingga dapat merefleksikan kebiasaan-kebiasaan dalam

bekerja melalui sikap dan perilaku kerja dengan meningkatkan kepribadian PNS berupa memiliki loyalitas dalam bekerja, Konsistensi, komitmen, Tegas dan kreatif.

5

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA SERAPAN TENAGA KERJA LULUSAN SMK DI PROVINSI JAMBI DENGAN METODE DELPHI

Peneliti :

Septu Haswindy, S.S., M.Si.

A. LATAR BELAKANG

Dengan diterapkannya perdagangan bebas menuntut tersedianya tenaga kerja yang terampil serta memiliki kompetensi yang tinggi untuk bersaing di pasar tenaga kerja, baik regional, nasional dan internasional. Konsekuensinya, lembaga pendidikan formal seperti Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dituntut untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja, memiliki sikap, watak dan perilaku wirausaha serta ketrampilan (*life skill*) untuk bekerja disegala bidang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

Pencapaian kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja dan industri di berbagai bidang keahlian, diharapkan dapat terserap oleh dunia industri sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan lembaga yang berpotensi untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang dapat dengan mudah terserap oleh dunia kerja, karena materi baik teori dan praktek yang bersifat aplikatif telah diberikan sejak dini, dengan harapan lulusan SMK memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Di Provinsi Jambi kurang cakupnya para pencari kerja lulusan SLTA ke atas juga menjadi masalah walaupun pertumbuhan lapangan pekerjaan cukup baik karena banyaknya

perusahaan yang beroperasi di daerah ini. Menurut data BPS pada tahun 2016 terdapat 5 bidang usaha yang menyediakan lowongan kerja terbesar di Provinsi Jambi yaitu (1) jasa kemasyarakatan, (2) keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan dan tanah jasa perusahaan, (3) industri pengolahan, (4) pertambangan dan penggalian, dan (5) pertanian, perikanan, perburuan dan kehutanan.

Hal ini seharusnya menjadi sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pencari kerja namun pada kenyataannya angka pengangguran terbuka untuk pencari kerja dengan latar belakang pendidikan SMK masih tinggi yakni 7,35% pada bulan Februari 2017.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Menentukan faktor penyebab rendahnya serapan tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Jambi.
2. Menentukan strategi yang dapat diambil pemerintah guna meningkatkan daya serap tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Jambi.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden. Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (*In-depth Interview*), untuk mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya serapan tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Jambi.

Metode analisis yang digunakan untuk menentukan faktor-faktor penyebab rendahnya serapan tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Jambi adalah analisis Delphi. Analisis Delphi dilakukan berdasarkan opini/pendapat kelompok ahli (*expert group*) dengan menggunakan kuesioner berisi variabel yang diperoleh dari hasil

kajian pustaka. *Expert* dalam penelitian ini adalah responden dari hasil analisis *stakeholder* berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya terhadap penelitian.

Analisis Delphi dilakukan melalui wawancara terhadap responden yang telah dipilih dalam analisis *stakeholder*. Wawancara pada analisis Delphi ini dilakukan dengan bantuan kuisioner sebagai pedoman pertanyaan terkait faktor-faktor penyebab rendahnya serapan tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Jambi. Tahapan pelaksanaan analisa Delphi dilakukan melalui 3 tahapan yang meliputi; tahap eksplorasi, iterasi 1, dan iterasi 2 hingga menemukan konsesus responden.

Dalam menentukan faktor-faktor penyebab rendahnya serapan tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Jambi digunakan teknik analisis Delphi. Analisis Delphi ini dipergunakan untuk menentukan adanya konsensus atau kesepakatan diantara beberapa responden. Responden dapat menyatakan setuju dan tidak setujunya terhadap faktor-faktor penyebab rendahnya serapan tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Jambi. Dalam penelitian ini analisis Delphi dilakukan dengan dua kali tahap, yang artinya terjadi satu kali iterasi dalam prosesnya.

D. HASIL PENELITIAN

Berikut penjelasan faktor-faktor yang mengalami konsensus pada analisis Delphi tahap I.

a. Jenis SMK belum relevan dengan lapangan kerja yang tersedia di Provinsi Jambi

Berdasarkan keterangan para responden jenis SMK yang ada di berbagai Kabupaten/Kota pada Provinsi Jambi masih belum relevan dengan lapangan kerja yang tersedia. Seperti yang terdapat pada Kabupaten Kerinci, dimana sektor pertanian dan perkebunan merupakan sektor unggulan. Berbagai macam hasil pertanian dan perkebunan seperti padi, kentang, cabai, teh, kayu manis, kopi merupakan produk unggulan Kabupaten Kerinci. Namun, hanya sedikit

SMK yang berbasis potensi seperti SMKN 1 dan SMKN SPP3 Kerinci yang membuka jurusan khusus untuk perkebunan dan pertanian. Kabupaten Kerinci memiliki potensi wisata yang menjanjikan namun tidak didukung oleh ketersediaan SMK dengan jurusan pariwisata sebagai penyedia tenaga yang kerja handal di bidang pariwisata.

Lebih lanjut, para responden juga menyatakan bahwa Kabupaten seperti Muaro Jambi, Batanghari, Tebo, Sarolangun yang merupakan kabupaten dimana banyak terdapat perkebunan kelapa sawit dan karet namun sangat jarang dijumpai SMK yang memfokuskan pada bidang perkebunan. Selain sektor perkebunan seperti kelapa sawit dan karet, sektor pertambangan merupakan sektor yang menjanjikan seperti dengan banyaknya tambang batubara di Kabupaten Tebo, Sarolangun, Bungo tidak didukung oleh jurusan SMK pertambangan.

b. **Masih minimnya kerjasama antara perusahaan-perusahaan sebagai tempat magang para siswa SMK**

Kurangnya kerjasama perusahaan, lembaga pemerintah, dunia usaha dan dunia industri dalam pelaksanaan pendidikan sistem ganda yaitu terjalinnya sinergi antara SMK dan industri. Hal ini juga senada dengan pernyataan responden yang menyebutkan bahwa siswa SMK di Provinsi Jambi sangat kesulitan dalam mencari tempat untuk praktek terutama pada perusahaan-perusahaan besar.

c. **Masih kurangnya bursa kerja khusus di SMK pada setiap Kabupaten di Provinsi Jambi**

Menurut para dewan pakar, minimnya informasi mengenai bursa kerja khusus di setiap SMK pada Provinsi Jambi berpengaruh besar terhadap serapan tenaga kerja lulusan SMK. Sedangkan informasi bursa kerja pada Balai Latihan Kerja merupakan informasi umum tentang lowongan kerja yang tersedia.

d. Masih minimnya ketersediaan fasilitas praktik pada SMK di Provinsi Jambi

Menurut keterangan responden, pada kenyataannya faktanya sering dijumpai pada banyak SMK yang hanya memiliki peralatan praktik yang sangat minim. Hal ini masih banyak di jumpai pada SMK di Kabupaten pada Provinsi Jambi. Hal ini akan sangat berpengaruh pada siswa disaat mereka terjun dalam dunia kerja nyata. Kurangnya fasilitas dan fasilitas praktik yang dibutuhkan siswa akan membuat motivasi siswa dalam belajar semakin menurun.

e. Sebagian besar guru di SMK hanya merupakan tenaga pengajar bukan praktisi

Berdasarkan pendapat responden, sebagian besar tenaga pengajar pada SMK di Provinsi Jambi merupakan tenaga pengajar murni dan bukanlah praktisi pada bidang yang diajarnya. Karena, untuk menghasilkan siswa SMK yang terampil tentunya tidak lepas dari guru yang berkualitas ditinjau dari aspek penguasaan materi bidang studi, keterampilan mengajar, dan juga kewirausahaan. Guru yang merupakan praktisi diharapkan dapat lebih mengajarkan siswa tentang situasi nyata pada dunia kerja dan selain itu, guru yang juga merupakan praktisi akan lebih banyak mempunyai koneksi pada perusahaan-perusahaan selaku pengguna tenaga kerja.

f. Kurikulum SMK belum berbasis Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Berdasarkan pendapat responden, kurikulum SMK yang digunakan tidak selaras dengan kompetensi sesuai pengguna lulusan (link and match) sehingga belum mampu memenuhi tuntutan dunia kerja, dunia industri dan dunia usaha.

E. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penentuan faktor-faktor penyebab rendahnya serapan tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Jambi dengan metode delphi didapatkan 7 (tujuh) faktor penyebab. Berdasarkan faktor-faktor tersebut dapat dirumuskan strategi yang dapat diambil pemerintah guna meningkatkan serapan tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Jambi. Adapun rumusan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor pertama, jenis SMK belum relevan dengan lapangan kerja yang tersedia di Provinsi Jambi, untuk mengatasi masalah ini pemerintah provinsi dapat melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan pemilihan lokasi SMK akan disesuaikan dengan peta kebutuhan tenaga kerja yang disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta mengembangkan SMK unggulan sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing. Selain itu, Dinas Pendidikan dapat menginstruksikan pihak sekolah agar mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bidang-bidang keahlian yang sesuai dengan potensi daerah dan merestrukturisasi bidang keahlian yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar atau daerah dengan bidang keahlian yang baru dan dibutuhkan daerah bekerjasama dengan masyarakat, dunia usaha/dunia industri dan pemerintah daerah.
- 2) Faktor Kedua, masih minimnya kerjasama antara perusahaan-perusahaan sebagai tempat magang para siswa SMK, Sekolah membangun kerja sama yang baik dengan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha/dunia industri dan asosiasi-asosiasi perusahaan. Dalam hal ini sekolah perlu punya cara untuk menarik perusahaan atau industri terkait untuk diajak kerja sama. Selain itu juga, Pemerintah Provinsi dapat membuat peraturan yang mewajibkan bagi perusahaan untuk menerima siswa prakerin dari sekolah.

- 3) Faktor Ketiga, sebagian besar guru di SMK hanya merupakan tenaga pengajar bukan praktisi, Pemerintah dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan oleh sekolah melalui seminar, workshop, diklat dan magang guru di dunia industri. Pemerintah dapat mendatangkan guru tamu dari dunia usaha/dunia industri melaksanakan Program alih fungsi guru dengan cara merekrut guru bidang produktif dan adaptif untuk dilatih menjadi guru bidang kejuruan.
- 4) Faktor Keempat, dukungan Dari Pemerintah Daerah, Pemerintah meningkatkan bantuan dalam memberikan biaya investasi berupa bantuan peralatan, komputer dan laboratorium, bantuan fisik berupa bantuan ruang kelas baru, rehab dan ruang praktek siswa.

6

PENGAWASAN DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI PROVINSI JAMBI

Peneliti :

Joni Martin, SH., MH.

A. LATAR BELAKANG

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Pengadaan air bersih untuk keperluan air minum, harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan secara fisika, mikrobiologi, kimia, dan radioaktif. Pada kenyataannya kualitas air minum yang diproduksi oleh depot air minum sering bermasalah karena belum memenuhi standar air minum, hal ini didukung oleh beberapa penelitian. Seperti hasil analisis terhadap sampel air minum isi ulang di 10 kota besar di Indonesia (Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Cikampek, Medan, Denpasar, Yogyakarta, Semarang dan Surabaya) menyatakan 34% sampel tidak memenuhi sedikitnya satu parameter kualitas air minum berdasarkan Kepmenkes RI No. 907/Menkes/SK/VII/2002, 16% sampel tercemar bakteri coliform.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian, menunjukkan bahwa, pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait, masih belum optimal dan menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, terdapat peningkatan rumah tangga yang menggunakan air isi ulang sebagai sumber air minum dari 13,8% pada tahun 2010 meningkat menjadi 21% pada tahun 2013. Berdasarkan jenis sumber air minum yang digunakan, presentase terbesar berasal dari sumur galian.

Hasil observasi awal Peneliti ke beberapa Depot Air Minum isi ulang pada bulan April tahun 2017, ditemukan ada depot air minum yang belum memiliki izin, bahkan ada izin atas nama orang lain, dengan alasan bahwa peralatan Depot hasil dibeli dari pemilik izin sebelumnya. Disisi lain sumber air yang dikelola berasal dari sumur galian milik pribadi. Begitu juga ketika ditanyakan tentang pengawasan oleh dinas kesehatan, pemilik depot mengatakan pernah 1 kali pada tahun 2016, dan disuruh membuat izin tapi si pemilik tidak mengikuti dan tidak ada sanksi yang diterapkan.

Padahal dalam Keputusan Menkes No:907/Menkes/SK/VII/2002, jelas disebutkan bahwa perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum yang diselenggarakan secara terus menerus dan berkesinambungan agar air yang digunakan oleh penduduk dari penyediaan air minum yang ada, terjamin kualitasnya, sesuai dengan persyaratan kualitas air minum yang layak. Dan berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Permenkes Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan bahwa Tim Pemeriksa Depot Air Minum adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan yang bertugas untuk melakukan penilaian pemenuhan persyaratan teknis usaha DAM.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Menggambarkan kondisi eksisting pengawasan terhadap depot air minum isi ulang di Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang di Provinsi Jambi.

C. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe pendekatan penelitian Mitc Metode (Sugiono,2014). dengan maksud untuk melihat dan meneliti secara langsung bagaimana penerapan

peraturan yang berlaku dengan fakta dan kenyataan dari masyarakat. Sampel penelitian adalah Pemerintah daerah (Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian perdagangan) serta Masyarakat Pelaku usaha Depot Air Minum dengan jumlah sampel Responden 10 Instansi yang berada di 5 Daerah (Kerinci, Bungo, Tanjab Barat, Kota Jambi) dan 100 Depot Air yang ada di Kota Jambi yang diambil secara acak. Pengumpulan data dilakukan dengan cara Wawancara dan penyebaran Kuisisioner. Hasil pengumpulan data kemudian dianalisis secara kualitatif dan untuk kuisisioner digunakan program SPSS sebagai alat analisis sederhana.

D. HASIL PENELITIAN

Pengawasan terhadap Depot air minum isi ulang di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi secara umum masih kurang optimal, hal ini ditunjukkan dengan jumlah kunjungan dan masih banyaknya depot yang tidak melengkapi administrasi usaha seperti: 1. SIUP dan SITU (hanya 20% pengusaha yang memiliki); 2. Kepemilikan Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM (dari 59,8% pengusaha yang menggunakan PDAM sebagai sumber air untuk usaha produksinya hanya 2% yang memiliki surat jaminan pasok air baku dari PDAM); 3. Hanya 77% pengusaha melakukan uji laboratorium, dan 4. Hanya 77% pengusaha memiliki sertifikat laik sehat dan dari 77% itu, 23% sudah tidak berlaku lagi.

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan terhadap Depot air minum isi ulang rata-rata sama di tiap wilayah Kabupaten/kota, yakni tidak adanya regulasi terutama untuk pemberian sanksi seperti pemberhentian usaha, minimnya anggaran guna melakukan pembinaan, bahkan beberapa wilayah tidak tersedia anggaran untuk hal tersebut, minimnya SDM untuk melakukan pengawasan, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti aturan yang berlaku. .

E. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil temuan melalui observasi dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Membentuk Regulasi tingkat Provinsi dan/atau tingkat Kabupaten dan kota tentang DAMIU, yang memuat persyaratan, pengawasan, pembinaan dan sanksi terhadap pelanggaran.
2. Membentuk Asosiasi Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang terutama ditingkat Kabupaten/Kota.
3. Membentuk Sub Bidang/Tim Khusus Pengawas DAMIU baik tingkat Provinsi, Kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan beserta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
4. Melakukan pembinaan/pengawasan terhadap DAMIU minimal 6 Bulan sekali sesuai dengan Permenkes nomor 43 Tahun 2014.
5. Membuat data base digital terpadu khusus DAMIU guna memudahkan pengawasan.

7

PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING PENGRAJIN BATIK DI PROVINSI JAMBI

Peneliti :

M. Rialdi Syaputra, SE., ME.

A. LATAR BELAKANG

Di Indonesia, sebagian besar UKM menjalankan usahanya dengan cara-cara tradisional, termasuk dalam produksi dan pemasaran. Namun demikian, masalah yang dihadapi oleh UKM di negara-negara berkembang sebenarnya bukanlah karena ukurannya, tetapi lebih karena isolasi yang menghambat akses UKM kepada pasar, informasi, modal, keahlian, dan dukungan institusional.

UKM dituntut untuk melakukan perubahan guna meningkatkan daya saingnya agar dapat terus berjalan dan berkembang. Salah satunya adalah dengan cara menggunakan teknologi informasi (TI). Penggunaan TI dapat meningkatkan transformasi bisnis melalui kecepatan, ketepatan dan efisiensi pertukaran informasi dalam jumlah yang besar. Studi kasus di Eropa juga menunjukkan bahwa lebih dari 50 % produktifitas dicapai melalui investasi di bidang TI. UKM dikatakan memiliki daya saing global apabila mampu menjalankan operasi bisnisnya secara reliable, seimbang, dan berstandar tinggi.

Upaya peningkatan adopsi dan pemanfaatan TI di Indonesia harus dilakukan mengingat manfaat TI yang dapat mendukung kinerja dan meningkatkan produktivitas UKM. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan melihat penerapan pemanfaatan TI pada pengrajin UKM Batik di Provinsi Jambi.

Penetrasi penggunaan internet sendiri di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebesar 16 juta orang menjadi 88.1 juta orang pada tahun 2014. Frekuensi penggunaan akses internet pun juga sangat tinggi yakni sebanyak 84% dari mayoritas pengguna internet selalu mengakses internet setiap hari meskipun hanya sekali dalam sehari.

Masyarakat Indonesia semakin terbiasa dengan penggunaan internet termasuk untuk berbelanja. Hasil survey menunjukkan bahwa 34 % pengguna internet di Indonesia melakukan pencarian web untuk mencari produk yang ingin mereka beli, 27 % nya melakukan pembelian barang secara online (APJII, 2014).

Perilaku belanja online konsumen di Indonesia menunjukkan bahwa produk fashion paling diminati dalam belanja online (Nielsen Online, 2012). Survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas tahun 2012 menunjukkan bahwa 33,5 % responden pernah melakukan *online shopping*. Barang yang mereka beli adalah fashion atau pakaian, termasuk aksesoris dan sepatu (60,8%).

Mengingat pentingnya peran UKM tersebut maka perlu dilakukan kajian lebih jauh mengenai UKM di Provinsi Jambi, khususnya yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing UKM Pengrajin Batik di Provinsi Jambi dalam menghadapi era persaingan di pasar global.

Disaat booming batik Jambi terjadi, namun kondisi UKM Kerajinan Batik justru tengah menyusut, dalam lima tahun terakhir banyak pengrajin yang tidak lagi beroperasi, walaupun perdagangan produk ini terus meningkat. Penyebabnya adalah produk buatan pengrajin setempat sulit bersaing dengan pengrajin dari luar.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2009, jumlah pengrajin batik di Provinsi Jambi mencapai 224 orang, dengan jumlah usaha sebanyak 49 unit. Pengrajin ini tersebar di Provinsi Jambi sebanyak 129 orang,

Batang Hari 52 orang, Sarolangun 15 orang, Merangin 10 orang, Tebo 4 orang dan Bungo 14 orang, secara keseluruhan nilai investasi industri batik di Jambi mencapai Rp. 588 Miliar. Kapasitas produksi mencapai 92.773 meter pertahun.

Stoeken dan Coumen (1998) dalam Wahid (2007), menyatakan bahwa kurangnya pemahaman terhadap peran strategis yang dapat dimainkan oleh Teknologi Informasi (TI) terkait dengan pendekatan baru pemasaran, hubungan dengan konsumen, dan pengembangan produk dan layanan diduga sebagai sebab rendahnya adopsi TI oleh UKM.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui gambaran umum kondisi pemanfaatan teknologi informasi pada pelaku usaha Batik Jambi di Provinsi Jambi.
2. Mengidentifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan TI dan Strategi dalam Percepatan Penerapan Penggunaan TI pada Pengrajin Batik.

C. METODE PENELITIAN

Obyek penelitian ini adalah pengrajin batik yang berada di Kota Jambi, Kab. Batang Hari, Bungo, Tebo dan Kerinci. Sedangkan subyek penelitian adalah pengrajin Batik yang memanfaatkan teknologi informasi dalam usahanya.

Data Primer, Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei lapangan dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Pemilihan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Berdasarkan metode tersebut, kemudian dilakukan wawancara terhadap pemilik atau pengelola UKM Batik yang terpilih menjadi responden.

Wawancara didasarkan pada kuesioner atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Selanjutnya, juga dilakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap para pelaku pengrajin batik di wilayah penelitian. Kegiatan penelitian ini

dilaksanakan selama satu tahun anggaran (Januari – November 2017).

Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan berbagai peralatan statistik deskriptif dan tabel-tabel frekuensi tunggal dan tabel-tabel frekuensi silang.

D. HASIL PENELITIAN

1. Kondisi Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Pengrajin Batik di Provinsi Jambi

Indikator yang digunakan dalam melihat pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian ini meliputi kepemilikan komputer, pemanfaatan komputer, pengetahuan tentang internet serta pemanfaatan internet untuk usaha.

Kepemilikan, Kemampuan dan Pemanfaatan Komputer

Berdasarkan kepemilikan komputer, baru sebanyak 26,09 persen pengrajin batik yang telah memiliki komputer dalam menunjang usaha yang dijalankan. Sedangkan sebagian besar responden yakni sebanyak 73,91 persen belum memiliki komputer.

Pada dasarnya kemampuan pengrajin dalam mengoperasikan komputer relatif cukup baik. Hal ini dikarenakan dari total Pengrajin Batik yang tidak memiliki komputer untuk usahanya, lebih separuh (58,33 %) menyatakan bisa mengoperasikan komputer dengan baik. Kemampuan ini juga ditunjang oleh kemampuan karyawan pengrajin batik yang dapat mengoperasikan komputer dengan baik.

Dari hasil ini terlihat bahwa sebagian besar pengrajin batik di Provinsi Jambi masih memiliki akses yang terbatas terhadap kepemilikan komputer. Rendahnya tingkat kepemilikan komputer oleh pengrajin batik ini disebabkan oleh beberapa alasan. Alasan utama adalah pengrajin batik menganggap usaha mereka tidak

butuh komputer. Hal ini dinyatakan oleh 70 % dari Pengrajin Batik di Provinsi Jambi. Alasan lainnya adalah keterbatasan sumberdaya manusia (dinyatakan oleh 17 % Pengrajin Batik) dan keterbatasan modal (dinyatakan oleh 13 % Pengrajin Batik).

Dominannya alasan bahwa usaha tidak membutuhkan komputer, dan di sisi lain relatif kecilnya yang beralasan adanya keterbatasan modal, pada dasarnya menunjukkan bahwa rendahnya kepemilikan komputer pada pengrajin lebih disebabkan rendahnya pemahaman Pengrajin Batik akan manfaat komputer dalam menunjang usaha. Sebagian besar Pengrajin Batik (beserta karyawannya) memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer, tetapi memiliki pengetahuan yang rendah terhadap kemanfaatan komputer untuk usaha.

Rendahnya pengetahuan/pemahaman mengenai pentingnya komputer dalam peningkatan usaha ini juga terlihat nyata dari keinginan Pengrajin Batik (yang saat ini tidak memiliki komputer) untuk memiliki komputer untuk usaha kedepannya. Dari total yang tidak memiliki komputer, lebih dari seperempatnya (26,09 %) yang berniat untuk memiliki komputer untuk usaha pada masa yang akan datang. Mayoritas berharap adanya bantuan dari pemerintah (56,52 %), dan yang tetap menyatakan tidak berkeinginan memiliki komputer untuk usaha ke depan sebesar 17,39 %.

Dari sisi keterampilan mengoperasikan komputer Pengrajin Batik juga relatif baik. Selain kemampuan mengoperasikan program pengolah kata (Ms Word dan sejenisnya) secara baik yang dinyatakan oleh 56 % Pengrajin Batik, 33 % Pengrajin Batik juga menyatakan mampu mengoperasikan program pengolah angka (Ms Excel dan sejenisnya). Bahkan, terdapat 11 % Pengrajin Batik yang menyatakan mampu mengoperasikan program Desain Grafik (aplikasi pengolah *layout*, gambar, video, multimediatiga dimensi dan sejenisnya).

Mengacu pada fakta ini dapat dikemukakan bahwa dari sisi sumberdaya manusia, pada dasarnya upaya peningkatan

pemanfaatan teknologi informasi pada pengrajin batik di Provinsi Jambi tidak akan mendapatkan kendala yang berarti.

Kepemilikan, Kemampuan dan Pemanfaatan Internet

Indikator selanjutnya yang dinilai dalam hal pemanfaatan teknologi informasi di kalangan Pengrajin Batik adalah pengetahuan akan teknologi internet dan sejauh mana pemanfaatan teknologi internet untuk menunjang usaha yang sedang ditekuni.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa pengetahuan Pengrajin Batik terhadap internet sudah relatif baik. Hanya sekitar dibawah seperempatnya (21,74 %) Pengrajin Batik yang tidak mengetahui internet sedangkan sebagian besar lainnya (78,26 %) mengetahui dan memahami teknologi internet. Meskipun demikian, dari total Pengrajin Batik yang mengetahui internet, lebih separuhnya (67,39 %) belum menggunakan internet untuk kepentingan usahanya dan hanya 32,61 % yang menggunakan untuk usaha.

Selain besarnya proporsi Pengrajin Batik yang mengetahui internet, pengetahuan internet Pengrajin Batik juga relatif beragam. Terdapat 60,87 % yang mengetahui mengenai media sosial, 19,57 % yang mengetahui cara *browsing*, 13,04 % yang mengetahui cara bisnis online, dan 13,56 % yang mengetahui cara menggunakan email.

Pemanfaatan internet untuk usaha pada Pengrajin Batik (yang saat ini menggunakan internet untuk usaha) juga relatif beragam. Sebanyak 15,22 persen diantaranya sudah menggunakan internet untuk browsing melihat keunggulan produk lain yang sejenis, 21,74 % browsing mencari cara untuk meningkatkan kualitas produknya, 19,57 % menggunakan internet untuk mencari informasi pasar, dan mayoritas 43,48 % menggunakan sosial media untuk promosi.

Dari hasil analisis di atas dapat dikemukakan bahwa proporsi Pengrajin Batik yang mengetahui internet relatif besar. Kemampuan dan pengetahuan terhadap jenis-jenis penggunaan internet juga relatif beragam, serta pemanfaatan untuk usaha (bagi yang menggunakan internet untuk usaha) juga relatif beragam. Namun demikian, penggunaan internet untuk usaha pada Pengrajin Batik di Provinsi Jambi masih relatif kecil. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pemahaman pentingnya internet untuk kegiatan usaha. Dua puluh delapan persen dari Pengrajin Batik menyatakan tidak menggunakan internet dengan alasan tidak tahu manfaat internet dan merasakan manfaat internet kurang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan (21,74 %). Selanjutnya, meskipun sebagian besar (30,43 %) menyatakan alasan tidak menggunakan internet karena lingkup usaha masih bersifat lokal, tetapi sebenarnya lebih karena faktor kurang pemahaman bahwa usaha yang bersifat lokal juga dapat memanfaatkan internet untuk meningkatkan aktivitas usaha.

Rendahnya pemahaman mengenai pentingnya internet dalam peningkatan usaha ini juga terlihat nyata dari keinginan Pengrajin Batik (yang saat ini tidak menggunakan internet) untuk usaha pada masa yang akan datang. Dari total yang tidak menggunakan internet, hanya sebesar 36,96 % saja yang berniat menggunakan untuk usaha pada masa yang akan datang. Sebagian besar lainnya (63,04 %), tetap menyatakan tidak berkeinginan menggunakan internet untuk usaha ke depan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan TI dan Strategi dalam Percepatan Penerapan Penggunaan TI pada Pengrajin Batik

a. Rendahnya Pemahaman terhadap Manfaat Teknologi Informasi dalam Pengembangan Usaha

Pengrajin batik di Provinsi Jambi pada umumnya tidak memiliki bagian yang secara khusus mengelola TI. Umumnya, pengrajin batik di Provinsi Jambi lebih mengandalkan bantuan

pihak luar untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan penggunaan TI yang berbasis komputer. Ketergantungan dari pihak eksternal akan berkurang manakala para pemilik usaha tersebut telah memiliki pemahaman yang cukup terhadap TI melalui proses pembelajaran. Dengan tingkat pemahaman teknologi yang tinggi, diharapkan para pemilik usaha mengadopsi dan memanfaatkan TI secara ekstensif.

Rendahnya tingkat pemahaman Pengrajin Batik di Provinsi Jambi terlihat dari kenyataan bahwa 70 % dari mereka mengemukakan bahwa usaha mereka belum membutuhkan komputer dan 17,39 % dari Pengrajin Batik yang tidak punya komputer saat ini juga tidak punya rencana/keinginan untuk menggunakan komputer pada masa yang akan datang untuk kepentingan usahanya dan sisanya menggunakan tapi bila ada bantuan dari pemerintah sebesar 56,52 %. Selain itu, dalam konteks penggunaan internet sebagian besar (30,43%) Pengrajin Batik mengemukakan bahwa mereka tidak menggunakan internet karena lingkup usaha yang masih lokal, tanpa memahami bahwa penggunaan internet justru akan mampu meningkatkan skala dan jangkauan usahanya. Selain itu, pada Pengrajin Batik yang tidak menggunakan internet saat ini, juga memiliki keinginan yang rendah untuk menggunakan pada masa yang akan datang. Hanya 36,96 % yang punya rencana/keinginan untuk memanfaatkan internet pada masa yang akan datang dalam rangka pengembangan usahanya.

b. Rendahnya Ketersediaan Investasi Teknologi Informasi

Sebagaimana diketahui, pengrajin batik pada umumnya memiliki keterbatasan modal dalam menjalankan usaha. Keterbatasan modal ini menyebabkan keraguan Pengrajin Batik dalam menginvestasikan dananya pada teknologi informasi, baik pada saat ini maupun untuk rencana ke depannya. Di sisi lain, perubahan TI yang begitu cepat menyebabkan suatu usaha mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk memperbarui

teknologinya. Hasil penelitian pada pengrajin batik di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa persoalan keterbatasan modal bukan menjadi alasan utama mereka tidak menggunakan TI, tetapi lebih karena faktor keraguan akan kemanfaatan TI tersebut untuk perkembangan usaha.

c. Masih Rendahnya Dukungan Lembaga Pemerintah

Dukungan lembaga pemerintah bagi inovasi teknologi telah diakui sebagai faktor penting dalam aplikasi TI. Peran lembaga pemerintah bervariasi mulai dari pemasok informasi tentang inovasi teknologi, penyedia bantuan finansial, pelaksana riset dan pengembangan terpadu. Adanya intervensi pemerintah dalam aplikasi TI akan mendorong proses pembelajaran teknologi. Bahkan di beberapa negara, pemerintah menyediakan semacam asisten untuk membantu perusahaan kecil dan menengah dalam menerapkan TI ke dalam bisnis mereka.

Diakui bahwa Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dekranasda Provinsi Jambi telah memiliki program dan kebijakan dalam pengembangan TI untuk pengrajin di Provinsi Jambi. Namun demikian, program-program tersebut belum mampu menyentuh secara keseluruhan pada Pengrajin Batik di Provinsi Jambi. Selain itu, program tersebut juga tidak berlangsung secara berkesinambungan dalam kerangka pembinaan TI pada pengrajin batik.

d. Potensi Pendukung: Ketersediaan SDM dari Sisi Pendidikan yang Relatif Baik

Dalam peningkatan pemanfaatan IT pada pengrajin batik di Provinsi Jambi terdapat potensi pendukung, dimana tingkat pendidikan pelaku/pemilik serta tenaga kerja pada pengrajin batik sudah relatif baik. Dengan tingkat pendidikan yang relatif baik ini diharapkan akan lebih mempermudah kebijakan dalam

memperkenalkan dan mengaplikasikan penggunaan IT pada pengrajin batik di Provinsi Jambi.

e. Potensi Pendukung: Kemampuan Individu dari Pengrajin Batik yang Relatif Baik dalam IT

Lebih separuh dari Pengrajin Batik yang tidak memiliki komputer untuk usaha, mampu mengoperasikan komputer dengan baik. Selain itu, lebih separuh dari Pengrajin Batik yang tidak menggunakan internet pada saat ini juga mengetahui dan mampu menggunakan internet. Fakta ini menjadi salah satu faktor pendorong yang dapat dimanfaatkan dalam peningkatan IT untuk pengembangan pengrajin batik pada masa yang akan datang.

E. REKOMENDASI

1. Pemerintah harus memberikan subsidi teknologi kepada pengrajin batik dan melibatkan *stakeholder* dalam melakukan percepatan perubahan di bidang manajemen usaha berbasis teknologi informasi. Subsidi teknologi yang dimaksud adalah adanya modal bagi pengrajin untuk memperoleh atau dapat membeli teknologi produktivitas dan pengawalannya sehingga teknologi manajemen dan produksinya dapat dikuasai secara utuh dan efisien sampai tahap menghasilkan dan memasarkan produk .
2. Dukungan Pemerintah Daerah kepada Pengrajin batik dengan mengembangkan lingkungan (*envirovment*) yang kondusif untuk melakukan inkubasi usaha yang berkaitan dengan penerapan teknologi informasi dengan mensinergikan dan mengintegrasikan sektor unggulan, berbasis teknologi dan bisnis, R&D dan Inovasi melalui *Science Tecnology Park*
3. Memfasilitasi pembuatan *website*, pendidikan dan pelatihan dan pendampingan. Membangun Kerjasama dengan instansi dan asosiasi-asosiasi yang bergerak dibidang TI, seperti Telkom, APKOMINDO dan APJII (Asosiasi Penyedia Jasa

Internet Indonesia) dan Sosialisasi manfaat dan potensi TI dalam pengembangan usaha pengrajin batik tersebut.

4. PemKab/PemKot melalui OPD terkait dan Dekranasda perlu melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat, Perusahaan Teknologi Informasi dan Perusahaan *e-commerce* untuk mendorong para pengrajin Batik untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pengembangan usahanya. Pemerintah Kabupaten dapat memberikan keringanan biaya peralatan, pemasangan jaringan internet dan biaya *software* yang digunakan dalam mengaplikasikan TI berbasis digital dalam usaha. Merekrut tenaga ahli Teknologi Informasi yang dapat menyediakan wadah *website* perdagangan batik secara *online* dan sebagai mentor (pembimbing).



**KERJASAMA MULTI PIHAK DALAM PROGRAM
PEMBANGUNAN PLTMH DI PROVINSI JAMBI DITINJAU DARI
PERSFEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE**

Peneliti :

Dr. Ahmad Subhan, S.IP., M.Si..

A. LATAR BELAKANG

Sejak adanya otonomi daerah, pemerintah daerah telah memiliki peluang yang cukup besar untuk mencari solusi atas keterbatasan sumber daya dengan melibatkan berbagai *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan pembangunan, misalnya pihak swasta, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan *Non Governmental Organisation* (NGO). Keterlibatan berbagai pihak ini memiliki peran penting untuk membantu pemerintah mengingat tidak semua aktivitas pembangunan mampu dikerjakan oleh pemerintah sendiri terutama dalam hal ketersediaan *skill* SDM dan finansial.

Dasar pemikiran ini yang mendasari Pemerintah Provinsi Jambi untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Empat PLTMH yang akan dibangun berlokasi di Desa Jangkat dan Rantau Kermas yang ada di Kabupaten Merangin. Kemudian dua desa lain adalah Muara Pemuat dan Lubuk Banggar di Kabupaten Sarolangun. Langkah kerjasama ini diambil Gubernur Jambi mengingat beberapa desa di Jambi masih sulit dijangkau jaringan listrik PLN, namun, sumber daya alamnya sangat memungkinkan untuk dibangun PLTMH, yakni dengan memanfaatkan sumber daya air sungai yang ada.

Secara formal, kerjasama ini terdiri dari skema tiga pihak antara Pemerintah Provinsi Jambi, UNDP, Bank Jambi dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Keterlibatan multi pihak ini tentu semakin perlu ditingkatkan bukan hanya kerjasama antar lembaga formal namun juga butuh dukungan pemerintah dan masyarakat setempat agar pelaksanaan program dapat berjalan lancar dan berhasil sesuai tujuan bersama. Hal ini menjadi penting untuk dikaji sejak awal inisiasi kerjasama, karena menciptakan, melaksanakan dan mempertahankan kerjasama bukanlah sesuatu yang mudah atau datang dengan sendirinya. Kerjasama merupakan upaya yang sengaja dilakukan oleh beberapa aktor untuk melakukan penyesuaian dan perubahan, agar bisa memperoleh hasil yang lebih optimal.

Dalam konteks tersebut, riset ini mengkaji proses inisiasi kerjasama dan proyeksi ke depan dari perspektif tata pemerintahan kolaboratif (*collaborative governance*) sebagai upaya saintifik yang bersifat responsif dan antisipatif atas kebijakan kerjasama yang digagas Pemerintah Provinsi Jambi. Perspektif dalam riset ini lebih fokus pada studi format kelembagaan dan kerangka regulasi, bukan kajian pelaksanaan kerjasama secara teknis di lapangan. Hubungan kelembagaan penting dikedepankan mengingat suatu kerjasama multi pihak adalah langkah positif dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang perlu terus didukung, sehingga perlu dipertahankan serta ditingkatkan karakter kolaborasi antar lembaga pemangku kepentingan agar menjamin kerjasama nantinya bisa berkesinambungan dan berhasil.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Mendeskripsikan kondisi eksisting format kolaborasi dalam kerjasama pembangunan PLTMH di provinsi Jambi.
2. Merumuskan alternative model kelembagaan dalam rangka optimalisasi kerjasama .

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Jambi, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun.

D. HASIL PENELITIAN

Pemerintah Provinsi Jambi telah menginisiasi kerjasama dalam program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Program yang baru dirintis dalam tahun 2017 ini merupakan pilot project kerjasama dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) yang merupakan lembaga organ PBB untuk program pembangunan, khususnya *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dengan pembangunan dan rehabilitasi PLTMH tersebut, ditargetkan 937 rumah atau 6.454 jiwa di empat desa di Merangin dan Sarolangun akan mendapatkan akses energi listrik. Secara formal, kerjasama ini terdiri dari skema multi pihak antara Pemerintah Provinsi Jambi, *United Nations Development Programme* (UNDP) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa format kerjasama kolaboratif belum terselenggara secara maksimal. Kerjasama multipihak dalam pembangunan PLTMH di provinsi Jambi belum memenuhi seluruh kriteria *collaborative governance*. Masih terdapat beberapa poin yang belum terpenuhi yakni anggota yang terdaftar dalam forum bersifat inklusif karena dalam pelaksanaannya belum melibatkan penerima manfaat (*beneficiaries*) di dalamnya. Di sisi lain cukup meyakinkan, motivasi masing – masing anggota untuk terlibat dalam forum cukup tinggi, dialog *face to face* dan komunikasi langsung cukup sering dilakukan dan alokasi sumber daya keuangan relatif memadai. Hambatan kolaborasinya yakni terkait struktur jaringan

yang cenderung membentuk hirarki dan inklusif, tidak adanya keterbukaan dan kebebasan bagi untuk melakukan kolaborasi.

Keterlibatan multi pihak ini masih perlu ditingkatkan bukan hanya kerjasama antar lembaga formal namun juga butuh dukungan pemerintah dan masyarakat setempat agar pelaksanaan program dapat berjalan lancar dan berhasil sesuai tujuan bersama. Salah satu tawaran pengembangan model kerjasama yaitu model *Community Capacity Building Networks/CCBN* (Jaringan Pembangunan Kapasitas Masyarakat). Hal ini menjadi penting diakomodir dalam kelembagaan kerjasamanya agar pelaksanaan ke depan bisa lebih kolaboratif mengingat pengembangan kegiatan ekonomi, pendidikan, dakwah, dan kemanusiaan merupakan kegiatan pendukung yang dapat dijadikan sebagai aktifitas lanjutan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat dan wilayah tersebut. .

E. REKOMENDASI

Berdasarkan hal tersebut, dapat disarankan bagi OPD Pemerintah Provinsi Jambi yang terkait dengan kerjasama ini (Bappeda dan Dinas ESDM) untuk terus proaktif memfasilitasi aktifitas kerjasama. Meskipun aspek teknis kerjasama dikelola oleh UNDP dan pihak ketiga, namun Pemprov Jambi sebagai salah satu pihak dalam skema kerjasama seyogyanya bisa terus memfasilitasi. Pemprov. Jambi juga perlu untuk terus berkoordinasi dengan BAZNAS provinsi Jambi selaku organ BAZNAS di daerah. Selain itu juga penting untuk dilakukan penyusunan sisi kemasyarakatan di masing-masing lokasi kegiatan untuk kemudian bisa memfasilitasi keterlibatan pemerintah setempat dan masyarakat penerima manfaat di lokasi pembangunan.

9

PERANAN NINIEK MAMAK DALAM PEMERINTAHAN ADAT DI DESA TANJUNG PAUH MUDIK KABUPATEN KERINCI

Peneliti :

Dr. H. Zarmaili, S.Ag., MM..

A. LATAR BELAKANG

Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 menjelaskan bahwa, proses pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan pembangunan partisipatif, yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan pemerintah adat adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum adat setempat, yaitu peraturan-peraturan hidup yang dihormati dan ditaati oleh rakyat yang dianggap sebagai hukum (*Bellefroid, tt*). Pemerintah adat merupakan sistem yang dibentuk secara alamiah oleh sekelompok masyarakat setempat dalam rangka mengatur hidup dan kehidupan mereka demi kepentingan bersama. Norma-norma tersebut dianggap sakral dan wajib ditaati oleh masyarakat yang hidup di wilayah mereka.

Di Desa Tanjung Pauh Mudik Kabupaten Kerinci, pada awalnya masyarakat hidup dalam aturan yang telah ditetapkan secara adat, dan desa tersebut berada di bawah pemerintah adat yang dipimpin oleh Depati Anum dan dibantu oleh ninikmamak dan perangkatnya. Sungguhpun, sistem pemerintahan adat ini sempat terkikis dan lemah disebabkan lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, telah membentuk pemerintahan desa di setiap desa di Indonesia dengan sistem pemerintahan sentralistik yang berada di bawah pemerintahan pusat secara hirarkhi, namun pemerintahan adat Tanjung Pauh Mudik tetap memiliki kekuasaan terhadap masyarakatnya. Karena masyarakat yang ada di desa tersebut adalah milik pemerintah adat, bukan milik pemerintahan desa.

Keberadaan pemerintahan adat dalam pemerintahan desa dikuatkan kembali mulai tahun 2000 berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya, kekuatan sistem pemerintahan adat diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menjelaskan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sayangnya, menurut M. Rajab, salah seorang unsur ninikmamak (23/03/2017) mengatakan bahwa hingga saat ini tahun 2017 sistem dan peran pemerintah adat di Desa Tanjung Pauh Mudik berjalan dengan aturan yang diperoleh secara turun temurun tidak tertulis secara jelas dan detil dalam sebuah buku, atau tertuang dalam peraturan adat yang dikeluarkan oleh Depati Anum. Sehingga kondisi ini telah menyebabkan perbedaan persepsi bagi Depati Anum dan Ninikmamak dalam melaksanakan pemerintahannya. Hal ini juga telah menyebabkan tumpang tindih tugas dan fungsi dalam menjalankan

pemerintahan. Untuk menghindari terjadinya perselisihan dan konflik dalam menjalankan pemerintahan adat, peneliti merasa sangat tertarik untuk mengidentifikasi dan menginventarisir kemudian membukukan peran Depati Anum dan unsur Ninikmamak dan perangkatnya dalam pemerintahan desa adat di Tanjung Pauh Mudik Kerinci.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui jabatan yang ada pada pemerintahan adat Desa Tanjung Pauh Mudik.
2. Untuk mengetahui peranan unsur pemerintahan adat di Desa Tanjung Pauh Mudik.

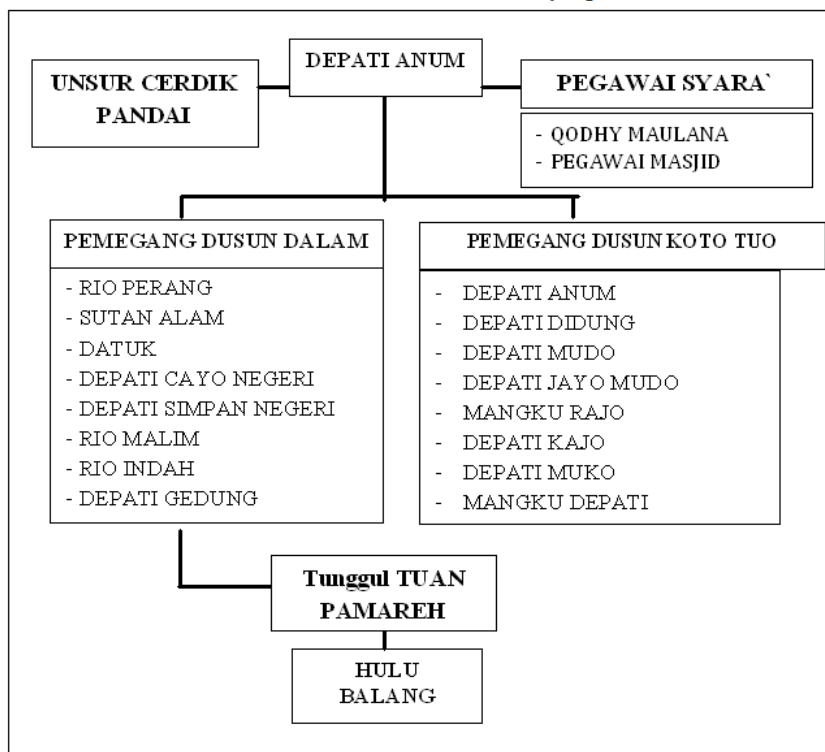
C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini melakukan analisis diskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dilakukan dengan pendekatan *riset kualitatif*. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan sejumlah informan terutama dari anggota ninikmamak pemerintahan adat Desa Tanjung Pauh Mudik Kerinci Jambi. Data sekunder diperoleh melalui catatan dan peninggalan adat Desa Tanjung Pauh Mudik Kerinci, seperti buku-buku catatan adat dan catatan orang-orang tua tentang pemerintahan adat.

Kemudian, data juga dianalisis dengan metode triangulasi, dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda.

D. HASIL PENELITIAN

Struktur Pemerintah Adat Desa Tanjung Pauh Mudik



Sumber: Burkan Saleh, 2009, dan hasil olah data lapangan

Berdasarkan struktur di atas, jabatan yang diduduki setiap pejabat adat tersebut adalah didasari pada silsilah keturunan atau tembo mana yang mereka miliki. Tembo tersebut dimiliki oleh pihak perempuan artinya masyarakat tersebut bersifat matrilineal atau keibuan, jadi kaum laki-laki yang ikut perempuan. Pejabat adat yang diduduki oleh pemangku adat adalah didasarkan pada kedudukan perempuan dalam adat.

Pemangku adat adalah utusan dari setiap kelebu yang terdiri dari beberapa tumbi yang ada di dalam desa Tanjung Pauh Mudik. Tumbi adalah sekelompok keluarga terkecil yang memiliki satu keturunan yang turun temurun sebagai warga masyarakat asli Desa Tanjung Pauh Mudik. Setiap sejumlah tumbi memiliki utusan untuk memegang jabatan yang ada di dalam depati ninik mamak, artinya anggota depati ninik mamak adalah wakil setiap tumbi di pemerintahan adat. Jabatan dalam pemerintahan adat melekat pada masing-masing kelebu secara turun-temurun.

Orang luar seperti pedagang dari jauh, penumpang sementara dan orang yang tidak seagama dengan agama Islam tidak dibenarkan menjabat di dalam pemerintahan adat atau sebagai anggota depati ninik mamak.

Tugas dan Tanggung Jawab Pemangku Adat

1) Depati Anum

Pemangku pemerintahan adat Desa Tanjung Pauh Mudik dipimpin oleh seorang yang disebut dengan **Depati Anum**. Beliau memimpin para pemangku adat yang disebut dengan **Ninik Mamak**. Beliau adalah salah seorang anggota ninik mamak yang dianggap bijak, cerdas, pintar dan mengayomi, yang dipilih berdasarkan keturunan tembonya. Depati Anum adalah pimpinan pemerintahan adat, dia memiliki wewenang membuat keputusan dari hasil musyawarah bersama dengan depati ninik mamak. Tugasnya turun langsung memimpin segala bentuk kegiatan di dalam masyarakat. Seperti gotong royong, membuat patok bangunan, patok jalan, sawah dan perkebunan.

2) Ninik Mamak

Secara umum nenek mamak berperanan langsung dan terlibat di dalam berbagai kegiatan kehidupan masyarakat secara moril. Mereka bertanggung jawab atas jalan atau tidaknya sesuatu rencana atau sesuatu peraturan dalam kehidupan masyarakat. Ninik Mamak adalah orang yang mengatur

segalanya, Dia jadi nenek yang akan menasehati cucunya dan dia menjadi mamak yang akan mengatur anak kemenakannya. Dialah yang mengatur kesejahteraan dan keamanan dalam negeri.

Ninik Mamak itu ibarat seorang pengembala yang memasukan petang mengeluarkan pagi, dia yang mengajun mengarah, menyusun menyesuaikan. Dalam pepatah adat dikatakan ;

“Pusaka Ninik Mamak ialah menyusun, yang kusut diselesaikan, yang keruh dijernihkan, yang jauh diulangi, yang dekat dikunjungi. Kalau ada pekerjaan besar atau kecil berkata dulu sepatah, berjalan dulu selangkah, mengetahui larik yang berderet, rasuk bertumbuk bendul, larik yang panjang halaman sampai ke ujung, lumbung yang berjejer sawah yang berjenjang, kebun yang berbidang”.

“Menentukan batas dengan padang, pendek dengan panjang, menentukan tempat dengan jurai, dahan dengan ranting, gilir dengan ganti, mengetahui orang masuk orang keluar, tamu datang melintang datang, membujur datang malam datang siang, air yang beriak daun yang bergoyang semua itu adalah kerja Ninik Mamak”.

Dari kata-kata adat di atas, jelaslah tugas Ninik Mamak itu sangat berat, kepada dia dipikulkan tanggung jawab anak jantan dan anak batino yang berat itu, dialah yang mengurus anak jantan dan anak batino secara langsung.

3) Pegawai Syara` (Qodi Maulana, pegawai Masjid)

Pegawai Syara` adalah Alim ulama dan pegawai yang berempat, yaitu Qodi maulana, imam masjid, khatib, dan bilal. Petugas yang memutuskan hukum di dalam masyarakat adalah Qodi Maulana, terutama hukum di dalam pelaksanaan ibadah seperti menentukan hari puasa, jumlah zakat, pembagian waris dan ibadah lainnya. Beliau juga yang memiliki hak wakil di dalam menikahkan anak jantan dan anak betino serta menetapkan perceraian mereka. Seterusnya tugas pegawai syara` adalah:

- Mengurus Nikah, Thalak, cerai dan rujuk (NTCR)
- Masuk masjid keluar masjid
- Menentukan halal dan haram, shah dengan batal, syarat dengan rukun dan sebagainya tentang urusan agama Islam.
- Menguburkan serta memantapkan kehidupan beragama yang sesuai dengan ajaran Allah Swt dan Rasulullah SAW, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.

4) Unsur Cerdik Pandai

Tugas unsur Cerdik Pandai adalah terdiri dari kalangan yang terpelajar dan oarng tua yang berpengalaman serta berpandangan jauh kemuka demi memberi pengarah, saran dan petunjuk untuk kemaslahatan anak jantan dan anak betino (masyarakat).

5) Tunggul Tuan Pamareh

Tunggul Tuan Pamareh adalah kalangan orang yang dianggap pandai berbicara dan berkomunikasi. Dia adalah sebagai penghubung infromasi yang datang dari kaum ninikmamak dengan masyarakat atau memberikan pengumuman tentang keputusan yang telah dibuat kaum ninikmamak, seperti perintah gotong royong, acara adat dan acara keagamaan.

6) Hulu Balang

Hulu balang adalah kelompok pemuda yang kuat, berani, tegap dan kesatria, mereka memiliki tugas yaitu:

- Membendung orang yang masuk dari hilir dan yang datang dari mudik.
- Berpedang hunus dan berparang tajam.
- Bermata jelang dan bertelinga nyaring.
- Cepat kakinya dan ringan tangannya.
- Setapak berpantang mundur dan sejari berpantang bergeser.

Proses Pelaksanaan Pemerintahan Desa Dan Pemerintahan Adat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan daerah seluruh dusun di Kabupaten Kerinci dileburkan menjadi pemerintahan desa, sehingga dusun dengan sendirinya menjadi hilang. Pemerintahan desa yang berasal dari budaya Jawa dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Pada pemerintahan desa, desa atau kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan. Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa, Kepala Desa bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui Camat, dan memberikan keterangan pertanggungjawaban tersebut kepada Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

Sejak masa ini sistem pemerintahan adat di dalam pembangunan dan pemerintahan desa tidak dipakai, semua kebijakan dan pembangunan masyarakat desa berdasarkan kebijakan dan bantuan dari pemerintah pusat, sehingga pada masa Orde Baru (ORBA) pemerintahan adat semakin lama semakin luntur.

Sungguhpun demikian, di dalam perjalanannya kebijakan pemerintahan desa yang didasarkan pada kebijakan pemerintahan pusat tidak mampu berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintahan adat harus dilaksanakan bersamaan dengan pemerintah desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 j.o Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang sistem pemerintahan daerah, maka semua pemerintahan desa dikembalikan kepada sistem pemerintahan yang diinginkan oleh masyarakat setempat. Oleh itu, di Desa Tanjung Pauh Mudik yang sudah dimekarkan menjadi lima desa tetap berada di bawah satu pemerintahan adat. Di dalam proses pelaksanaannya, pemerintahan desa bertanggungjawab di dalam menyediakan sarana dan dana, sedangkan pemerintahan adat bertugas menetapkan kebijakan pembangunan dan memutuskannya serta

melaksanakan keputusan. Selanjutnya, pemerintahan desa melaksanakan program pembangunan yang telah diputuskan oleh pemerintahan adat. Pemerintahan adat melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan program pembangunan.

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 Tentang “Desa” sebagai bentuk implementasi dari UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang “Pemerintahan Daerah” maka dilegitimasikan kekuasaan pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri. Hal ini ditambah dengan dihargainya faktor-faktor heterogenitas, asal-usul, nilai-nilai tradisional, dan kearifan lokal terutama yang sudah terbungkus dalam suatu sistem pemerintahan yaitu adat desa setempat.

Satu hal lain yang harus kita cermati bahwa ternyata meskipun PP Nomor 72 Tahun 2005 telah memberikan ruang yang lebih luas kepada Kepala Desa dan seluruh perangkat desa lain untuk mengatur masyarakatnya, namun masih memerlukan penyempurnaan di beberapa pasal agar tercapai hakekat dari otonomi desa yang sesungguhnya. Apalagi di desa yang telah memiliki sistem pemerintahan tradisional.

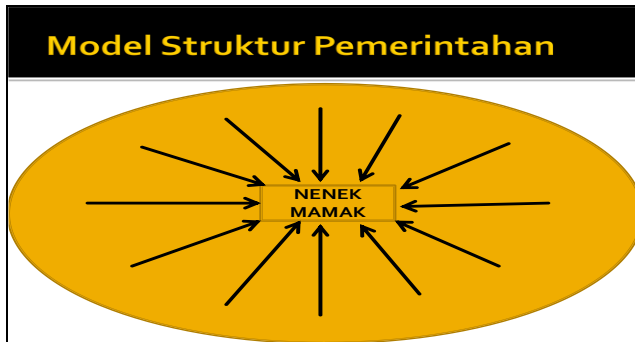
Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa. Kalau dulu semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui rute persetujuan kecamatan, untuk konteks sekarang hal itu sudah tidak berlaku lagi. Intervensi dari atas yang dulu sangat kental terasa kini sudah mulai berkurang. Hal itu jelas membuat pemerintah desa menjadi semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Sistem pemerintahan adat yang dijalankan di Desa Adat Tanjung Pauh Mudik sangat membantu terlaksananya

pemerintahan desa. Realisasi sistem pemerintahan yang demokratis sangat didukung oleh pemerintahan adat. Pemerintahan adat dipangku oleh utusan atau wakil dari setiap kelevu yang terpilih dan tersaring dan disegani serta dihormati oleh kelevunya, wakil yang diutuskan dapat dipercayakan atau mampu menyambung aspirasi kelevunya. Warga kelevu patuh dan taat kepada wakilnya di pemerintahan adat, karena kepercayaan mereka sepenuhnya diberikan kepada wakil mereka di pemerintahan adat untuk menyalurkan aspirasi mereka guna memenuhi hajat hidup mereka dalam desa.

Dengan demikian, pemerintahan adat sangat kuat, dihormati dan dipatuhi. Hukum adat ditaati oleh masyarakat, segala keputusan pembangunan dan permasalahan dalam masyarakat dapat diselesaikan di tingkat pemerintah adat. Tidak ada masalah yang tidak selesai pada tingkat pemerintahan adat, apapun keputusan pemerintah adat itulah keputusan bersama masyarakat.

Merujuk kepada sistem pelaksanaan pemerintahan adat tersebut di atas, menunjukkan bahwa pemerintah sangat mudah menjalankan roda pemerintahan di segala bidang. Hal ini disebabkan adanya keterbukaan dan partisipasi masyarakat melalui wakilnya di dalam pemerintahan adat, sehingga semua keputusan dan kebijakan adalah berasal dari suara masyarakat. Pemerintahan seperti ini sangat efektif untuk menjauhkan penyimpangan bagi pemimpin adat dan jauh terhindar dari diskriminasi terhadap suatu kelompok atau golongan, artinya pemerintahan terlaksana secara demokratis, adil dan bijaksana.



Gambar.2. Model Pemerintahan Terwakil

Sumber: Burkan Saleh, 2009

Keterangan:

—————> = Utusan Kalbu

Pemerintahan adat di dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa sangat dibutuhkan, karena masyarakat adat yang sudah kental dan patuh dengan sistem pemerintahan adat sangat mudah diatur sebab masyarakat lebih menghormati dan mempercayai pemerintahan atau pemangku adat.

E. REKOMENDASI

- a) Dalam rangka aplikasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, sistem pemerintahan adat sangat berpengaruh dalam mencapai keberhasilan pembangunan masyarakat desa. Oleh karena itu, perlu dibuat regulasi secara detil terhadap penerapan sistem pemerintahan adat.
- b) Perlu dibuat model pemerintahan adat yang dapat berlaku secara global, sehingga wilayah atau desa yang telah mempunyai pemerintahan adat dapat aktif kembali dan yang belum ada pemerintahan adat dapat dibuat dengan model yang telah ditetapkan.

10

FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA KEPUASAN KERJA PETUGAS PUSKESMAS DI KABUPATEN MERANGIN

Peneliti :

Novia Susianti, S.KM., M.BIOMED

A. LATAR BELAKANG

Karyawan sebagai sumber daya manusia (SDM) organisasi tempat mereka bekerja merupakan asset yang harus diberdayakan oleh karyawan yang bersangkutan maupun pihak organisasi. Hal demikian dimaksudkan agar karyawan dapat betul-betul menjadi bagian dari organisasi, sehingga dengan dukungan karyawan organisasi diharapkan dapat menjadi kuat. Pencapaian hasil kerja yang optimal oleh seorang karyawan dapat tercapai apabila terpenuhi salah satu faktor penting yaitu kepuasan kerja, termasuk sub sistem kesehatan.

Penyedia layanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai pusat kesehatan pertama yang berada di masyarakat memiliki peranan dalam sistem kesehatan, mengurangi rasa sakit dan penderitaan, mencegah penyakit dan mengurangi resiko. Jumlah tenaga kesehatan dan kualitas pelayanan berhubungan positif terhadap target kinerja yang telah ditentukan seperti cakupan imunisasi, jangkauan perawatan primer dan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. Tenaga kesehatan dihadapkan pada tantangan menghadapi pencapaian Jaminan Kesehatan Semesta, bagaimana menjamin efektifitas pelaksanaan paket manfaat, peningkatan cakupan pelayanan, serta bagaimana negara menghasilkan, mendistribusikan dan mempertahankan tenaga kesehatan yang mendukung *Universal Health Coverage*.

Fenomena saat ini yang ditemukan, terdapatnya ketimpangan insentif antara puskesmas yang sedikit banyaknya dilatarbelakangi oleh kondisi geografis puskesmas yang berdampak pada keinginan dari pegawai puskesmas dengan peserta yang sedikit untuk pindah ke puskesmas dengan jumlah kepesertaannya banyak, tidak meratanya jenis tenaga kesehatan tertentu padahal tenaga kesehatan tersebut sangat dibutuhkan, terdapatnya fenomena proses kepindahan dari tenaga kesehatan di kabupaten yang terkadang tidak menggunakan alur proses kepindahan pegawai yang sesuai semakin memperberat kondisi. Hasil penelitian Susianti, dkk, 2016, menemukan terdapat pola distribusi yang tidak merata antar puskesmas di Provinsi Jambi untuk jenis ketenagaan tertentu.

Kabupaten Merangin merupakan kabupaten yang telah memberikan insentif atas kelebihan kerja bagi tenaga kesehatan dengan membayar per jam dari kelebihan kerja tersebut. Hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan terdapat gejala diantaranya yaitu masih banyak petugas yang berusaha mencari tambahan penghasilan baik di dalam maupun diluar jam kerja, beberapa petugas merasa tidak nyaman ketika bekerja, ada persepsi bahwa pelaksanaan supervisi belum optimal dan tidak objektif, ada yang mengungkapkan terlalu banyak tugas yang tidak sesuai dengan tupoksinya, dan peluang berkembang yang sangat kurang karena minimnya program-program pelatihan.

Mengingat tantangan yang dihadapi, menciptakan petugas kesehatan yang tetap mempertahankan motivasi kerja merupakan hal yang harus diperhatikan oleh organisasi, sehingga perlu dilakukan identifikasi kepuasan kerja petugas puskesmas dengan harapan dapat diambil langkah-langkah upaya peningkatan kepuasan kerja dan peningkatan kinerja. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor yang berhubungan dengan kepuasan kerja petugas puskesmas di kabupaten Merangin, terdiri dari insentif non finansial, insentif finansial, hubungan dengan rekan kerja, supervisi, retensi dan motivasi petugas kesehatan.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui gambaran insentif non finansial, insentif finansial, hubungan dengan rekan kerja, supervisi, retensi dan motivasi petugas kesehatan di Kabupaten Merangin.
2. Mengetahui hubungan faktor insentif non finansial, insentif finansial, hubungan dengan rekan kerja, supervisi, retensi dan motivasi petugas kesehatan di Kabupaten Merangin.
3. Menentukan model faktor penentu kepuasan pegawai puskesmas di Kabupaten Merangin

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain *cross sectional*, di Kabupaten Merangin dengan jumlah responden 90 orang. Lokasi penelitian di puskesmas Muara Madras mewakili puskesmas daerah pegunungan, Puskesmas Pamenang untuk mewakili daerah transmigrasi dan Puskesmas Pematang Kandis mewakili daerah perkotaan. Pemilihan responden penelitian dilakukan secara random sampling dengan mengelompokkan petugas untuk mewakili masing-masing kelompok berdasarkan tupoksi yang ada pada puskesmas tersebut dengan kriteria telah bekerja minimal 1 tahun di puskesmas tersebut, dengan jumlah 30 orang per puskesmas. Analisis data univariat untuk mendeskripsikan persentasi variabel penelitian, analisis bivariat menggunakan uji *Chi-Square* dengan Confidence Interval (CI) 95%, dan analisis multivariate menggunakan analisis logistik berganda.

D. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan kepuasan kerja pada pegawai puskesmas di Kabupaten Merangin masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepuasan kerja pegawai tersebut, yang pada penelitian ini ditemukan yaitu faktor insentif non

finansial, insentif finansial, faktor hubungan dengan rekan kerja dan faktor motivasi. Sementara faktor penentu kepuasan kerja pegawai puskesmas di Kabupaten Merangin yaitu insentif finansial, faktor hubungan dengan rekan kerja, serta faktor motivasi. Dan faktor yang paling kuat untuk menentukan kepuasan kerja pegawai puskesmas di Kabupaten Merangin yaitu insentif finansial.

Pemberian penghargaan berupa insentif terlihat merupakan sebagai faktor yang paling kuat dalam meningkatkan kepuasan kerja pegawai puskesmas di Kabupaten Merangin. Akan tetapi, pemberian penghargaan tidak semata dalam bentuk uang, dan hal tersebut juga memberikan pengaruh yang cukup positif di dalam kepuasan karyawan. Kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan dalam pengembangan karir merupakan bentuk yang dapat diberikan dalam pemberian insentif non finansial. Hubungan rekan kerja juga ditemukan sebagai faktor yang memiliki hubungan signifikan, hal ini keterkaitannya dengan tingkat retensi dari seseorang. Motivasi ditemukan juga sebagai faktor penentu kepuasan kerja pegawai yang berasal dari dalam diri pribadi si pegawai tersebut, oleh karena itu motivator sangat diperlukan terhadap hal ini.

E. REKOMENDASI

1. Perlu dukungan kebijakan terkait insentif finansial kepada pegawai puskesmas di Kabupaten Merangin, yang sebelumnya telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin dengan memperhatikan beban kerja dan kondisi geografis dari puskesmas tersebut, tanpa mengabaikan promosi dan pengembangan karir pegawai tersebut.
2. Perlu dikaji kembali pola pemberian insentif yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan pola distribusi pegawai puskesmas berdasarkan kondisi geografis dari puskesmas yang ditempati.

3. Perlu diberikan upaya peningkatan keeratan hubungan interpersonal antar pegawai di dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif.

11

KEGIATAN PENELITIAN ANALISIS KEBIJAKAN SECARA ANTISIPATIF DAN RESPONSIF (KLAUSTERISASI INDUSTRI HILIR PRODUK OLAHAN BERBAHAN BAKU KARET DI PROVINSI JAMBI)

Tim Peneliti :

1. Dr. Novita Erlinda, MAP.
2. Weni Lestari, SP.
3. Joni Martin, SH., MH.
4. M. Rialdi Syahputra, SE., ME.
5. Ir. Ita Elvida
6. Dr. Mirawati Yanita, MM.

A. LATAR BELAKANG

Komoditi karet alam merupakan salah satu komoditas sub sektor perkebunan yang menjadi primadona ekspor Indonesia setelah kelapa dan kelapa sawit. Karet memiliki berbagai peranan penting bagi Negara Indonesia, antara lain : (a) Sumber Pendapatan dan lapangan kerja penduduk; (b) Sumber Devisa Negara dari ekspor non-migas; (c) Mendorong tumbuhnya agro-industri di bidang perkebunan; dan (d) Sumberdaya hayati dan pelestarian lingkungan.

Menurut data statistik pada tahun 2015 luas areal perkebunan karet di Provinsi Jambi tercatat 668.919 Ha atau 42 % dari total luas areal perkebunan yang ada, yang terdiri dari tanaman belum menghasilkan 198.296 Ha, tanaman menghasilkan 359.107 Ha dan tanaman tua/rusak seluas 111.516 Ha. Berdasarkan pengusahaannya luas perkebunan karet Provinsi Jambi didominasi oleh perkebunan rakyat seluas 664.704 Ha (99,4%) dengan produksi 328.563 Ton, dan Perkebunan Besar Swasta 4.215 Ha dengan produksi 3.100 Ton.

Permasalahan yang dihadapi oleh petani karet di Provinsi Jambi, tidak jauh berbeda dengan permasalahan petani karet di wilayah Indonesia lainnya. Permasalahan itu diantaranya Pendapatan petani sangat rendah (nilai tukar 1 kg karet mentah setara dengan 0,25 kg beras). Harga di tingkat petani cukup rendah, yaitu sekitar 60% FOB yang disebabkan oleh biaya prosesing tinggi dan rantai pemasaran yang cukup panjang (Puslitbang Karet Bogor, 2017). Selain itu produktivitas karet rendah, diantaranya dikarenakan benih tanaman banyak yang tidak unggul, kurang perawatan dan banyak tanaman tua.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengidentifikasi gambaran eksisting Industri hilirisasi produk olahan berbahan baku karet di Provinsi Jambi.
2. Mengidentifikasi Faktor kunci dalam mengoptimalkan pengembangan klasterisasi industri hilir produk olahan berbahan baku karet di Provinsi Jambi:
3. Memetakan kekuatan (*relative strength*) antar aktor (*stakeholder*) dalam melaksanakan kebijakan klasterisasi industri hilir produk olahan berbahan baku karet di Provinsi Jambi.
4. Merumuskan strategi dan model integrasi kebijakan klasterisasi industri hilir produk berbahan baku karet di Provinsi Jambi.

C. METODE PENELITIAN

Pemilihan lokus dari penelitian ini berdasarkan indikator wilayah kabupaten/kota yang memiliki luas kebun karet yang telah menghasilkan (TB) dan belum menghasilkan (TBM) di atas 50.000 ha. Sehingga yang terpilih menjadi lokus penelitian adalah Kabupaten Merangin (110.952 ha), Kabupaten Sarolangun (96.827 ha), Kabupaten Bungo (79.639 ha), Kabupaten Tebo (96.830 ha), Kabupaten Batanghari (102.027 ha) dan Kabupaten

Muaro Jambi (51072 ha). Adapun pemilihan sampel dilakukan secara *porpositive sampling* pada ketiga populasi (UPPB, Petani Karet, dan Perusahaan *Crumb Rubber*) di enam kabupaten yang menjadi lokus (Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, Batanghari dan Muaro Jambi).

Penelitian dilakukan dengan empat tahap berdasarkan permasalahan, tujuan, dan metode penelitian yang digunakan. Tahap 1. Mengidentifikasi gambaran eksisting Industri hilirisasi produk olahan berbahan baku karet di Provinsi Jambi dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Tahap 2. Mengidentifikasi Faktor kunci dalam mengoptimalkan pengembangan klusterisasi industri hilir produk olahan berbahan baku karet di Provinsi Jambi dengan tools MICMAC. Tahap 3. Memetakan kekuatan (*relative strength*) antar aktor (*stakeholder*) dalam melaksanakan kebijakan klusterisasi industri hilir produk olahan berbahan baku karet di Provinsi Jambi dengan menggunakan tools MACTOR. Tahap 4. Menentukan strategi dan model integrasi kebijakan klusterisasi industri hilir produk berbahan baku karet di Provinsi Jambi.

D. HASIL PENELITIAN

1. a) Potensi hilirisasi karet di Jambi sangat tinggi namun belum optimal. Perlu pembenahan dari mulai hulu sampai hilir. Blok hulu perlu dilakukan penggunaan bibit bersertifikasi, replanting karet tua, pendampingan dan pelatihan. Blok hilir perlu melakukan pendampingan teknologi, dan pengembangan insentif dan regulasi;
- b) Kondisi eksisting hilirisasi karet menunjukkan bahwa hilirisasi belum berjalan masif dan optimal, kesiapan sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan, volatilitas agro-ekonomi karet, keterbatasan jangkauan pasar
2. Faktor kunci dalam melaksanakan opsi kebijakan hilirisasi karet di Provinsi Jambi yakni: pengembangan mekanisme insentif melalui insentif fiskal yang kondusif untuk

memberikan akses pasar yang luas, pengembangan di sisi penawaran berupa regulasi melalui de-regulasi aturan yang tidak kondusif serta mengembangkan regulasi yang mendorong investasi produk hilir.

3. *Stakeholder* yang terlibat dalam melaksanakan hilirisasi karet di Provinsi Jambi yaitu petani, pemerintah dan swasta. Berdasarkan analisis MACTOR menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan Dinas Perindag Provinsi berada pada pengaruh tinggi dan ketergantungan rendah. Sebaliknya petani memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dan pengaruh yang sangat kecil. Selanjutnya tengkulak memiliki pengaruh namun memiliki ketergantungan yang sangat kecil.
4. a) Tipologi Klasterisasi industri hilir produk olahan berbahan baku karet di Provinsi Jambi dapat digambarkan dalam tiga klaster, yaitu : Tipe A yakni kombinasi antara nilai dan voume, Tipe B yakni kombinasi antara nilai ekonomi dan pasar, Tipe C yakni kombinasi antara nilai ekonomi dan dampak pengganda;
b) Strategi dalam melaksanakan kebijakan hilirisasi keret di Provinsi Jambi dapat dibagi dalam empat kuadran yaitu : Strategi 1 (S1) atau Strategi Pengungkit (*leverage*), Strategi 2 (S2) atau Strategi Penguatan (*strengthening*), Strategi 3 (S3) atau Strategi Pengendalian (*Retrechment*), Strategi 4 (S4) atau Strategi Percepatan (*acceleration*).

E. REKOMENDASI

Rekomendasi dari penelitian berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa entry point dari hilirisasi adalah skema insentif dan dukungan regulasi :

- 1) Disarankan segera dikembangkan skema insentif berupa instrument-instrumen fiskal yang mendukung melalui kerja sama antar Lembaga atau pengembangan suku bunga

pinjaman yang rendah, pengenduran pajak bagi investasi di hilir dan subsidi bagi petani di hulu merupakan beberapa mekanisme insentif tersebut.

- 2) Aspek regulasi pendukung merupakan salah satu entry point bagi hilirisasi karet, disarankan dibuatnya peraturan daerah yang mendukung percepatan hilirisasi karet di Jambi disertai perampingan birokrasi perizinan dalam investasi di hilir dan disertai dengan intervensi pemerintah daerah untuk menggunakan produk hilirisasi karet dalam daerah.
- 3) Perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Hilirisasi Karet Jambi (KKHKJ) yang bersinergi dalam kesatuan aksi dalam mewujudkan rencana aksi hilirisasi karet di Provinsi Jambi, sebagai *road map* jangka pendek.
- 4) Road map jangka menengah dan panjang disarankan : Perencanaan kawasan agroindustri karet (wilayah yang memiliki ketersediaan bahan baku, SDM yang pernah memproduksi dan memasarkan produk hilirisasi karet, diusulkan Kabupaten Muaro Jambi dengan pertimbangan dekat dengan ketersediaan bahan baku, SDM petani telah melakukan pengolahan dan pemasaran hasil produk hilirisasi yang telah bervariasi serta telah eksis dalam penetrasi pasar, kedekatan dengan Kota Jambi sebagai Ibu Kota Provinsi Jambi, telah memiliki konektivitas pasarnya sendiri, namun demikian masih perlu pendampingan, revitalisasi mesin dan peralatan, infrastruktur termasuk ketersediaan listrik, dan permodalan.
- 5) Berpayung pada perpres No. 123 Tahun 2016 tentang Juknis DAK fisik, dimungkinkan untuk diusulkan pembangunan SMK khusus teknik hilirisasi karet di Provinsi Jambi. SMK ini diharapkan dapat mendorong terciptanya *entrepreneur* yang menguasai secara teknis untuk mendukung hilirisasi karet di Provinsi Jambi. Tentunya ini perlu koordinasi lebih lanjut antara Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan Kemenristekdikti.

12

KAJIAN PELAYANAN PEMERINTAH KAB/KOTA TERHADAP MASYARAKAT DI KOTA JAMBI DAN KABUPATEN MUARO JAMBI

Tim Peneliti :

1. Joni Martin, SH., MH.
2. Raja Sarah Patricia, SE., M.Sc.
3. Dr. Zarmaili, MM.
4. M. Rialdi Syahputra, SE., ME.

A. LATAR BELAKANG

Secara teoritis, setidaknya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh Pemerintah, yakni fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*), fungsi pembangunan (*development function*) dan fungsi perlindungan (*protection function*) (Mote, 2008:9). Fungsi pembangunan dan perlindungan akan terselenggara dengan baik jika bertujuan untuk menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Di era otonomi daerah saat ini, komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pelayanan menjadi sangat penting, karena pemerintah daerah merupakan ujung tombak pelayanan publik yang diberikan mandat untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pelayanan yang prima (USAID, 2015:1). Komitmen dan kebijakan ini akan menjadi jelas ketika pemerintah daerah memasukkan program-program peningkatan pelayanan publik ke dalam perencanaan, baik jangka menengah (RPJMD, Renstra SKPD) maupun tahunan (Renja, RKA SKPD) (USAID, 2015:1).

Yang menjadi permasalahan adalah, komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah terkesan masih sangat rendah dalam

menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh Praktikno yang mengatakan bahwa "selama ini birokrasi telah mempersulit pelayanan publik yang seharusnya diperoleh masyarakat, sehingga mengakibatkan banyak fungsi aparat pemerintah menjadi tidak efektif" (CNN Indonesia 2016). Pada kesempatan lain Pratikno juga menyampaikan bahwa sulitnya pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia diakibatkan adanya regulasi yang membelenggu para petugas pelayanan sehingga tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan harus terabaikan (Korpri Online, 2016).

Ombudsman RI sebagai lembaga negara dalam pengawasan pelayanan publik merilis hasil penilaian terhadap kepatuhan Pemerintah dalam pemenuhan komponen standar pelayanan di 25 kementerian yang menunjukkan bahwa sebanyak 44% kementerian masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi, 48% kementerian masuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang dan 8% kementerian masuk dalam zona merah dengan predikat kepatuhan rendah. Tidak berbeda dengan pemenuhan komponen standar pelayanan di 33 pemerintah provinsi (pemprov) yang menunjukkan bahwa sebanyak 39,39% Pemprov masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi, 39,39% pemprov masuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang dan 21,21% pemprov masuk dalam zona merah dengan predikat kepatuhan rendah, Provinsi Jambi masih berada pada kategori merah (50,41%). (Ombudsman RI, 2016).

Terkait belum optimalnya pelaksanaan pelayanan oleh pemerintah, hasil evaluasi Kementrian Dalam Negeri pada tahun 2014 terhadap indeks pelayanan publik dan pelayanan dasar di Provinsi Jambi, rata-rata kondisi pelayanan masih berada pada angka 60-61% (Joni dkk,2017).

Berdasarkan permasalahan di atas, kiranya perlu ditemukan penyebab utama kenapa pelayanan pemerintah masih menjadi keluhan bagi masyarakat, sementara sarana-prasarana dan

tanggapan dari pemerintah sudah dijalankan secara baik, apakah kesalahan terjadi pada identifikasi terhadap pelayanan, pelaksanaan pelayanan atau pada hasil evaluasi yang tidak diperhatikan oleh pelaksana pelayanan atau mungkin memang ada pengaruh dari pelaksana pelayanan dan faktor lain yang mempengaruhinya. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi terhadap pelayanan pemerintah kepada masyarakat terutama di beberapa kabupaten yang masuk dalam kategori rendah berdasarkan hasil penilaian dari pengawas pelayanan publik oleh pemerintah, sehingga misi Jambi tuntas untuk meningkatkan tatakelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik dapat dilaksanakan.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis gambaran umum pelaksanaan Pelayanan Pemerintah Kepada Masyarakat di Tinjau dari kelengkapan Insfratraktur Pelayanan berdasarkan UU No 25 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap Pemberian pelayanan oleh Pemerintah di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan bulan Februari – September 2017 yang bertempat di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian yakni metode Kombinasi (*Mixed Method*), yaitu kombinasi metode penelitian kualitatif dan kuantitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiono (2014). Populasi penelitian adalah masyarakat, OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi serta OPD lingkup Provinsi Jambi. Penentuan sampel OPD dilakukan secara bertahap (*multy stage*), kemudian untuk penentuan sampel masyarakat menggunakan metode *accidental*

sampling, yakni masyarakat yang kebetulan yang sedang berada diwilayah sampel penelitian dengan jumlah sampel masyarakat 100 orang.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Kuesioner, Wawancara, Observasi, Dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif, data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif.

D. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil observasi, secara umum kepatuhan Pemerintah Provinsi Jambi dalam melengkapi sarana prasarana pelayanan hanya 76%. Angka ini lebih baik dari hasil penilaian Ombudsman RI pada tahun 2016 yang meletakkan penilaian Provinsi Jambi pada angka 50,41%. Artinya ada keinginan OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi untuk memperbaiki kekurangan dalam pelayanan sehingga diharapkan masyarakat lebih puas dalam menerima pelayanan dari Pemerintah.

Dari hasil analisis, diketahui bahwa komponen indikator observasi seperti, toilet (kebersihan dan kelengkapan), ketersediaan sarana pengaduan (SMS/Telp/Fax/Email,dll) dan ketersediaan petugas penyelenggaraan menggunakan *ID Card* merupakan indikator yang memiliki nilai tertinggi yaitu 100 persen. Selain ketiga hal tersebut terdapat beberapa komponen indikator lainnya yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu ketersediaan visi misi dan meja atau kursi khusus tamu (ruang tunggu) dengan nilai 94,7 persen. Hal ini dapat dilihat bahwa semua instansi pemerintah melaksanakannya sesuai dengan visi dan misi yang dijalankan oleh setiap instansi sehingga instansi tersebut dapat meningkatkan kemajuan kinerja dari berbagai kegiatan sehingga akan mewujudkan visi dan misi.

Untuk pengetahuan petugas terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, tertinggi pada pemanfaatan Sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia yakni 100%.

kemudian petugas juga mengetahui bagaimana harus terampil dalam memberikan pelayanan. Namun hanya 15% petugas pelayanan yang mengetahui mengenai ISO 9001:2008, skor terendah lain yakni pengetahuan mengenai nilai rata-rata skor IKM dan tindak lanjut dari penilaian IKM oleh OPD, hanya 23% petugas yang mengetahui.

Sumber Daya Manusia merupakan indikator terbesar yang memberikan dampak terhadap pelayanan publik. Sumber daya manusia memiliki persentase sebesar 96 persen atau 53-56 pegawai menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap pelayanan publik. Sarana dan prasarana pelayanan juga memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan mutu pelayanan. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana pelayanan memberikan kontribusi sebesar 96 persen yaitu 58 pegawai menyatakan bahwa sarana dan prasarana pelayanan merupakan indikator terbesar setelah sumber daya manusia. Penanganan pengaduan merupakan salah satu indikator terhadap pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut didapatkan 71 persen dari 43 orang yang menyatakan bahwa penanganan pengaduan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik. Penanganan pengaduan akan memberikan respon positif terhadap peningkatan mutu pelayanan.

Untuk mengetahui kualitas pelayanan melalui persepsi masyarakat, digunakan teori Zeithaml, (1990) yang menyebutkan setidaknya ada 5 dimensi indikator dalam mengukur kepuasan masyarakat sebagai konsumen, yakni: *Tangibles*, *Reliability*, *Responsiveness*, *Assurance* dan *Empathy servqual*.

Berdasarkan analisis diketahui bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan yang tinggi terhadap bukti fisik (*tangible*), dengan nilai indeks sedang sebesar 73,35. Artinya ada pengakuan yang baik mengenai kelengkapan sarana-prasarana pelayanan oleh Pemerintah.

Kehandalan (*reliability*) menunjukkan kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang segera, akurat, dan memuaskan. Penelitian ini menggunakan 3 item kuesioner *reliability* untuk mengukur persepsi konsumen mengenai kehandalan pelayanan yang ada Kantor Pemerintah. Hasil tanggapan terhadap *reliability* (kehandalan) menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan kurang baik terhadap aspek kehandalan atau *reliability* dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, dengan nilai indeks sebesar 35,40. Artinya responden mendapatkan pelayanan yang kurang handal oleh dari petugas pelayanan. Kondisi demikian didukung masih adanya prosedur pelayanan yang kurang cepat dan kurang tepat, kurang perhatian, pelayanan yang tidak memuaskan dan pelayanan yang berbelit-belit pada beberapa instansi pelayanan.

Daya tanggap (*responsiveness*) adalah pemberian pelayanan kepada pelanggan dengan cepat dan tanggap. Penelitian ini menggunakan 3 item kuesioner *responsiveness* untuk mengukur persepsi masyarakat mengenai pelayanan petugas dalam menanggapi permintaan masyarakat. Analisis, menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan pendapat yang kurang baik terhadap daya tanggap dari Pemerintah, yaitu dengan nilai indeks sebesar 54,13. Artinya masyarakat memberikan penilaian kemampuan petugas dalam menanggapi permintaan masyarakat masih kurang optimal. Hal ini ditunjukkan oleh adanya sikap petugas yang cenderung membedakan setiap konsumen, menyelesaikan setiap masalah dilakukan dengan kurang tepat dan tidak tegas dan menyelesaikan setiap kebutuhan konsumen dilakukan dengan cepat dan tanpa ditunda.

Jaminan (*assurance*) dilihat dari pengetahuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh para pemberi jasa. Berdasarkan analisis, sebagian besar responden memberikan tanggapan kurang baik terhadap variabel jaminan (*assurance*) yang diberikan oleh Pemerintah, dengan nilai indeks sebesar 53,07. Artinya responden menilai adanya jaminan yang belum

baik yang diberikan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan. Hal ini didukung oleh adanya petugas yang kurang ramah dalam memberikan pelayanan, kemampuan dari karyawan dalam pengetahuan mereka serta kurang memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Kepedulian (*emphaty*) menunjukkan pernyataan tentang kepedulian dan perhatian kepada konsumen secara individual. Penelitian ini menggunakan 3 item kuesioner *emphaty yakni* Tersedia layanan 24 jam, petugas mengerti keinginan masyarakat, serta petugas mampu berkomunikasi dengan baik untuk mengukur persepsi konsumen mengenai perhatian yang diberikan oleh pemerintah. Analisis menunjukkan bahwa, sebagian besar responden memberikan tanggapan cukup baik terhadap kepedulian dan perhatian petugas dalam memberikan pelayanan yaitu dengan nilai indeks sebesar 63,00. Hal ini didukung oleh adanya perhatian yang cukup baik dari petugas pemerintah.

E. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian ini dapat direkomendasikan untuk peningkatan mutu pelayanan publik pemerintah terhadap masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sederhana bagi aparatur Pemerintah yang melaksanakan pelayanan bagi masyarakat.
2. Setiap instansi Pemerintah harus membentuk/menunjuk pejabat dan/atau Tim pengelola informasi dan pengaduan, serta sarana dan prasana penunjang proses penyelesaian pengaduan masyarakat baik secara online maupun offline.
3. Perlu meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk memudahkan dalam proses pelayanan bagi masyarakat.

4. Perlu meningkatkan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan, baik dalam berkomunikasi, berpenampilan serta bersikap.
5. Membuat komitmen yang kuat terutama bagi OPD yang terkait langsung dan memiliki volume yang tinggi dengan pelayanan masyarakat.
6. Setiap instansi pelayanan harus melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, baik perbulan, triwulan maupun pertahun serta mengevaluasi hasil survey.
7. Untuk OPD yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, bisa dilakukan inovasi bidang pelayanan seperti, penggunaan Informasi dan Teknologi (IT) atau **e-Service**.
8. Pada beberapa kasus seperti petugas pelayanan yang ditempatkan di tingkat kecamatan, perlu dipertimbangkan peningkatan kesejahteraan, seperti biaya operasional khusus, sehingga mengurangi resiko pungli dan hal-hal lain yang menghambat pelayanan kepada masyarakat.
9. Membentuk tim “jemput bola” langsung ke masyarakat, seperti dalam pelayanan akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Serifikat Tanah, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Usaha dan sebagainya yang menyangkut usaha masyarakat. Hal ini sangat penting guna melegalisasi status masyarakat, dan mendukung peningkatan pendapatan daerah.

13

KAJIAN PENGEMBANGAN DESA INOVASI DAN MANDIRI DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN DI PROVINSI JAMBI (MODEL PENGEMBANGAN BUMDes GUNA MENINGKATKAN INOVASI DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT DI PROVINSI JAMBI)

Tim Peneliti :

1. Dr. Ir. Asnelly Ridha D. M.Nat Res Ecs
2. M. Rialdy Syaputra, SE., ME.
3. Ir. Elwamendry, M.Si.

A. LATAR BELAKANG

Kantong kemiskinan petani secara umum terbentuk di Provinsi Jambi, dimana sebanyak 39% penduduk miskin di Provinsi Jambi bekerja di sektor pertanian. Berdasarkan data statistic (BPS, 2015), jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi TAhun 2014 berjumlah 271.670 orang, meningkat dari tahun 2013 (281.750 orang) namun dilihat dari persentanya terhadap total penduduk menurun dari 8,42% (2013) menjadi 8,39% (2014). Guna mengentaskan kemiskinan ini dibutuhkan inovasi untuk mengembangkan kemandirian ekonomi, namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu factor penghambat paling dominan adalah investasi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan.

Salah satu lembaga yang diharapkan dapat mendorong kemandirian desa adalah BAdan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes diatur dalam UU No, 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini dijelaskan secara eksplisit dalam pasal 87 ayat (1) sampai (3) yang menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes yang

dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dan dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan.atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. TUJUAN PENELITIAN

- 1) Menggambarkan kondisi eksisting keberadaan dan pengelolaan BUMDes di Provinsi Jambi
- 2) Melakukan Pemetaan masalah, actor dan program paling berpengaruh untuk pengembangan BUMDes.
- 3) Merumuskan model dalam pengelolaan BUMDes menuju kemandirian masyarakat dan desa di provinsi Jambi

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan permodelan. Lokasi penelitian dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan sebagai berikut : 1. Lokasi mewakili wilayah Jambi bagian Barat, Tengah dan Timur, dan 2. Komoditi/potensi unggulan pada desa/BUMDes tersebut mewakili pertanian tanaman pangan/perkebunan, pariwisata/hutan rakyat dan peternakan/perikanan. Penelitian ini dilaksanakan di tiga desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu : Desa Dataran Kempas Kec. Tebing Tinggi (Kab. Tanjabbar), Desa Dusun Dalam Kec. Siulak (Kab. Kerinci), dan Desa Lubuk Beringin Kec. Bathin III Ulu (Kab. Bungo).

D. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukan pola pengembangan BUMDes yang terjadi di Provinsi Jambi merupakan pengembangan dari unit-unit usaha ekonomi Desa yang ada sebelumnya yang dirasa telah matang dan mandiri untuk dikembangkan. Pendirian dan pengembangan BUMDes di pedesaan tentunya akan dapat memfasilitasi desa menjadi deso otonom dan mandiri. Mayoritas

BUMDes di Provinsi Jambi baru berdiri pada tahun 2016, dengan jenis usaha yang dikelola pada sector perdagangan, simpan pinjam, pengoalahan air bersih, pasar desa, pengolahan sabut kelapa, kios pertanian, penggemukan sapi, persewaaan alat pernikahan, dll. Dari 349 BUMDes yang berdiri hanya 193 BUMDes yang aktif dan 156 BUMDes tidak aktif lagi. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes tersebut : 1. Keterbatasan SDM pengelola BUMDes yang memiliki jiwa kewirausahaan; 2. Fasilitas sarana dan prasarana yang minim; 3. Akses promosi dan pemasaran yang terbatas; 4. Terbatasnya kemampuan dalam administrasi pengelolaan usaha; 5. Belum dapat menggali potensi desa dengan baik, dan 6. Kelembagaan yang masih terkait dengan bantuan dari pusat.

Analisis menunjukkan narasumber di 3 (tiga) desa/BUMDes sepakat bahwa Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) merupakan actor penting untuk menggerakkan BUMDes, bersama-sama dengan ketua atau Direktur BUMDes itu sendiri. Bahkan di BUMDes Karya Dermawan Desa Dusun Dalam Kec. Siulak Kab. Kerinci. Direktur BUMDes kurang berpengaruh dibandingkan kepala desa dan BPD itu sendiri. Para narasumber juga berpendapat bahwa pihak luar seperti LSM perannya kecil terhadap perkembangan BUMDes, termasuk juga dalam kategori ini lembaga/instansi pemerintah yang memiliki hubungan kerja dengan BUMDes. Dari sisi kendala terlihat adanya persamaan dimana umumnya ketiga BUMDes ini menghadapi masalah kualitas SDM sebagai kendala yang paling besar atau berpengaruh dengan merujuk kepada kualitas SDM pengelola baik dari segi manajerial BUMDes atau kepemimpinan. Modal BUMDes saat ini umumnya berasal dari APBDesa. Mereka mulai membangun kerjasama dengan pihak lain seperti perbankan, perusahaan swasta dan perguruan tinggi namun baru sebatas pelatihan/peningkatan keahlian pengurus dan masyarakat serta pemasaran. Dari sisi program atau aktivitas yang berpengaruh terhadap perubahan, narasumber umumnya berpendapat bahwa program-program yang terkait dengan SDM serta peningkatan

kualitasnya lebih penting dibandingkan program lainnya. Hal ini terlihat dari program-program yang mereka pilih sebagai pengaruh besar terhadap perubahan seperti rekrutmen pengelola BUMDes, pelatihan pemasaran, pelatihan SDM/kepemimpinan, pelatihan administrasi/akuntansi dan pelatihan kewirausahaan.

E. REKOMENDASI

- 1) Pemerintah Kabupaten menetapkan Peraturan Daerah (PERDA)/Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMdes sebagai Pedoman dalam pembentukan BUMdes dan payung hukum penguatan atas UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendesa, PDDT RI No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMdes dalam operasional di tingkat Kabupaten dan Desa.
- 2) Pembentukan *Pilot Project* BUMdes disetiap Kabupaten sebagai wadah pembinaan dan proses pembelajaran bagi desa-desa lain dalam pendirian dan pengembangan BUMdes.
- 3) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan perlu direkrut Tenaga Ahli/Mentor sebagai SDM yang akan mendampingi dan membina dalam menjalankan operasional pengelolaan BUMdes
- 4) Dukungan dari berbagai pihak (*stakeholder*) terakit dengan usaha BUMdes dalam bentuk menyediakan bantuan teknis, pembinaan dan pendampingan (*technical assistance and facilitation*) secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha.
- 5) Membangun pusat pemasaran khusus dan outlet untuk produk BUMdes.
- 6) Menyusun/menegakkan regulasi yang mewajibkan pasar modern untuk ikut memasarkan produk-produk BUMdes.

- 7) Menerapkan *linkage strategy* antara BUMdes penghasil bahan baku perantara dengan industry yang bergerak di sector hilir. Dalam konsep ini BUMdes berfungsi sebagai penyedia input bagi industri pengolahan akhir.
- 8) Pemerintah desa bersama pengurus BUMdes, Masyarakat mengkaji secara komprehensif potensi desa untuk membuka ruang terciptanya unit-unit usaha baru yang memungkinkan terciptanya lapangan kerja dan terbuka bagi masyarakat desa.
- 9) Pemerintah Desa dan Pengelola BUMdes dan masyarakat mampu menginisiasi dan mendorong untuk menciptakan keunggulan kompetitif desa, sehingga tercipta *one village one product*, berdasarkan diferensiasi hasil produksi, biaya produksi rendah (*low cost*) dan respons pada perubahan dan inovasi.

14

KAJIAN PENYELESAIAN KONFLIK BATAS WILAYAH PROVINSI JAMBI DAN KABUPATEN/KOTA

Tim Peneliti :

1. Dr. Zarmaili, MM.
2. Arfai, SH., MH.
3. Joni Martin, SH., MH.

A. LATAR BELAKANG

Kejelasan dan ketegasan atas batas wilayah tersebut menjadi bagian yang penting karena berhubungan erat dengan segala aktivitas dan perbuatan hukum masyarakat yang ada di wilayah tersebut serta tanggungjawab pemerintah provinsi atau kabupaten/kota atas wilayahnya. Ketidakjelasan batas wilayah atau dengan bahasa lain perbatasan antar daerah dapat menjadi penyebab lahirnya konflik horizontal, mulai dari yang berhubungan dengan persoalan pengelolaan sumber daya alam sampai pada persoalan batas wilayah baik antar kabupaten/kota maupun antar provinsi. Kondisi ini didasari bahwa daerah menjadi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayahnya. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengeksplorasi dan mengeksplorasi sumber daya di daerahnya.

Berkaca dari beberapa kasus yang terjadi akibat adanya pemekaran wilayah, Nurbadri (2008) dalam penelitiannya menyebutkan setidaknya ada 4 potensi masalah yang akan timbul ketika suatu wilayah dimekarkan, seperti : 1) perbedaan persepsi tentang undang-undang pemekaran wilayah; 2) perbedaan luas wilayah yang tidak seimbang; 3) keinginan sebagian masyarakat untuk bergabung dengan wilayah daerah tetangga, dan 4) adanya aset di daerah perbatasan yang diperebutkan.

Perbatasan merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu daerah, dan mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah administrasi, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Akan tetapi di wilayah perbatasan dapat terjadi konflik setiap saat karena akibat timbulnya keadaan yang sekilas tampak tidak berarti dan kecil sehingga terabaikan. Presiden RI melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan dalam Negeri, telah menginstruksikan kepada beberapa *stakeholder* untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan merespon secara cepat dan tepat semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial guna mencegah lebih dini tindak kekerasan.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Menggambarkan kondisi kekinian masyarakat di perbatasan wilayah Provinsi Jambi, Kabupaten/Kota.
2. Menganalisis potensi konflik sosial yang mungkin muncul dalam masyarakat di wilayah perbatasan Provinsi Jambi, Kabupaten/Kota.
3. Menemukan strategi yang bisa diterapkan untuk mencegah dan mengatasi potensi terjadinya konflik masyarakat di daerah perbatasan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2017, dengan teknik observasi, wawancara dan FGD sebagai sarana pengumpulan data. Hasil pengumpulan data dianalisis secara deskriptif dengan mengedepankan pola triangulasi sebagai teknik analisis.

D. HASIL PENELITIAN

Di Provinsi Jambi berdasarkan hasil analisis intensitas konflik terutama di wilayah perbatasan sangat kecil bahkan tidak ada, hal ini disampaikan oleh Kabag Batas Wilayah yang mengatakan bahwa “sampai saat ini di Provinsi Jambi terkait konflik mengenai perbatasan belum ada, walaupun ada hanya konflik sengketa lahan yang kebetulan berada di wilayah perbatasan”.

Secara substansial, variabel yang dilihat dalam penelitian ini adalah pada sudut pandang keadilan, dan kesetaraan serta kontrak sosial dalam masyarakat dengan memetakan tingkat intensitas konflik yang terjadi.

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner kepada responden ditingkat Pejabat Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa, Kepolisian dan Tokoh Masyarakat melalui kuisioner dengan meminta memberikan skor 1-9 terhadap masing-masing item indikator variabel diketahui bahwa ada 2 (dua) variabel yang berpotensi menimbulkan Konflik berdasarkan persepsi dari Para tokoh masyarakat yakni, Kepastian Batas Wilayah (30,56) dan pembangunan Insfratraktur (23,61). Jika diamati, ketiga variabel ini saling berkaitan antar 1 dengan yang lain.

NO	INDIKATOR VARIABEL	SKOR	KATEGORI
1	Hak Berpolitik	45.83	Sedang
2	Administrasi Kependudukan	47.22	Sedang
3	Kerukunan beragama	65.28	Baik
4	hubungan Masyarakat	65.28	Baik
5	kerukunan pemuda	61.11	Baik
6	kepatuhan terhadap adat	52.78	Sedang
7	Kesamaan Pelayanan Pemerintah	58.33	Sedang
8	Pelayanan Kesehatan	36.11	Kurang Baik
9	Pelayanan Pendidikan	47.22	Sedang
10	Keamanan	55.56	Sedang
11	Penegakan Hukum	48.61	Sedang
12	Perlindungan Hukumn	48.61	Sedang
13	Kepastian Batas wilayah	30.56	Kurang Baik
14	Hak kepemilikan tanah	44.44	Sedang
16	pembangunan ekonomi	45.83	Sedang
17	pelayanan perizinann	36.11	Tidak Baik
18	gotong royong	59.72	Sedang
19	Pembangunan Insfratraktur	23.61	Kurang Baik
20	kenakalan remaja	41.67	Sedang
21	status pertanahan	34.72	Tidak Baik
22	hak milik tanah	43.06	Sedang

1. Kepastian Batas Wilayah

Di Provinsi Jambi, berdasarkan data Biro Pemerintahan Provinsi Jambi, penetapan batas oleh Menteri Dalam Negeri pada segmen batas antar provinsi sudah selesai dilaksanakan walaupun masih ada 2 segmen yang belum selesai yakni batas wilayah Jambi dengan Sumatera selatan yang terdiri atas Merangin – Musi rawas utara, Sarolangun- Musi rawas utara, Sarolangun-Musi Banyuasin, Batanghari-Musi Banyuasin, Muaro Jambi-Musi Banyuasin, dan Tanjab Timur-Musi Banyuasin. Sementara untuk Sumatera Barat, Batas wilayah yang baru selesai dilakukan pene-gasan dan telah dilaksanakan penyampaian Dokumen ke Kementrian Dalam Negeri untuk diverifikasi adalah batas wilayah antara Kerinci – Solok Selatan dan Bungo-Dharmasraya.

Penetapan Batas wilayah telah dilaksanakan dan dalam proses di Kementrian Dalam Negeri, namun beberapa Instansi vertikal sering kali mengeluhkan belum keluarnya kepastian batas wilayah, seperti pihak Kepolisian yang berpendapat masih kurangnya pelibatan pihak vertikal dalam penentuan tapal batas, sehingga penetapan wilayah hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana menjadi terkendala. Begitu halnya dengan pihak BPN dan perusahaan swasta yang ingin mendapatkan izin mendirikan perusahaan.

Kepastian batas wilayah akan berdampak signifikan pada penyelesaian kasus-kasus hukum masyarakat, salah satunya berdasar-kan UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, BAB X Pasal 84, 85 dan pasal 86 menjelaskan bahwa “pengadilan negeri hanya berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan didalam daerah hukumnya”, artinya apabila perkara tindak pidana dilakukan diluar wilayah hukum pengadilan negeri, maka Pengadilan Negeri tersebut tidak berwenang untuk mengadili. Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan “pembagian

daerah hukum kepolisian diusahakan serasi dengan wilayah administrasi pemerintahan daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu”.

Dari beberapa analisis di atas dapat disimpulkan bahwa Kepastian hukum suatu wilayah sangat diperlukan terutama untuk melindungi masyarakat melalui penegakan hukum karena akan berpotensi menimbulkan konflik internal dalam penegakan hukum jika kepastian Batas wilayah tidak segera ditetapkan melalui Peraturan Perundang-undangan.

1. Pembangunan Fisik

Berdasarkan hasil penelitian di beberapa wilayah perbatasan (Desa Sirih Sekapur, Desa Singkut dan Desa sungai Penoban) ditemukan beberapa permasalahan ketidak seimbangan dalam pembangunan fisik oleh Pemerintah di daerah Perbatasan seperti kurangnya perhatian pemerintah dalam bidang pendidikan, perekonomian, pertanian dan penerangan.

Secara statistik, pembangunan beberapa sarana prasarana infrastruktur fisik di kecamatan dan desa yang berada di perbatasan terutama di desa penelitian, sarana pendidikan masih sangat minim, sehingga warga yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang menengah lanjutan (SMP) harus pergi keluar dari desa dengan jarak tempuh 10-15 Km. Berbeda dengan sarana pendidikan, rata-rata sarana kesehatan sudah memiliki beberapa infrastruktur sampai tingkat desa, sehingga warga masyarakat bisa cepat mengadakan permasalahan kesehatannya.

2. Pembangunan Non Fisik

Dalam UNDP (*United Nations Development Programme*), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*“a process of enlarging people’s choices”*). Sejumlah premis penting dalam pembangunan Manusia adalah 1) Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian. 2) Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep

pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja. 3) Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.

Di Provinsi Jambi pada umumnya, pembangunan Manusia sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Didalam visi misi Jambi Tuntas 2021, salah satunya disebut-kan bahwa misi dari program Jambi Tuntas adalah meningkatkan *kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender*, serta meningkatkan kualitas kehidupan berma-sarakat.

Berdasarkan RPJP 2005-2025 disebutkan bahwa Provinsi Jambi berkeinginan untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan dengan mengurangi ketimpangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang tertinggal, menanggulangi kemiskinan secara bertahap, menye-diakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pela-yanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, dan menghapuskan diskri-minasi dalam berbagai aspek kehidu-pan termasuk diskriminasi gender.

Berdasarkan hasil pengamatan di beberapa wilayah sampel, diketahui bahwa pembangunan di daerah perbatasan sebenarnya sudah mulai dilaksanakan oleh Pemerintah, seperti yang terlihat dalam hal pembangunan sarana pendidikan walaupun hanya tingkat sekolah dasar namun sudah terpenuhi, begitu juga dengan sarana kesehatan sudah ada namun masih belum optimal karena intensitas pembangunan yang mengarah kepada perkembangan wilayah perbatasan sebagai mata awal pembangunan suatu wilayah masih belum terlaksana dengan baik.

Strategi Yang Bisa Diterapkan Untuk Mencegah Dan Mengatasi Potensi Terjadinya Konflik Sosial Masyarakat di Daerah Perbatasan.

Sebagaimana hasil penelitian, ada potensi permasalahan yang dapat menimbulkan konflik ditengah masyarakat antara lain :

1. Kepastian batas wilayah (30,56)
2. Pengembangan pembangunan insfratruktur wilayah di daerah perbatasan (23,61)

Berdasarkan potensi-potensi di atas, ditentukan beberapa strategi untuk menyelesaikannya sebagai berikut:

- a. Penguatan Regulasi Pembangunan terkait dengan daerah Perbatasan, dengan kebijakan yang bisa diterapkan seperti, dibentuk Perda Prov/Kab/Kota tentang RPJM dan RTRW yang meletakkan dan memetakan pengembangan khusus daerah perbatasan. Melakukan sinkronisasi Perda antara Prov/kab/kota terkait dengan pembangunan dan pengembangan daerah perbatasan.
- b. Peningkatan jumlah dan kualitas pembangunan fisik dan nonfisik dengan kebijakan yang bisa diterapkan seperti, Mengalokasikan anggaran provinsi terkait dengan program pembangunan pada desa-desa di perbatasan provinsi; Membentuk tim gabungan yang terdiri dari pemerintah provinsi dan kab/kota untuk pengembangan pemba-ngunan pada desa-desa didaerah perbatasan Provinsi kab/Kota.
- c. Meningkatkan jalinan kerja sama antar desa-desa perbatasan di provinsi jambi dalam rangka memperkuat komunikasi, pembangunan dan pencegahan konflik sosial daerah perbatasan dengan kebijakan yang bisa diterapkan seperti, Membuat forum desa perbatasan Provinsi Jambi

E. KESIMPULAN

1. Kondisi kekinian masyarakat di wilayah perbatasan Provinsi Jambi, Kabupaten/kota, saat ini secara umum sudah baik terutama pada kondisi sosial budaya masyarakat.
2. Ada 2 potensi Konflik yang bisa muncul dalam masyarakat di wilayah perbatasan Provinsi Jambi, Kabupaten/kota terutama pada kepastian batas wilayah dan pengembangan infrastruktur wilayah. Dari kedua aspek tersebut, pengembangan infrastruktur wilayah yang merata menjadi prioritas utama terjadinya konflik di masyarakat.
3. Ada beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk mencegah dan mengatasi potensi terjadinya konflik masyarakat di daerah perbatasan, yakni mempercepat penetapan batas wilayah oleh Kementrian dalam negeri, serta meningkatkan kualitas pembangunan fisik dan nonfisik oleh pemerintah.

F. REKOMENDASI

1. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota dapat melakukan pemantauan secara berkala terhadap pilar batas yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak, agar tidak terjadi pemindahan pilar batas oleh masyarakat atau orang yang tidak bertanggungjawab.
2. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten harus melaksanakan sosialisasi penetapan batas wilayah kepada masyarakat setempat dengan melibatkan instansi vertikal seperti Kepolisian, BPN dan lembaga lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pelayanan kepada masyarakat.
3. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten perlu melakukan sinkronisasi program pengembangan pembangunan serta komitmen bersama untuk mengalokasikan anggaran khusus pengembangan wilayah perbatasan sampai pada taraf

kesetaraan pembangunan dengan wilayah lainnya di Provinsi Jambi sesuai dengan Nawacita dan visi misi Jambi Tuntas 2021.

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, Kabupaten/kota segera melakukan koordinasi dan pemetaan terhadap potensi-potensi konflik sosial dimasyarakat, terutama bagi wilayah perbatasan.
5. Pemerintah Provinsi/Kabupaten perlu meningkatkan peran Lembaga Adat sebagai wadah utama dalam meningkatkan stabilitas kerukunan antar budaya dan adat terutama desa perbatasan Provinsi Jambi dan Provinsi tetangga.
6. Pemerintah Provinsi melalui Biro Pemerintahan perlu mempertimbangkan untuk membentuk forum komunikasi desa perbatasan

15

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN ANEMIA PADA REMAJA PUTRI DAN PROGRAM PENANGGULANGANNYA DI PROVINSI JAMBI

Tim Peneliti:

1. Novia Susianti, SKM, M.Biomed
2. Iswanto, SKM, MPH.RD
3. Raden Halim, SKM. MPH
4. Joni Martin, SH. MH

A. Latar Belakang

Masalah kesehatan dan gizi di Indonesia pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) menjadi fokus perhatian karena ternyata berdampak pada angka kesakitan dan kematian pada ibu dan anak, dan memberikan konsekuensi kualitas hidup individu yang bersifat permanen sampai usia dewasa. Timbulnya masalah gizi pada anak usia di bawah dua tahun erat kaitannya dengan persiapan kesehatan dan gizi seorang perempuan untuk menjadi calon ibu, termasuk remaja putri (rematri) (Kemenkes, 2016).

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 justru menunjukkan prevalensi anemia pada perempuan usia ≥ 15 tahun sebesar 22,7% (Balitbangkes, 2013), dan hasil penelitian di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan prevalensi anemia pada remaja putri yang cukup tinggi berkisar antara 32,4-79,2% (Kurniawan, dkk, 2016., Dea dan Apoina, 2014, Kirana, D.P., 2011, Isaati, 2014, Kalsum dan Halim, 2015). Fakta lain masih banyaknya umur perkawinan di usia muda (< 20 tahun) yaitu 46,7% dari semua perempuan yang telah kawin di Indonesia, dan sebanyak 54,2 per 1000 perempuan di bawah usia 20 tahun telah melahirkan (PMK Nomor 39 tahun 2016).

Provinsi Jambi merupakan provinsi dengan Angka Kematian Ibu (AKI) yang tercatat telah mampu ditekan, yaitu 90 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2013 dimana 40% disebabkan oleh perdarahan. Mengingat angka perdarahan masih cukup tinggi, tentunya hal tersebut sangat beresiko apabila ibu hamil mengalami anemia. Prevalensi anemia pada rematri di Muaro Jambi telah dilaporkan oleh Kalsum dan Halim tahun 2015 yaitu 67% dengan penyebab utama adalah kurangnya kebiasaan sarapan pagi. Isaat tahun 2014 juga melaporkan prevalensi penderita anemia pada remaja putri di Kota Jambi yaitu sebesar 78,7% dengan penyebab frekuensi makan yang kurang, konsumsi teh/kopi dan konsumsi makanan peningkat Fe yang kurang.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui status gizi dan prevalensi anemia pada remaja putri di Provinsi Jambi
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Penentuan alternatif strategi dan model pencegahan dan pananggulangan anemia pada rematri di Provinsi Jambi.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kombinasi model atau desain sequential explanatory, dengan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif secara berurutan.

Analisis statistik digunakan untuk mengetahui persentase anemia, status gizi dan faktor yang mempengaruhi kejadian anemia, mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia melalui uji *Chi-Square* dengan batas kemaknaan 0,05 dan *Confidence Interval (CI)* sebesar 95% (*p-value* 0,05), menentukan model faktor penentu kejadian anemia pada remaja putri di Provinsi Jambi melalui analisis logistik ganda.

Analisis kualitatif digunakan dalam menentukan strategi pencegahan dan penanggulangan anemia pada rematri di Provinsi Jambi melalui identifikasi faktor berdasarkan kriteria

Urgensi, Serious, Growth (USG), dilanjutkan analisis SWOT dan pemilihan alternatif strategi berdasarkan teori tapisan Mc. Namara.

Lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Kerinci, Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan sampel penelitian yaitu remaja putri berusia 15-18 tahun yang sedang menempuh pendidikan di SMA

D. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan prevalensi anemia pada rematri di Provinsi Jambi sebesar 60,45%, dengan status gizi mayoritas masih dalam kategori normal. Terdapat 11 dari 14 faktor yang terbukti berhubungan signifikan dengan kejadian anemia pada remaja putri di Provinsi Jambi yaitu status pekerjaan kepala keluarga, tingkat pendidikan ibu, pendapatan keluarga, kebiasaan sarapan pagi, faktor inhibitor, faktor inhancer, asupan energi, asupan protein, asupan Fe, asupan vitamin C, dan asupan vitamin A. Sedangkan faktor yang tidak berhubungan signifikan yaitu tingkat pengetahuan responden ($p=1.000$), riwayat penyakit infeksi, dan asupan vitamin B6.

Terdapat 5 faktor penentu kejadian anemia pada remaja putri di Provinsi Jambi yaitu pekerjaan kepala keluarga, asupan asupan Fe, asupan vitamin C, asupan vitamin A, dan konsumsi faktor inhancer. Dari kelima faktor tersebut, terdapat dua faktor dominan yang berhubungan dengan kejadian anemia pada remaja putri di Provinsi Jambi yaitu asupan Fe dan asupan vitamin C dengan nilai OR yaitu 26.427 dan 18.290. Selain itu, ditemukan adanya interaksi antara asupan vitamin C, vitamin A dengan Fe dalam menentukan kejadian anemia pada rematri di Provinsi Jambi.

Upaya pencegahan dan penanggulangan perlu segera dilakukan dengan strategi-strategi yang terangkum di dalam model pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri di Provinsi Jambi pada penelitian ini. Mengingat penyebab yang multifaktor, maka intervensi strategi tersebut memperhatikan faktor individu, lingkungan keluarga, lingkungan fisik yaitu sekolah

dan lingkungan makro yaitu kebijakan dan kerjasama lintas sektor. Untuk itu, strategi awal yang harus dilakukan yaitu mendapatkan dukungan kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri di Provinsi Jambi. Dilanjutkan dengan mewujudkan suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD) secara mandiri oleh keluarga yang dikoordinir pihak sekolah maupun melalui penyediaan, memperkuat program anemia sebagai bagian dari program UKS dengan pembentukan duta anemia di sekolah sebagai *role model* bagi siswa yang lain. Strategi penguatan program, koordinasi lintas sektor dalam program UKS dan dukungan pihak swasta serta lembaga masyarakat merupakan strategi selanjutnya.

Keberhasilan program pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri di Provinsi Jambi tentunya memerlukan dukungan banyak pihak, sehingga dukungan kebijakan dan kerjasama lintas sektor akan sangat menentukan keberhasilan program tersebut..

E. REKOMENDASI

1. Pihak sekolah bekerja sama dengan sektor kesehatan agar melakukan perekrutan dan pembentukan kader dan duta anemia di masing-masing sekolah melalui payung UKS, penyediaan TTD secara mandiri dan melaksanakan gerakan minum TTD secara serentak di sekolah, sarapan pagi bersama dan pemeriksaan Hb berkala di sekolah.
2. Pemda dalam hal ini Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Biro Kesramas pada tiap level (Provinsi, Kabupaten, Kota) melalui payung UKS mengkoordinir sektor-sektor yang terlibat dalam melakukan advocacy kepada pihak Bappeda dan program CSR terkait anggaran penyediaan TTD di kabupaten/kota masing-masing.
3. Pihak dinas kesehatan melalui Puskesmas dapat melakukan promosi kesehatan terkait pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja kepada sasaran program melalui

kegiatan upacara setiap hari Senin di sekolah dalam wilayah kerjanya.

4. Dinas Pendidikan memberi dukungan dan fasilitasi untuk pelaksanaan penguatan mata pelajaran terkait anemia oleh guru mata pelajaran terutama IPA dan olahraga pada topik sistem pencernaan.
5. Pihak BKKBN agar dapat membuat program/kegiatan pencegahan dan penanggulangan anemia di dalam kegiatan kesehatan reproduksi remaja termasuk penelitian dan pengembangan.
6. Dinas Kesehatan Provinsi diharapkan dapat melakukan advocacy anemia.
7. Kepada Kementerian Kesehatan terkait penyediaan TTD dan program pencegahan dan penanggulangan

16

PENINGKATAN KUALITAS DAN MUTU PENDIDIKAN SERTA TENAGA PENDIDIK DI PROVINSI JAMBI (PENINGKATAN KOMPETENSI PROFESIONAL DAN PEDAGOGIK GURU SMA DI PROVINSI JAMBI)

Tim Peneliti :

1. Urip Sulisty, S.Pd., M.Ed., Ph.D.
2. Septu Haswindy, S.S., M.Si.
3. M. Rialdi Syahputra, SE., ME.

A. LATAR BELAKANG

Guru mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan, sehingga perlu dikembangkan sebagai tenaga profesi yang bermartabat dan profesional. Guru yang profesional akan menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang berkualitas dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) dijelaskan pada pasal 28 ayat 3 bahwa ada empat standar kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yang profesional, yaitu: Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Profesional, dan Kompetensi Sosial.

Provinsi Jambi, yang terdiri dari 9 (sembilan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota terdapat 210 Sekolah Menengah Atas baik negeri maupun swasta yang tersebar di 9 Kabupaten dan 2 Kota. Sedangkan jumlah guru yang mengajar pada jenjang pendidikan menengah atas ini adalah sebanyak 5137 orang. Secara kualifikasi pendidikan, berdasarkan data dari PDSPK tahun 2016, guru SMA di Provinsi Jambi telah baik dimana 97,4% guru SMA

berpendidikan minimal Sarjana. Hasil uji kompetensi guru tahun 2015 menunjukkan Provinsi Jambi berada pada peringkat 22 dengan nilai rata-rata 52,25 dan nilai tersebut berada dibawah rata-rata nilai nasional, yaitu 56,69.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui gambaran kompetensi profesional dan pedagogik guru SMA di Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru SMA di Provinsi jambi dalam usahanya meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogik.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode campuran dimana populasi penelitian ini adalah Sekolah Menengah Atas di Provinsi Jambi yang terdiri atas 2 Kota (Kota Jambi dan Kota Sungai penuh) dan 9 kabupaten (Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci). Sampel dipilih berdasarkan nilai Uji Kompetensi Guru dengan kriteria nilai tertinggi, menengah dan terendah. Teknik pengambilan sampel adalah purposive, masing-masing dipilih satu Kabupaten/Kota. Adapun Kabupaten atau Kota yang menjadi sampel penelitian

Ada dua cara pengumpulan data dalam penelitian ini; pertama, melalui Diskusi Kelompok Terarah atau biasa dikenal dengan FGD (*Focus Group Discussion*) dan kedua adalah angket. Pelaksanaan FGD dibagi menjadi dua kelompok; pertama, kelompok Pengawas Sekolah dan kedua, kelompok Kepala Sekolah pada setiap daerah sampel penelitian. FGD dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akan menjawab pertanyaan penelitian yang kedua dan ketiga.

D. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil olah data dari angket yang sebarakan kepada guru, sebagai responden penelitian, terdapat beberapa aspek dari kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru SMA di daerah sampel penelitian yang layak untuk mendapatkan perhatian, yaitu : a) kemampuan guru untuk menciptakan kegiatan berbeda dalam menyajikan pembelajaran; b) menciptakan kegiatan berbeda dalam menyajikan materi; c) penerapan pembelajaran berbasis TI; d) penerapan mading atau media lain dalam pembelajaran; e) pembelajaran di luar kelas; dan f) penerapan role play dalam pembelajaran. Dari enam aspek dalam kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru di atas, secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan guru untuk menerapkan variasi dan metode pembelajaran masih sangat kurang.

Adapun kendala yang dihadapi oleh para guru SMA di Provinsi Jambi dalam rangka peningkatan kompetensi profesional dan pedagogic adalah minimnya metode dan variasi guru dalam pengajaran, belum memadainya sarana penunjang pembelajaran, masih minimnya pemanfaatan ti dalam proses pembelajaran, kurangnya pelatihan dalam upaya peningkatan kompetensi guru, optimalisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan kurangnya apresiasi terhadap guru yang kreatif dan berprestasi..

E. REKOMENDASI

1. Kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten serta pihak sekolah untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi guru yang langsung menyentuh aspek desain pembelajaran, model penilaian dan evaluasi, mengikatkan materi dengan pengetahuan lain, keterampilan menggunakan alat pembelajaran strategis teknologi informasi dan melakukan analisis hasil evaluasi.

2. Mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dengan cara mengoperasikan penggunaan media *audio visual, media player, komputer* dan internet sehingga suasana pembelajaran menjadi efektif, inspiratif dan produktif.
3. Melaksanakan penelitian tindakan kelas (*class room action sesearch*) dan mempublikasikan hasil penelitiannya.
4. Terkait dengan system penilaian guru, adalah perlu dibuat indeks kualifikasi guru berdasarkan kesesuaian ijazah dengan standar persyaratan minimal dan bidang ajar, perlu dibuat tindeks kompetensi guru (professional, pedagogic, kepribadian dan sosial) dimana seluruh aspek penyusunan indeks tersebut diperoleh melalui suatu penilaian yang transparan dan akuntabel, meliputi penilaian diri sendiri, siswa, guru, pengawas sekolah, kepala sekolah, MGMP, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Organisasi Profesi.
5. Optimalisasi peran MGMP melalui kegiatan menyediakan pembina yang professional (tutor) yang dapat membimbing dan membantu guru dalam meningkatkan kinerja mengajar dan meningkatkan kompetensi professional mereka.
6. Untuk meningkatkan kompetensi baik kompetensi pedagogic maupun propesional guru SMA di Provinsi Jambi dapat dilaksanakan Pendidikan dan pelatihan yang berupa : a. In-house training (IHT); b. Kemitraan sekolah; c. Belajar jarak jauh; d. Kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya, dan e. pembinaan internal oleh sekolah.

17

KUALITAS ANGKATAN KERJA DAN KESEMPATAN KERJA DI PROVINSI JAMBI

Tim Peneliti :

1. Adi Rahman, SE., ME.
2. Dr. Susi Desmaryani, SE., MM.
3. Dr. Junaidi, SE., M.Si.
4. Dr. Zulfaneti, SE., M.Si.

A. Latar Belakang

Masalah ketenagakerjaan saat ini merupakan masalah nasional yang tengah dihadapi bangsa Indonesia. Globalisasi menghapus batas-batas antar negara, berdampak pada serbuan tenaga kerja asing yang tidak dapat dihindari dan menjadi ancaman bagi tenaga kerja Indonesia, jika kebutuhan pasar tenaga kerja tidak dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia dengan alasan tidak memiliki kompetensi, maka pasar kerja akan banyak diisi oleh tenaga kerja asing, dan akan menimbulkan permasalahan yaitu terjadinya pengangguran.

Seiring dengan berubahnya lingkungan makro ekonomi mayoritas negara-negara berkembang, angka pengangguran yang meningkat pesat terutama disebabkan oleh "terbatasnya permintaan" tenaga kerja, yang selanjutnya semakin dicituk oleh faktor-faktor eksternal seperti memburuknya kondisi neraca pembayaran, meningkatnya masalah utang luar negeri dan kebijakan lainnya, yang pada gilirannya telah mengakibatkan kemerosotan pertumbuhan industri, tingkat upah, dan akhirnya, penyediaan lapangan kerja (Todaro,2000)

Hasil penelitian Randang (2011) menemukan Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia saat ini sedemikian buruk, baik dari segi kualitas pendidikan, pengalaman, ketrampilan dan keahlian, hal ini yang menyebabkan daya saing Tenaga Kerja Indonesia (TKI) lebih rendah dibandingkan Tenaga Kerja Asing (TKA). Daya saing tenaga diukur dengan menggunakan indikator pendidikan, produktivitas, dan upah.

Dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), rendahnya daya saing tenaga kerja Indonesia ini justru menjadi ancaman yang merugikan Indonesia. Hal ini karena kebebasan mobilitas faktor produksi (modal dan tenaga kerja) merupakan hal yang dipersyaratkan dalam MEA. Dengan kata lain jika tidak bisa bersaing, Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi negara-negara utama ASEAN lain, khususnya dalam konteks arus bebas tenaga kerja terampil/profesional (*freeflow of skilled labor*).

Pertumbuhan ekonomi pada umumnya akan menyediakan lapangan pekerjaan, karena sektor-sektor ekonomi memerlukan tenaga kerja, karena Tenaga kerja merupakan faktor yang terpenting dalam proses sarana produksi, daripada sarana produksi lain seperti bahan mentah, tanah, air, dan sebagainya (Priyono dan Akhmad Susanto, 2013).

Ironisnya yang terjadi, perkembangan sektor ekonomi dalam melaksanakan proses pembangunan tidak diiringi penyerapan jumlah tenaga kerja yang besar, hal ini disebabkan proses pembangunan sudah menggunakan teknologi, banyak pekerjaan yang menggunakan tenaga manusia telah digantikan oleh tenaga robot.

Kondisi seperti ini bertentangan dengan teori pertumbuhan ekonomi neo klasik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi diantaranya modal, tenaga kerja dan teknologi (Sukirno, 2001).

Ketika teknologi sudah mewarnai pertumbuhan pembangunan, perkembangan tenaga kerja menjadi masalah untuk mengimbangi perkembangan teknologi, artinya ketergantungan terhadap tenaga kerja dapat dialihkan kepada penggunaan teknologi, yang diperlukan dari tenaga kerja tidak lagi berupa kuantitas tetapi sudah mengarah pada kualitas. Untuk itu pasar tenaga kerja dalam pertumbuhan ekonomi yang diwarnai dengan kemajuan teknologi hanya akan menerima tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja.

Provinsi Jambi juga memiliki permasalahan dalam hal ketenagakerjaan, adapun permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Jambi antara lain yaitu: Adanya kesenjangan antara jumlah penawaran kesempatan kerja dengan jumlah pencari kerja dan Kualitas Angkatan kerja yang masih rendah.

Saat ini Provinsi Jambi masih memiliki kualitas tenaga kerja yang rendah dimana pencari kerja masih didominasi oleh tamatan SLTA, bahkan masih banyak yang memiliki tamatan SLTP dan SD. Tabel dibawah ini menggambarkan kondisi pengangguran terbuka menurut kabupaten / kota dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Tabel 1. Penduduk Jambi berumur 15 tahun keatas yang termasuk pengangguran terbuka menurut kabupaten / kota dan Pendidikan tertinggi yang ditamatkan (Agustus 2015)

Perkotaan +
Perdesaan

NO	Kab/Kota	Belum Tamat SD	SD	SLTP	SMA	D1/II/III/A KADEMI/ UNIVERS ITAS	Total
1	Kerinci	0	249	905	1282	2179	4615
2	Merangin	492	1935	163	5169	1261	9020
3	Sarolangun	0	1163	564	4151	324	6202
4	Batanghari	211	91	1274	1808	619	4003
5	Ma. Jambi	328	392	1541	6858	391	9510
6	Tj. Timur	204	0	559	773	0	1536
7	Tj. Barat	772	866	212	2110	0	3960
8	Tebo	85	844	238	2031	82	3280
9	Bungo	112	274	1316	1741	1174	4617
10	Kota Jambi	0	1282	1662	11251	5903	20098
11	Kota Sei. Penuh	553	545	293	1468	649	3508
	Total	2,757	7,641	8,727	38,642	12,582	70,349

Sumber : BPS Jambi (Sakernas 2015)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengangguran di Provinsi Jambi didominasi oleh lulusan SMA sederajat yaitu sebanyak 38.642 orang, disusul oleh lulusan diploma dan sarjana yaitu

sebanyak 12.582 orang dan selanjutnya lulusan SMP sederajat sebanyak 8727 orang, SD sebanyak 7641 orang dan Tidak tamat SD sebanyak 2757 orang. Data di atas juga menunjukkan bahwa pengangguran di Provinsi Jambi bukan hanya terjadi pada mereka yang berpendidikan rendah tetapi juga yang berpendidikan tinggi yaitu lulusan Diploma dan Sarjana. Hal tersebut menggambarkan bahwa pengangguran terdidik di Provinsi Jambi cukup tinggi.

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan Menganalisis gambaran kualitas angkatan kerja dan kesempatan kerja di Provinsi Jambi
2. Mengetahui dan Menganalisis daya serap tenaga kerja di 17 sektor Lapangan Usaha
3. Mengetahui dan Menganalisis Faktor-faktor penyebab tidak mampunya tenaga kerja untuk mengisi peluang kesempatan kerja baik di daerah setempat (lokal), luar daerah atau luar negeri.
4. Mengetahui dan Menganalisis program-program pemerintah dalam menciptakan tenaga kerja yang berkualitas

C. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan merupakan data primer yang bersumber dari wawancara pegawai Sosnakertran yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, pencari kerja dan stakeholder terkait serta data sekunder yang bersumber dari Dinas Sosnakertrans, UPTD BLK, BPS Provinsi Jambi dan studi kepustakaan.

Dalam menganalisa dan menginterpretasikan data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisa deskriptif dan analisa statistik/verifikatif.

D. HASIL PENELITIAN

1. Secara rata-rata dari seluruh lapangan usaha yang mampu mendongkrak pertumbuhan lapangan kerja hanya sekitar 24 %, sebanyak 30,3 % memiliki potensi namun pemerintah belum mampu mengolah potensi tersebut untuk menjadi produk yang mampu menyerap tenaga kerja dan sisanya 45,7% pada umumnya kabupaten dan kota memiliki lapangan usaha yang bukan sektor basis atau sektor unggulan dan diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah pada sektor tersebut.
2. Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program terkait dengan peningkatan kualitas angkatan kerja baik melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal. Meskipun demikian pelaksanaan kebijakan dan program tersebut mengalami beberapa kendala baik yang terkait dengan keterbatasan sumberdaya manusia maupun sarana-prasarana.
3. Kesempatan kerja terbuka luas bagi angkatan kerja di provinsi Jambi baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional, ditingkat lokal dan nasional meliputi 17 sektor atau lapangan usaha. Di tingkat internasional yang sudah terbuka luas adalah MEA.
4. Memasuki pasar kerja bagi tenaga kerja diperlukan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Kompetensi adalah karakteristik, sikap dan perilaku dari orang-orang yang menghasilkan output kerja yang unggul. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kompetensi SDM.
5. Banyak faktor penyebab ketidakmampuan tenaga kerja untuk mengisi peluang kesempatan kerja ditingkat lokal, nasional maupun internasional antara lain : 1. Belum memiliki kompetensi yang jelas; 2. Produktivitas rendah; 3. Daya saing rendah; 4. Kurang kreatif; 5. Kurang inovatif; 6. Penguasaan

Aplikasi Komputer masih kurang; 7. Penguasaan Bahasa Asing masih kurang; 8. Budaya organisasi yang kurang mendukung, dan 9. Permodalan yang kurang untuk berwirausaha.

E. REKOMENDASI

1. Dinas Tenaga Kerja Perlu membuat database kondisi ketenagakerjaan berdasarkan tingkat pendidikan, kompetensi/keahlian, jenis kelamin, serta peluang dan kesempatan kerja menurut wilayah kabupaten/kota dan lapangan usaha/sektor yang ada.
2. Pemerintah Daerah perlu lebih meningkatkan perhatian kepada BLK dengan meningkatkan anggaran kegiatan pelatihan, Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelatih serta Fasilitas penunjang pelatihan
3. Balai latihan kerja perlu menyesuaikan kompetensi dan menerapkan SKKNI bagi setiap pelatihan yang diadakan. Dan juga mengacu pada standar kompetensi internasional bagi calon tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri.
4. Perlu peningkatan soft skill agar tenaga kerja memiliki etos kerja yang tinggi sehingga meningkatkan semangat dan produktivitas serta daya saing
5. Pemberian sertifikat kompetensi dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang dibuat oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)
6. Masing-masing pemerintah kabupaten dan kota harus meningkatkan kemampuan baik dibidang pengetahuan dan penguasaan tehnologi, agar sektor basis yang memiliki kontribusi tinggi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dengan membuat produk derivatif dari masing-masing sektor tersebut. Dengan demikian pemerintah harus meningkatkan kualitas SDM terhadap penguasaan IPTEKIN

7. Penguatan peran pendidikan kejuruan melalui sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai pendidikan kejuruan, peningkatan sarana prasarana, serta sumberdaya manusia pada sekolah kejuruan
8. Perlu *link and match* dunia pendidikan dengan dunia kerja/industri sehingga kurikulum yang dikembangkan berbasis kompetensi dan sesuai kebutuhan dunia kerja.
9. Pengajaran mata pelajaran kewirausahaan di Sekolah dan di BLK yang melibatkan praktisi (wirausahawan)
10. Pengembangan jenis pelatihan pada balai latihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja
11. Meningkatkan dan mendorong peran pihak swasta dan BUMN/BUMD untuk menyelenggarakan pendidikan keahlian (kejuruan) yang terkait dengan aktivitas bisnisnya.
12. Membentuk wadah/lembaga untuk peningkatan kerjasama dan komunikasi antara perusahaan, pemerintah dan lembaga pendidikan dalam pelaksanaan magang.
13. Perlunya sinkronisasi dan kordinasi program sehingga tidak overlapping (tumpang tindih).
14. Memperluas jaringan kerjasama dengan negara luar untuk pengiriman tenaga kerja ke luar negeri
15. Memfasilitasi lembaga-lembaga profesi serta lembaga pendidikan untuk dapat menyelenggarakan sertifikasi profesi secara lebih meluas sehingga dapat menjangkau lebih banyak angkatan kerja yang ada.

18

PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK MENUJU GENERASI MUDA BERKUALITAS DI PROVINSI JAMBI

Tim Peneliti :,

1. Dr.Susi Desmaryani,
2. Novia Susianti, S.KM., M.BIOMED
3. Dr. Hendra
4. Nofran, M.Psi.
- 5.

A. LATAR BELAKANG

Nawa Cita merupakan sembilan agenda prioritas pembangunan nasional yang dicetuskan bapak Presiden. Saat ini krisis karakter nasional menjadi salah satu agenda nawa cita dimana terobosan yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki karakter anak bangsa melalui revolusi karakter. Untuk itu implementasi Revolusi karakter dituangkan ke dalam RPJMN 2015-2019 dalam bentuk penguatan pendidikan karakter pada anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi kedalam mata pelajaran.

Pendidikan karakter juga ditegaskan dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan karakter harus diperhatikan dan diutamakan dalam dunia pendidikan agar peserta didik menjadi Marusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab

Peraturan Presiden no. 87 Tahun 2017 pasal 2 juga menekan dunia pendidikan sebagai tempat pembentukan karakter

dengan cara mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia dan merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Krisis karakter saat ini menjadi masalah nasional dan berdampak pada moral yang akan membawa pengaruh buruk baik bagi kehidupan individu sendiri maupun bagi keberlanjutan proses pembangunan bangsa kedepannya. Pemerintah melalui berbagai kebijakan telah menanamkan pendidikan karakter sejak usia dini baik dilingkungan formal maupun informal.

Krisis karakter juga telah terjadi di Provinsi Jambi dan telah dibuktikan dari hasil penelitian ekawati (2016) Beberapa hasil penelitian yang mengamati perkembangan karakter anak di Provinsi Jambi telah diteliti oleh Ekawati dkk (2016, data diolah) pada remaja Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di kota Jambi dengan total jumlah responden sebanyak 518 anak. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sebanyak 49% responden yang terdiri dari anak SMP, SMA dan SMK melakukan *bullying Verbal*, seperti suka mengejek teman, menertawakan teman, mencueki teman, mengancam, menggossip dan memfitnah teman. Sekitar 62% responden menyatakan melakukan *Bullying Fisik* seperti memukul, mencubit, menendang, menjegal, mendorong dan melempar dan 29% anak SMP, SMA dan SMK di kota Jambi juga melakukan *Bullying mental* atau psikis seperti menjauhi teman, mempermalukan teman dan memaksa teman membawa uang untuk diminta. Adapun alasan timbulnya perilaku *Bullying verbal*, fisik dan mental, menurut hasil penelitian Ekawati dkk

(2016) karena faktor balas dendam, lelucon, kesal, iseng, ikut-ikutan, iri, sakit hati, agar ditakuti, menguji mental dan tidak ingin diremehkan teman.

Hasil penelitian Ekawati dkk (2016) telah menggambar karakter yang tidak diinginkan yang tercermin dari perilaku *bullying*, dan sebab terjadinya *bullying*. tipe *bullying* yang ditemui berupa *bullying* verbal, *bullying* fisik yang sifatnya menyakiti dan *bullying* mental psikologi. Perilaku *bullying* ini jika dibiarkan akan berpengaruh terhadap kepribadian anak, terutama dalam mempersiapkan kepribadian anak bangsa yang berkarakter, merupakan modal dari pembangunan bangsa.

Selain perilaku *bullying*, fenomena lain yang ditemui di kota Jambi melalui hasil penelitian ekawati dkk (2016, data diolah) juga munculnya perilaku sek di kalangan anak sekolah terutama di kalangan anak SMP dan SMA, dimana sekitar 59% anak-anak remaja sudah bergandengan tangan dengan lawan jenisnya, berpelukan sekitar 36%, berciuman sekitar 39%, melakukan oral sekitar 9%, melakukan hubungan sek sekitar 10%, menonton film porno 53% dan masturbasi 30%. Penelitian Ekawati dkk (2016, data diolah) juga meneliti sumber porno penyebab terjadinya perilaku sek diantaranya sekitar 44% berasal dari media televisi, 72% dari internet, 48% dari handphone dan VCD sekitar 41%.

Perilaku menyimpang yang dialami oleh remaja di kota Jambi menggambarkan karakter remaja saat ini. Berdasarkan fenomena yang ditemui dari hasil penelitian (Ekawati;2006) menjelaskan gambaran karakter anak-anak remaja di kota Jambi, jika dibiarkan dan hanya dianggap sebagai perilaku anak nakal tentu akan merugikan anak itu sendiri maupun lingkungan sekitarnya dan akan menjadi masalah nasional yang mengakibatkan pada kemerosotan moral bangsa. Sementara Pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan bangsa yang sejahtera memerlukan Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan bermoral.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu kiranya upaya untuk membuat sebuah model pembentukan karakter dilingkungan keluarga dan lingkungan sekolah pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. sebagai pedoman bagi keluarga dan sekolah untuk menerapkan pendidikan karakter yang berorientasi membangun kerjasama antara orang tua, sekolah dan masyarakat untuk menghasilkan peserta didik yang berkarakter menuju Indonesia yang memiliki generasi muda berkualitas sebagai modal bangsa dalam melaksanakan pembangunan nasional

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui gambaran karakter pada anak Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Provinsi Jambi
2. Mengetahui pendidikan karakter yang diberikan oleh keluarga, sekolah dan masyarakat pada anak sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam mewujudkan generasi muda berkualitas
3. Mewujudkan model pembentukan karakter di lingkungan sekolah dan dilingkungan keluarga dan masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di 4 (empat) kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi. yaitu Kota Jambi, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penelitian dilakukan selama 5 bulan mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan November 2017.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian gabungan dengan model *sequential explannatory* yaitu menggunakan metode penelitian kombinasi secara berurutan dimana urutan pertama menggunakan metode kuantitatif dan urutan kedua menggunakan kualitatif. Jenis penelitian pada

metode kuantitatif adalah deskriptif sedangkan kualitatif menggunakan triangulasi.

Cara pengambilan sampel untuk wilayah berdasarkan *purposive sampling* dan responden berdasarkan acak random, dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengambilan sampel wilayah kabupaten berdasarkan topografi yaitu wilayah timur sampel wilayah yang dipilih Tanjung Jabung Barat mewakili daerah perairan laut, untuk wilayah barat sampel yang dipilih yaitu Kabupaten Kerinci mewakili dataran tinggi. Untuk wilayah bagian tengah sampel yang dipilih adalah Kabupaten Tebo berdasarkan banyaknya penduduk migran , dan kota Jambi dimana penduduknya heterogen terdiri dari berbagai suku.
2. Untuk pemilihan sekolah, dipilih sekolah yang telah ditunjuk oleh diknas sebagai sekolah berkarakter disetiap wilayah penelitian, dimana untuk Sekolah Dasar yang dipilih menjadi responden adalah kelas 6. Menurut Piaget (dalam Mulatiningsih,2011) usia 6 – 12 rentang usia perkembangan moral anak dan kelas 6 dianggap sudah mengerti dan merupakan gambaran akhir dari pendidikan karakter yang telah diberikan oleh sekolah Dasar. Sekolah Menengah Pertama dipilih kelas VII (memasuki usia mulai remaja).
3. Penentuan model pembentukan karakter di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat hanya mewawancara :
10 orang siswa SD dan 10 orang siswa SMP yang mempunyai peringkat 10 terbaik disekolah. Kemudian juga mewawancara orang tua dari siswa yang terpilih berdasarkan 10 peringkat terbaik tersebut. Guru-guru terkait metode pola pembelajaran karakter, kepala sekolah dan Peran masyarakat dinilai dari persepsi orang tua, guru dan kepala sekolah

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain di lakukan melalui wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, observasi, studi dokumentasi. Kemudian data

yang sudah terkumpul melalui angket dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Analisis data secara deskriptif dan melakukan Forum Group Diskusi untuk menentukan model pembentukan karakter anak dilingkungan keluarga dan lingkungan sekolah

D. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran karakter anak SD dan SMP di Provinsi Jambi secara umum dinilai dari lima karakter sudah masuk dalam kelompok siswa berkarakter. Namun ada beberapa indikator yang belum mengelompokkan siswa SD dan SMP dalam kelompok siswa berkarakter diantaranya adalah :
 - a. Indikator dari karakter toleransi yaitu teguh pendirian, percaya diri, anti buli, melindungi, sedangkan untuk siswa SMP indikator dari karakter cinta damai, teguh pendirian dan melindungi
 - b. Indikator dari karakter nasionalisme pada siswa SD dan SMP yaitu indikator dari karakter rela berkorban
 - c. Indikator dari karakter mandiri pada siswa SD yaitu indikator tangguh, belajar sepanjang hayat, tahan banting dan keberanian, sedangkan untuk siswa SMP tangguh dan belajar sepanjang hayat
 - d. Indikator dari karakter gotong-royong pada siswa SD yaitu indikator emphaty, anti kekerasan dan sikap kerelawanan, sedangkan untuk siswa SMP inklusif dan solidaritas
 - e. Indikator dari karakter integritas hanya siswa SMP yang belum bisa dikelompok dalam siswa berkarakter dari sisi indikator sub nilai anti korupsi
 - d. Antara siswa SD dan SMP, jumlah kelompok siswa yang berkarakter lebih banyak Siswa SMP dibandingkan SD
 - f. Terdapat pergesaran nilai-nilai karakter religius yang melekat pada siswa SD, SMP serta anak –anak SD dan

SMP yang memiliki prestasi di Provinsi Jambi. Dimana karakter religius yang melekat pada siswa SD menempati posisi ketiga setelah karakter nasionalisme dan integritas, siswa SMP menempati posisi ketiga setelah karakter integritas dan nasionalisme sedangkan untuk siswa SD dan SMP yang berprestasi menempati karakter religius pada posisi keempat setelah Integritas, nasionalisme dan gotong-royong. Hal ini berbeda dengan nilai-nilai karakter yang menjadi pedoman menurut kemendiknas dimana menempati nilai-nilai karakter pada urutan pertama karena nilai-nilai religius sangat penting sebagai pondasi dasar bagi untuk membangun kepribadian seseorang.

2. a. Pada umumnya siswa SD dan siswa SMP sudah berada pada kategori baik menerima pendidikan karakter di lingkungan keluarga, berupa fungsi cinta kasih yang diberikan oleh orang tua, fungsi melindungi, fungsi sosialisasi, fungsi pendidikan dan fungsi ekonomi, namun pada fungsi melindungi belum bisa dikatakan baik, karena pada indikator tersebut jumlah siswa baik SD dan SMP masih dalam kategori cukup baik dalam hal mendapat perlindungan dari dalam keluarga
 - b. Pendidikan karakter di lingkungan sekolah sudah berjalan dengan baik, rata-rata siswa SD dan SMP sudah menerima dengan baik, pemberian pendidikan karakter sudah terintegrasi dengan seluruh mata pelajaran.
 - c. Pendidikan karakter yang diberikan masyarakat lewat peran komite sekolah belum maksimal dilaksanakan, sehingga penguatan pendidikan karakter yang memfungsikan peran orang tua, sekolah dan masyarakat secara bersama-sama membentuk karakter anak masih perlu ditingkatkan.
3. a. Model pembentukan karakter anak merupakan implementasi dari 5 (lima) nilai-nilai karakter dengan internalisasi nilai

dari masing-masing peran keluarga, sekolah dan masyarakat. Pada peran masyarakat menekankan pada fungsi komite sekolah membangun program kemitraan dengan mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, dalam program Penguatan Pendidikan Karakter.

- b. Model pembentukan karakter menambahkan pelajaran muatan lokal, mengingat masing-masing daerah memiliki budaya yang berbeda dengan adanya mata pelajaran muatan lokal akan mengangkat nilai-nilai karakter berbasis potensi lokal
- c. Model pembentukan karakter menggunakan buku saku dan buku keliling yang berfungsi sebagai penghubung antara orang tua dan sekolah sehingga menjalin sinergisitas antara pola asuh orang tua di rumah yang melahirkan nilai-nilai dalam keluarga dan guru menjalankan fungsi sekolah melahirkan nilai-nilai sekolah.

E. REKOMENDASI

- 1. a. Orang tua harus memperkuat karakter religius anak yang lemah dengan cara :
 - 1) Mengajak anak sholat berjamaah bagi muslim, dan non muslim ke gereja atau kewihara dan tempat ibadah lain sesuai dengan keyakinan
 - 2) Memberi kewenangan penuh terhadap anak untuk mengambil keputusan tentang yang dia kerjakan dan hasil keputusan harus dibicarakan bersama tentang baik dan buruknya.
 - 3) Meluangkan waktu untuk makan bersama mengajak anak membicarakan teman-teman, keadaan di sekolah dan mendengarkan persamasalahan anak.

- 4) Menjaga dan mengawasi anak dari pengaruh kemajuan teknologi yang berdampak buruk bagi anak, contohnya dampak penggunaan gadget, jika digunakan diluar tugas sekolah.
- 5) Memantau dan mengawasi cara anak-anak berteman dan memilih teman-teman yang pantas bagi anak-anak. Misalnya teman-teman yang mampu memberi pengaruh perilaku baik bagi anak-anak.
- b. Satuan pendidik harus memperkuat karakter religius anak yang lemah dengan cara :
 - 1) Melakukan sholat dhuha dan sholat zhuhur bersama, proses implementasi dilakukan dikelas masing-masing dan setiap anak laki-laki ditunjuk secara bergiliran menjadi imam.
 - 2) Ditunjuk satu anak perkelas secara bergiliran selama satu minggu untuk bertanggungjawab untuk mengisi absen teman-temannya yang melaksanakan sholat dhuha dan dzuhur berjamaah.
 - 3) Mendidik anak-anak untuk memberi infak/shadaqah setiap hari sesuai dengan kemampuan
 - 4) Ditunjuk satu anak perkelas secara bergiliran menjalankan tugasnya selama seminggu untuk bertanggung jawab atas kebersihan kelas masing-masing
 - 5) Literasi dilakukan berkelompok sebelum masuk kelas dan setiap kelompok diminta untuk menjelaskan kembali setelah akhir pelajaran dikelas, untuk siswa SMP menjadi tanggung jawab guru yang memberi pelajaran di akhir jam pelajaran. Guru diminta untuk mengatur jam mengajar sehingga pelajaran literasi berkelompok dapat diterapkan.
 - 6) Setiap hari senin setiap peserta didik diminta untuk menceritakan kejadian selama satu minggu yang

dialami baik dirumah maupun diluar rumah tentang hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang tidak menyenangkan

- c) Peran Komite Sekolah harus memperkuat program kemitraan dengan orang tua, sekolah dan masyarakat dalam meningkatkan nilai-nilai karakter religius menitikberatkan dalam kegiatan :
 - 1) Bersama orang tua setiap 6 (enam) bulan sekali masing-masing kelas berkunjung ke panti asuhan memberikan bantuan dari uang infak atau shadaqah yang terkumpul.
 - 2) Setiap 3 (tiga) bulan sekali satuan pendidik bersama orang tua yang terlibat dalam komite medik membuat acara keagamaan dengan mengundang penceramah (kegiatan *parenting education*)
 - 3) Untuk menghindari kesalahpahaman orang tua terhadap sanksi-sanksi pada peraturan sekolah yang dilanggar, maka pihak sekolah membuat aturan sekolah diketahui dan disepakati orang tua untuk diterapkan kepada anak-anak mereka
 - 4) Guru bersama orang tua membuat group WA untuk saling tukar informasi agar komunikasi dapat dibangun secara intensif untuk menanyakan perilaku dan perkembangan peserta didik.
2. Untuk meningkatkan kompetensi guru, Dinas Pendidikan dan kebudayaan memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan karakter bagi guru-guru yang belum mengikuti pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), sehingga kegiatan belajar guru didalam kelas (dalam bentuk intrakurikuler) mampu meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, akhlak mulia serta ketrampilan peserta didik sehingga nilai-nilai karakter khususnya nilai karakter religius dapat di implementasikan pada mata setiap pelajaran.

3. Dinas Pendidikan menambah kurikulum pelajaran muatan lokal yang berorientasi pada pengembangan potensi daerah yang mengandung nilai-nilai karakter, misalnya mengenal sejarah pahlawan daerah, kesenian daerah dan lain-lain dari potensi daerah masing-masing, untuk itu diperlukan kebijakan pendanaan tentang sarana dan prasana yang mendukung mata pelajaran muatan lokal.
4. Menggerakkan dan meningkatkan kembali fungsi komite sebagai penghubung antara unsur orang tua dan unsur sekolah serta masyarakat dengan tujuan memberdayakan orang tua dan masyarakat. Untuk mengawasi perkembangan perilaku anak, maka komite sekolah sesuai dengan UU No.75 Tahun 2016 pasal 3 ayat 1 point d melakukan penggalangan dana dan sumber daya lainnya untuk membantu ketersediaan buku penghubung antara orang tua dan guru yaitu buku dan buku keliling sehingga arus komunikasi berjalan lancar.

19

KAJIAN PENINGKATAN STATUS PT. PLN AREA JAMBI MENJADI PT. PLN WILAYAH JAMBI

Tim Peneliti :

1. DR. H. Zarmaili, MM
2. Joni Martin, SH., MH.
3. Septu Haswindy, SS., M.Si.

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3 ayat 1 UU No. 30 tahun 2009 disebutkan bahwa "Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.

Penjualan Energi Listrik di Provinsi Jambi Periode 2011-2016 Terjadi Peningkatan Sebesar 11,1 % yang didominasi peningkatan pada Pelanggan Rumah Tangga Beban Puncak Tertinggi Provinsi Jambi sampai dengan Agustus 2017 sebesar 320 MW sedangkan daya mampu netto sebesar 635,3 MW Sistem Kelistrikan Provinsi Jambi Surplus sebesar 315,3 MW pada Agustus 2017.

Pada tahun 2015, PLN memperkirakan penjualan listrik di Jambi mencapai 1.666 GWH dengan beban puncak mencapai 328 MW dan jumlah pelanggan mencapai 653.016. Hingga tahun 2024, PLN memperkirakan jumlah pelanggan akan tumbuh

rata-rata 3,8% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan penjualan mencapai 11,3% per tahun. Untuk itu, diperlukan pertumbuhan produksi sebesar 11,5% per tahun dengan proyeksi beban puncak mencapai 835 MW pada tahun 2015.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Mendeskripsikan kesiapan PT. PLN Area Jambi dalam usaha melakukan peralihan status dari Area Jambi menjadi Wilayah Jambi.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh PT. PLN Area Jambi dalam usaha persiapan peralihan status Area Jambi menjadi Wilayah Jambi.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan rancangan penelitian *Mixed method*, yang menggunakan 2 pendekatan penelitian yakni Kualitatif dan Kuantitatif. Tahapan pertama merupakan penelitian yang bersifat kualitatif karena peneliti akan melakukan proses wawancara mendalam atau *indepth interview*, observasi dan dokumentasi sebagai sarana pengumpul data dan informasi kepada responden ditingkat lembaga Pemerintah dan PT PLN Area Jambi, guna menjawab kesiapan peralihan status PT PLN area menjadi wilayah di Provinsi Jambi secara umum.

Tahapan kedua merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif yang mempunyai tujuan untuk meletakkan teori secara deduktif sebagai landasan pemecahan masalah penelitian, serta menggunakan instrumen dalam hal ini kuisioner guna mengukur tingkat sensitivitas peralihan status PT PLN area menjadi wilayah di Provinsi.

Adapun lokasi dari penelitian ini berada di Provinsi Jambi dengan ruang lingkup penelitian di seluruh Area PT PLN di Provinsi Jambi. Penelitian dilaksanakan selama 8 bulan yang dimulai pada bulan April 2017 sampai dengan bulan November

2017, yang meliputi pelaksanaan pra penelitian, penelitian, dan laporan akhir penelitian.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah PT. PLN Area Jambi yang terdiri dari PT. PLN Area Kota Jambi dan PT. PLN Area Bungo, serta PT. PLN Ranting Sungai Penuh dengan sampel penelitian berada di kedua Area.

Adapun teknik yang digunakan dalam penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *survey* artinya kesemua populasi merupakan sampel penelitian. Sementara untuk menentukan sampel responden digunakan teknik *Purposif Sampling* dengan kriteria adalah responden yang mengetahui tentang status PT. PLN Jambi.

D. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari beberapa sisi, seperti Jumlah Area, pertumbuhan pelanggan dan daya mampu yang dimiliki oleh PT PLN Area Jambi, Peralihan status PT PLN Area Jambi Menjadi PT PLN Wilayah Jambi telah siap untuk dilaksanakan.

Terdapat beberapa kendala yang harus diperhatikan lebih lanjut ketika PT PLN akan dialih statuskan terutama peran pemerintah dan PT PLN itu sendiri dalam menjaga stabilitas pendapatan dan suplai energi sampai kemasyarakat, antara lain :

a. Kendala Teknis

- Masih belum terpenuhi kriteria N-1
- Potensi pelanggan yang belum tersambung sangat tinggi.
- Penyerapan energy yang belum maksimal
- Di beberapa wilayah masih mengalami kerugian, karena masih mengandalkan potensi Gas sebagai sumber energy sehingga ketika suplai gas berkurang maka akan berdampak pada penyaluran energy.

- Potensi Sumber energy besar namun belum mampu dikelola secara besar.
- Peran pemerintah daerah masih belum optimal dalam membantu PT PLN Area mensuplai energy ke masyarakat terutama masyarakat di wilayah terpencil.

b. Kendala Non Teknis

- Kebutuhan daerah terhadap peralihan status belum begitu besar, walaupun potensi infestasi di Provinsi Jambi kedepan akan lebih meningkat.
- Manajemen PT PLN masih menganggap Provinsi Jambi belum terlalu ideal untuk dilakukan peralihan status, karena masih bergantung dengan wilayah S2JB.

Berdasarkan kendala baik secara teknis maupun non teknis dalam melaksanakan perubahan status area menjadi wilayah, perlu dilakukan beberapa strategi sebagai berikut :

- a. Melakukan pengembangan insfratraktur sumber energy yang ada.
- b. Membantu PT. PLN Area untuk meningkatkan serapan energy ke masyarakat termasuk memberikan subsidi baik langsung maupun tidak langsung terkait penyediaan insfratraktur jaringan.
- c. Memaksimalkan intensitas pengembangan energy termasuk memanfaatkan pihak swasta dalam mengelola sumber energy baru dan terbarukan.

Dari beberapa strategi di atas, perlu kiranya Pemerintah Provinsi Jambi berkoordinasi lebih lanjut dan meyakinkan PT. PLN (Persero) bahwa investasi dan kebutuhan energy di Provinsi Jambi kedepan sangat besar, sehingga diperlukan peran yang besar dari PT. PLN yang tidak bisa diputuskan hanya sebatas Area.

E. REKOMENDASI

1. Untuk jangka pendek Sebaiknya Dinas ESDM Provinsi Jambi terus meningkatkan infrastruktur energi sedangkan untuk jangka panjangnya Dinas ESDM sebaiknya lebih fokus terhadap pengembangan Energi Baru dan Terbaharukan sehingga dapat menunjang kebutuhan energi listrik di Provinsi Jambi.
2. Badan Penanaman Modal dan Dinas ESDM sebaiknya bersama-sama menyusun potensi investasi di bidang energi khususnya energi listrik mengingat besarnya potensi energi alternatif dan peluang perindustrian serta perdagangan di Provinsi Jambi.
3. Melakukan pengembangan insfratraktur sumber energy yang ada.
4. Membantu PT PLN Area untuk meningkatkan serapan energy ke masyarakat termasuk memberikan subsidi baik langsung maupun tidak langsung terkait penyediaan insfratraktur jaringan.
5. Memaksimalkan intensitas pengembangan energy termasuk memanfaatkan pihak swasta dalam mengelola sumber energy baru dan terbarukan.

20

PENELITIAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN DI RPOVINSI JAMBI (KAJIAN REKLAMASI BEKAS GALIAN TAMBANG BATUBARA SEBAGAI LOKASI WISATA DI KABUPATEN BUNGO)

Tim Peneliti:

1. Dr. Ir. Asnelly Ridha D. M.Nat Res Ecs
2. Septu Haswindy, SS., M.Si.
3. Abdul salam, ST.

A. LATAR BELAKANG

Provinsi Jambi termasuk salah satu wilayah yang menghadapi masalah reklamasi tambang. Di beberapa daerah seperti Kabupaten Bungo dan Sarolangun banyak ditemui bekas galian tambang batubara yang ditelantarkan dan lama-lama menjadi kolam. Menjadikan kolam bekas galian tambang sebagai objek wisata air merupakan salah satu alternatif untuk mengelola lahan bekas galian tambang. Potensi bekas galian tambang batubara yang terdapat di Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Bungo untuk direklamasi menjadi objek wisata air (danau atau kolam pemancingan) terbuka lebar karena saat ini terdapat kolam bekas galian tambang yang telah menjadi perhatian warga serta sering dikunjungi seperti danau biru di Kecamatan Pelepat, Rantau Pandan, Bathin III Ulu dan Jujuhan

B. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menggambarkan kondisi sekarang bekas galian tambang batubara di Desa Rantau Pandan, Kecamatan

Rantau Pandan, Kabupaten Bungo dari sisi ekonomi, sosial dan ekologi

2. Untuk menganalisis persepsi masyarakat dan pemerintah daerah tentang prospek pengelolaan bekas galian tambang batubara sebagai lokasi wisata di Kabupaten Bungo serta alternative kebijakan yang diambil berdasarkan perspektif pakar
3. membuat konsep desain kolam bekas galian tambang batubara sebagai lokasi wisata di Kabupaten Bungo.

C. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dipilih secara purposif dengan kriteria sebagai berikut; a) Perusahaan yang dipilih harus memiliki rencana reklamasi tambang; b) Status lahan merupakan milik perusahaan berizin dan memiliki dana penjamin; c) Adanya tata guna lahan; d) Tersedianya akses jalan menuju lokasi; dan e) Memiliki daya tarik untuk dijadikan objek wisata, berbentuk kolam (genangan air) dan menurut pertimbangan tenaga ahli memenuhi syarat untuk dikembangkan sebagai objek wisata air/alam.

Sampel atau responden untuk penelitian ini sebanyak minimal 50 orang yang merupakan masyarakat sekitar kolam bekas-tambang terpilih (Desa Rantau Pandan). Semua pengunjung pada jangka waktu yang ditetapkan (4 minggu) otomatis menjadi responden penelitian.

Selanjutnya untuk tahapan FGD serta analisis SAST, responden/pakar yang dihadirkan mewakili pemerintah daerah, tokoh masyarakat, agama, kepala desa, serta pihak perusahaan tambang. Semuanya dipilih secara purposif berdasarkan kriteria utama yaitu mereka memahami permasalahan pertambangan dan/atau pariwisata

D. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Rantau Pandan membutuhkan sumber mata pencaharian yang lebih

menguntungkan mengingat hasil perkebunan dan pertanian tanaman pangan kurang memadai, sebagian disebabkan oleh kondisi lingkungan yang menurun akibat aktivitas pertambangan berupa kejadian banjir, longsor dan penurunan kualitas air sungai. Konflik yang tak terselesaikan antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan memperburuk kondisi di Desa Rantau Pandan.

Secara umum masyarakat menyambut baik ide menjadikan kolam bekas tambang sebagai lokasi wisata dimana dari 22 asumsi-asumsi strategis yang dinilai, menunjukkan sebanyak 18 asumsi masuk ke wilayah perencanaan pasti (*certain planning region*) dan hanya 4 asumsi yang termasuk ke dalam wilayah perencanaan bermasalah (*problematic planning region*). Lokasi eks pertambangan batubara di Dusun Rantau Pandan merupakan pertambangan terbuka memiliki karakter lanskap yang beragam dan bentuk *landform* yang indah sebagai suatu sumberdaya lanskap yang sangat potensial untuk pengembangan ekowisata berupa agrowisata dan konservasi.

Beberapa titik lokasi memiliki potensi dan permasalahan, bahkan beberapa titik juga merupakan lokasi berbahaya dan lokasi yang nyaman. Lokasi yang berpotensi digunakan untuk aktivitas agrowisata dan pusat-pusat kegiatan manusia, sedangkan lokasi yang bermasalah dilakukan konservasi baik dengan tanaman perkebunan maupun kehutanan. Konsep desain lanskap pasca tambang tapak adalah agrowisata dan konservasi.

E. REKOMENDASI

1. Mendorong Tim Terpadu (Timdu) penyelesaian konflik Kabupaten Bungo untuk menyelesaikan masalah antara pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar sehingga kewajiban/hak masing-masing pihak dapat diselesaikan serta penyusunan rencana berikutnya untuk menjadikan kolam bekas tambang sebagai objek wisata dapat dimulai.

2. Perlu dikeluarkan regulasi untuk mengatur pemanfaatan kolam bekas tambang di seluruh Kabupaten Bungo guna memperkuat regulasi dari pemerintah pusat serta memberi arah yang lebih jelas tentang tindak lanjut penanganan kolam bekas tambang yang terlantar.
3. Mengusulkan agar pengelolaan bekas tambang menjadi objek wisata diserahkan kepada masyarakat sekitar dan diiringi dengan langkah-langkah penguatan kelembagaan, pelatihan untuk masyarakat serta pendampingan dari pihak swasta dan pemerintah. Pemberian mandat kepada masyarakat sekitar sebaiknya melalui keputusan yang berkekuatan hukum.
4. Terkait dengan banyaknya perusahaan tambang yang beroperasi di Desa Rantau Pandan maupun Kecamatan Rantau Pandan, sebaiknya dana CSR perusahaan tersebut dikerahkan untuk mendukung pendanaan reklamasi tambang menjadi objek wisata ini.
5. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk memilih konsep wisata yang sesuai untuk daerah ini; apakah murni hanya mengelola kolam bekas tambang atau dipadukan dengan objek wisata lain (air terjun), landskap desa dan budaya masyarakat setempat.
6. Perlu dilakukan pendataan menyeluruh terhadap kolam bekas tambang yang terlantar yang merupakan *landform* buatan yang mendominasi di kawasan Rantau Pandan, untuk menjadi bahan pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tindakan yang tegas dari pemerintah Kabupaten Bungo (jika izinnnya dikeluarkan oleh Bupati) atau dari Gubernur Jambi (jika perizinan dikeluarkan oleh Gubernur Jambi).
7. Pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif dan budaya lokal perlu memperoleh pendampingan dari pihak terkait (khususnya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo) karena keberhasilan pengembangan suatu wilayah sebagai objek wisata tidak

terlepas dari aktivitas ekonomi pendukung pariwisata serta kekayaan budaya setempat.

8. Perlu kajian lanjutan untuk mengembangkan penelitian ini menjadi rencana kerja yang dapat diimplementasikan di Kabupaten Bungo. Pengembangan kolam bekas tambang di wilayah lain tidak sepenuhnya dapat mengadopsi hasil penelitian ini disebabkan perbedaan karakter landskep dan kondisi sosial, ekonomi serta lingkungan lainnya.
9. Pemerintah daerah disarankan untuk lebih teliti dan aktif dalam pembahasan dokumen AMDAL dan dokumen rencana reklamasi perusahaan pertambangan dan memasukkan/mempromosikan reklamasi pertambangan untuk tujuan pariwisata jika hal tersebut sesuai dengan kondisi awal lahan yang akan ditambang. Jika rencana reklamasi telah disinergikan dari awal, maka pembiayaannya bisa lebih ringan.
10. Bagi usaha tambang kecil yang memegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR), pemerintah daerah harus melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih kuat sebab pelaksanaan reklamasinya dilakukan bersama antara Pemerintah Daerah dan Pemegang IPR.

21

PENELITIAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KETAHANAN PANGAN (STRATEGI PENGEMBANGAN DISTRIBUSI BERAS LOKAL BERLABEL DI PROVINSI JAMBI)

Tim Peneliti:

1. Dr. Mirawati Yanita, SP., MM.
2. Weni Lestari, SP.

A. LATAR BELAKANG

Beras merupakan komoditas strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Distribusi beras sangatlah penting sebagai salah satu aspek ketahanan pangan. Distribusi yang lancar tentu saja akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan beras sebagai bahan pangan. Keberadaan 18 beras lokal berlabel tersebut kurang dikenal dan diminati masyarakat Provinsi Jambi, ditambah lagi sulitnya ditemui beras lokal berlabel tersebut di pasaran.

B. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui gambaran umum usaha beras lokal berlabel di Provinsi Jambi
2. Mengidentifikasi pola distribusi komoditas beras lokal berlabel di Provinsi Jambi
3. Untuk menganalisis strategi pengembangan distribusi beras lokal berlabel di Provinsi Jambi.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan secara *purposive* di empat (4) kabupaten/kota yang merupakan sentra produksi padi di Provinsi Jambi (Kabupaten Kerinci, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Kota Sungai Penuh). Penelitian ini menggunakan analisis Deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

D. HASIL PENELITIAN

1. Secara umum usaha beras lokal berlabel di Provinsi Jambi masih menemui kendala dan butuh pembenahan lebih lanjut. Permasalahan distribusi beras lokal berlabel di Provinsi Jambi disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat fisik dan non-fisik. Persoalan fisik terkait sarana dan prasarana transportasi angkutan barang, mutu, modal, selera dan pelabelan. Sementara penyebab yang bersifat non-fisik antara lain adalah adanya perilaku pelaku distribusi yang mempunyai kekuatan untuk mengendalikan pasokan beras lokal yang pada akhirnya bertujuan untuk mengendalikan harga, keterbatasan informasi pasar dan pembinaan dari Instansi terkait.
2. Distribusi beras lokal berlabel di Provinsi Jambi terdapat dua pola utama yakni yang melibatkan beberapa lembaga pemasaran seperti penggiling, pedagang besar, pengecer dan konsumen (berlaku untuk semua Kabupaten). Sedangkan pola kedua khusus hanya terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu dari penggiling langsung ke penyalur dan diteruskan ke tangan konsumen (Pegawai Negeri Sipil).
3. Strategi pengembangan distribusi beras lokal berlabel berdasarkan daya Tarik industri dan kekuatan bisnis masing-masing sentra secara umum adalah secara internal dan eksternal, dimana sebagai kekuatan bisnis diperlukan

peningkatan kapasitas gapoktan, penyalur dan pedagang (terutama pedagang kecil) mencakup kepemimpinan, keanggotaan, manajemen, kewirausahaan, permodalan dan struktur organisasi. Sedangkan dari factor eksternal daya tarik industri yang perlu diperhatikan dalam strategi pengembangan distribusi beras local ini adalah system informasi, relasi pasar, perluasan jaringan, permodalan, legalitas serta sarana dan prasarana. Tak kalah pentingnya adalah model kemitraan dalam perspektif *value chain*, mulai dari petani sampai ke pengecer dan konsumen, dengan dukungan pemerintah, lembaga keuangan dan lembaga penelitian.

E. REKOMENDASI

1. Distribusi yang dilakukan sebaiknya memperhatikan besaran kuantitas, kualitas dan kesinambungan, tepat jumlah, sasaran dan waktu kepada konsumen.
2. Menghimpun atau menginventarisasi ulang potensi dan data terkait beras local berlabel yang ada di Provinsi Jambi
3. Mengupayakan adanya regulasi seperti PERDA untuk memproteksi beras lokal.
4. Melakukan perhitungan pangsa, peluang dan target yang menjadi sasaran dalam pendistribusian beras berlabel oleh dinas terkait.
5. Mengupayakan legalitas atau perlindungan hukum atas produk yang dijual sehingga memenuhi kaidah sistem pelabelan produk pangan.
6. Penyediaan infrastruktur yang memadai di sentra pertanian menjadi prasyarat penting. Apabila terwujud, biaya distribusi beras lokal akan dapat ditekan.
7. Membangun sistem perlindungan kepada usaha beras lokal berlabel melalui subsidi bunga kredit.

8. Mendorong perusahaan/pemilik beras lokal berlabel untuk mengembangkan usahanya melalui pemberian insentif.
9. Memberikan pelatihan pasca panen kepada petani untuk meningkatkan mutu gabah sehingga dapat meningkatkan harga gabah di tingkat petani.
10. *Pricing policies* yang proporsional untuk produk lokal agar memiliki daya saing yang tinggi.
11. Melakukan pengawasan keluar masuknya beras, untuk memantau secara berkala dan berkelanjutan berapa ketersediaan yang ada, harga serta pasokan di pasaran yang tidak hanya dari produksi lokal.
12. Melaksanakan manajemen stok beras di tingkat daerah dan provinsi untuk menjamin keberlangsungan dan stabilitas pasokan beras bilamana terjadi bencana.
13. Perlunya koordinasi yang integratif antara sub-sistem produksi, sub-sistem logistik dan distribusi, dan sub-sistem konsumsi. Strategi distribusi yang baik tidak menjamin pelaksanaan di lapangan bila tidak ada integrasi antar sub system.
14. Dinas terkait mengupayakan untuk mendata jumlah Rice Milling Unit (RMU) yang sudah dimiliki oleh kelompok tani dan memberikan pembinaan rutin.

22

KAJIAN DAN EVALUASI KUALITAS BIBIT SAWIT BERKUALITAS DI PROVINSI JAMBI

Tim Peneliti:

1. Ir. Mukhlis, M.Si.
2. Dr. Lutfi Izhar, SP., M.Sc.

A. LATAR BELAKANG

Penelitian/Kajian dan Evaluasi Benih Kelapa Sawit Berkualitas di Provinsi Jambi, merupakan penelitian mendukung pengembangan kebijakan Pemerintah Daerah provinsi Jambi dalam mengatasi kendala pengembangan kelapa sawit rakyat di Jambi.

B. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui kondisi eksisting perbenihan kelapa sawit pada perkebunan rakyat di Provinsi Jambi
2. Mengetahui tingkat penggunaan benih kelapa sawit berkualitas pada perkebunan rakyat di Provinsi Jambi.
3. Menyusun strategi peningkatan penggunaan benih kelapa sawit unggul berkualitas pada perkebunan rakyat di Provinsi Jambi.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada tahun 2017 dengan melakukan survey lapang/pengambilan data primer dan penggunaan data sekunder yang dilakukan di beberap Kabupaten terpilih sebagai sentra pengembangan komoditas tanaman sawit seperti Tanjung

Jabung Barat, Merangin dan Bungo. Penelitian melibatkan beberapa desa terpilih dengan petani sebagai objek interview lebih dari 200 orang serta dilakukan FGD di tingkat kabupaten.

D. HASIL PENELITIAN

1. Tingkat penggunaan benih kelapa sawit berkualitas (unggul bersertifikat) di Provinsi Jambi selama tahun 2010 s/d 2015 termasuk dalam kategori rendah yaitu sebesar 30,66%.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penggunaan benih kelapa sawit unggul berkualitas pada Perkebunan Rakyat di Provinsi Jambi 1) pengetahuan petani tentang perbenihan kelapa sawit unggul berkualitas masih rendah, 2) kurang tersedianya benih kelapa sawit unggul berkualitas, 3) lemahnya modal usaha yang dimiliki petani 4) kelembagaan perbenihan masih lemah, 5) Penerapan peraturan perundang-undang perbenihan di daerah masih lemah.
3. Strategi peningkatan penggunaan benih kelapa sawit unggul berkualitas pada perkebunan rakyat di Provinsi Jambi adalah dengan memperbaiki kelemahan dan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan penggunaan benih kelapa sawit berkualitas pada perkebunan rakyat di Provinsi Jambi
 - a) Meningkatkan pengetahuan petani tentang teknis dan prosedur untuk mendapatkan benih kelapa sawit unggul berkualitas melalui sosialisasi institusi pembina perbenihan dan meningkatkan program kerjasama yang telah diluncurkan produsen benih .
 - b) Menggiring petani perorangan untuk berkelompok untuk mempermudah akses informasi, penyediaan benih dan permodalan
 - c) Penguatan modal usahatani melalui pemanfaatan dana pungutan ekspor CPO, Perbankan dan Dana Desa untuk mendukung kegiatan replanting kelapa sawit tua/kurang produktif.

- d) Membentuk dan/memperkuat kelembagaan perbenihan perkebunan dan meningkatkan kerjasama penyediaan benih dengan produsen benih unggul kelapa sawit berkualitas melalui program yang telah diluncurkan oleh masing-masing perusahaan

E. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian disarankan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dapat direkomendasikan sebagai berikut.

1. Meningkatkan pengetahuan petani tentang teknis dan prosedur untuk mendapat benih kelapa sawit unggul berkualitas melalui sosialisasi institusi pembina perbenihan dan meningkatkan program kerjasama yang telah diluncurkan produsen benih. Untuk mendukung strategi di atas direkomendasikan :
 - a. Melakukan Workshop tentang teknis produksi dan prosedur untuk mendapatkan benih kelapa sawit unggul berkualitas .
 - b. Menjadikan sebagai materi pelatihan penyuluh pertanian dan materi kunjungan ke kelompok tani.
 - c. Menyusun liflet Prosedur untuk dan kriteria benih kelapa sawit unggul berkualitas.
 - d. Memperluas jaringan kerjasama dengan perusahaan produsen benih kelapa sawit resmi melalui pengembangan program sawit rakyat (Prowitra)
2. Penguatan modal usahatani melalui pemanfaatan dana pungutan ekspor CPO, Perbankan dan Dana Desa untuk mendukung kegiatan replanting kelapa sawit tua/kurang produktif, untuk mendukung strategi di atas direkomendasikan

- a. Menggiring petani perorangan berkelompok dan menyusun proposal replating kelapa sawit tua/kurang produktif dalam rangka pemanfaatan dana pungutan ekspor CPO yang diperuntukan pengembangan kelapa sawit rakyat.
- b. Memanfaatkan dana sumber lain seperti dana desa dan perbankan berdasarkan kelayakan usaha yang dibiayai.
3. Membentuk dan/ memperkuat kelembagaan perbenihan perkebunan dan meningkatkan kerjasama penyediaan benih dengan produsen benih unggul kelapa sawit berkualitas melalui:
 - a. Mendorong terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) perbenihan perkebunan yang memiliki akses besar dalam penyediaan benih/bibit perkebunan unggul berkualitas unggul, pembinaan penangkar, pengawasan peredaran benih palsu
 - b. Melakukan kerjasama waralaba bibit di kabupaten potensial dengan perusahaan sebagai produsen benih kelapa sawit resmi melalui pembangunan outlet benih benih kelapa sawit unggul berkualitas.
 - c. Menyusun roadmap kebutuhan benih kelapa sawit di Provinsi Jambi.

23

KAJIAN POTENSI DAN PENINGKATAN MUTU KOMODITI UNGGULAN PROVINSI JAMBI

Tim Peneliti:

1. Dr. H. Zarmaili, S.Sg., MM.
2. Ir. Mukhlis, M.Si.
3. Joni Martin, SH. MH

A. LATAR BELAKANG

Di era otonomi daerah, pembangunan ekonomi lokal mestinya berbasis potensi lokal daerah. Skala prioritas unggulan daerah harus ditetapkan baik secara sektoral maupun skala lebih kecil yaitu jenis produk. Hal ini untuk lebih mengarahkan dalam memberi dukungan pencapaian peningkatan dalam memberikan dukungan perencanaan pembangunan, alokasi sumberdaya, tata ruang wilayah dan lainnya. Termasuk juga cara memasarkan produk sektor tersebut sehingga dapat diketahui dan menarik minat para investor dalam pengembangannya.

Provinsi Jambi yang kaya dengan produk unggulannya, hingga saat ini belum mampu menjadi sumber peningkatan hidup masyarakat. Potensi unggulan diperlakukan secara sangat tradisional dan hanya digunakan untuk kebutuhan hidup keluarga, belum dijadikan sebagai sumber pencarian dan dijadikan bernilai bisnis. Selain itu, proses pengolahan produk unggulan daerah Provinsi Jambi tidak banyak disentuh oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga claster produknya belum mampu bersaing baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Jambi masih belum banyak melindungi secara hukum produk unggulannya termasuk

produk Indikasi geografis, sehingga dengan mudah daerah-daerah lain untuk memanipulasi produk milik daerah Provinsi Jambi.

B. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Teridentifikasinya potensi unggulan daerah Provinsi Jambi
2. Tersusunnya peta komoditi unggulan daerah Provinsi Jambi.
3. Terbentuknya produk hukum komoditi unggulan Provinsi Jambi

C. METODE PENELITIAN

Metoda yang diterapkan pada kajian ini adalah *explorative study* yang teknik studinya menggunakan kombinasi antara : Studi Kepustakaan (*Library research*), difokuskan kepada literatur berkenaan dengan catatan inventaris data produk unggulan, produk Indikasi Geografis, daftar hasil cipta teknologi tepat guna, serta hasil kajian yang relevan dengan kegiatan ini baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan termasuk publikasi melalui internet.

Observasi lapangan (*Field research*), dengan pendekatan *expert explorative survey* atau *expert judgement* untuk menghimpun pendapat ahli yang berhubungan dengan tujuan kajian. Kegiatan ini dikaitkan dengan pengumpulan data primer di setiap pemerintah kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi dan melalui *Focus Group Discussion*.

Penelitian ini akan menggunakan Analisis *Location Quotient* (LQ), metode yang membandingkan porsi lapangan kerja/jumlah produksi/nilai tambah untuk sektor tertentu di suatu wilayah dibandingkan dengan porsi lapangan kerja/jumlah produksi/nilai tambah untuk sektor yang sama secara nasional. Tujuan metode LQ ini untuk mengidentifikasi sektor unggulan (basis) dalam suatu wilayah.

D. HASIL PENELITIAN

Dari data yang sudah dikumpul dapat disimpulkan Produk Unggulan Provinsi Jambi seperti Tabel di bawah ini.

Tabel. Produk Unggulan Provinsi Jambi

No	Nama Produk	Luas (ha)	Produksi	Rata-rata LQ
1	Padi	133.868	669340	2,90
2	Karet	665334	334463	1,40
3	Kelapa Sawit	476413	1031215	1,15
4	Kelapa Dalam	118543	104528	1,10
5	Kopi	29557	14741	1,05
6	Pinang	20694	12594	1,00

Sumber: data diolah 2017

Komoditi unggulan di Provinsi Jambi

1. **Padi** merupakan produk unggulan utama Provinsi Jambi. Hal ini dibuktikan bahwa di setiap Kabupaten dan Kota memiliki lahan padi sawah dan ladang dengan luas lahan 133.868 ha, dengan produksi 736.274 ton dan jumlah petaninya 612.670 jiwa. Perkiraan ini diperoleh dari asumsi bahwa sekitar 23,3% masyarakat Provinsi Jambi memiliki lahan padi dan menanam padi. Selain dari itu, sebagian besar penduduk Provinsi Jambi sangat berhajat dengan padi dan sebagiannya dapat dikomersilkan untuk biaya hidup. Wilayah sentar padi adalah Tanjab Barat, Tanjab Timur dan Kerinci.
2. **Karet**, dengan luas lahan 665.334 ha, produksi 334.463 ton dan jumlah petani 263.335 orang, hampir 8,5% penduduk di Provinsi Jambi bergantung hidupnya dengan produk karet terutama Kabupaten Merangin, Sarolangun, Bungo, Tebo,

Batnghari, Kota Jambi dan Muara Jambi, sedikit terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Kerinci.

3. **Kelapa sawit**, yang memiliki luas lahan 476.413 ha, dengan produksi 1031.215 ton dan jumlah petaninya 211.226 orang, wilayah sentranya adalah Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur.
4. **Kelapa Dalam**, rata-rata setiap kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi memiliki lahan Kelapa dalam yang ditanam di setiap pekarangan rumah dan perkebunan rakyat. Luas lahan 10.458 ha, dengan produksi 104.528 ton, terutama tersebar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Bungo, Tebo, Muaro Jambi dan Batanghari, jumlah petaninya sebanyak 94.016 orang.
5. **Kopi**, produk kopi juga terdapat di setiap kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi. Kopi di Provinsi Jambi terdiri dari tiga jenis yaitu, kopi Arabika, Kopi Rabusta, dan Kopi Liberika. Produk kopi telah banyak mengangkat taraf ekonomi masyarakat, seperti di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Merangin, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi. Luas lahan kopi di Provinsi Jambi adalah 16.144 ha, dengan produksi 14.661 ton dan dengan jumlah petani sebanyak 27.126 orang.
6. **Pinang** yang memiliki luas 20.694 ha dengan produksi 12.594 ton dan jumlah petani 28.497 orang.

Adapun daerah sentra produksinya dapat digambarkan pada tabel berikut:

No.	Komoditi	Luas lahan (ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani	Daerah Sentra
1	Padi (Sawah)	133.868	736.274	612.670	Tanjab Barat, Tanjab Timur, Kerinci
2	Karet	665.334	334.463	263.335	Bungo, Tebo, Sarolangun, Merangin, Batanghari, Muara Jambi
3	Sawit	476.413	1031.215	211.226	Muaro Jambi, Batanghari, Tanjabbarat, Tanjabtimur
4	Kelapa Dalam	10.458	104.528	94.016	Tanjabarat, Tanjabtimur, Bungo, Tebo
5	Kopi	16.144	14.661	27.126	Kerinci, Tanjabarat, tanjabtimur, Bungo, Merangin, Kota Sungaipenuh
6	Pinang	20. 694	12.595	28.497	Tanjabbarat, Tanjab Timur, Muara Jambi, Batanghari

Sumber. Data diolah 2017

E. REKOMENDASI

Untuk pengembangan komoditi unggulan Provinsi Jambi, kedepan dapat disarankan adalah sebagai berikut:

1. Membuat peta dan menetapkan pemetaan wilayah basis komoditi unggulan Provinsi Jambi.
2. Menetapkan kekuatan hukum komoditi unggulan Provinsi Jambi baik dalam bentuk, SK Gubernur, Peraturan Gubernur maupu Peraturan Daerah.
3. Menetapkan wilayah pengembangan dan pembangunan komoditi unggulan Provinsi Jambi, agar tidak terjadi pengembangan dan pembangunan komoditi yang tidak sesuai dengan geografis, topografis dan demografis wilayah.